



TRANSFORMASI
**KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM**
Arah Baru Perubahan Kebijakan
Pendidikan Tinggi Islam

Bagaimana merespon arah baru perubahan kebijakan pendidikan tinggi Islam melalui gagasan yang kritis transformatif. Perubahan merupakan suatu keniscayaan, sebab tidak ada yang kekal di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya pada aspek struktur dan bentuk organisasi, misalnya perubahan dari sekolah tinggi ke institut atau dari institut ke universitas, tetapi bagaimana perubahan itu berangkat dari *mindset* yang benar, karena perguruan tinggi merupakan "ruh" akademik dalam sebuah bangsa dan negara yang maju. Maka cara berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak harus mampu mewarnai setiap perubahan kebijakan yang dihasilkan.

Buku ini terdiri dari empat pembahasan, yang *pertama*, menjelaskan tentang arah kebijakan Pendidikan terutama terkait dengan perubahan pada aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Islam serta aspek kurikulum dan pembelajarannya, dengan kata lain bahwa pendidikan Islam harus dikelola lebih baik lagi dengan terus-menerus melakukan perubahan dari *the existing education to the other new and better one*. *Kedua*, Strategi peningkatan mutu pendidikan Islam, Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu perubahan status kelembagaan, penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keilmuan. *Ketiga*, model kebijakan Pendidikan tinggi Islam, Konsep pembahasannya berdasarkan produk kebijakan yang telah berjalan selama ini. *Keempat*, kebijakan strategis Pendidikan Islam, Tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Pendidikan saat ini sangat erat kaitannya dengan pasar sebagai konsumen dan dunia bisnis.

 Kalimedia



Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd (Ed.)

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Arah Baru Perubahan Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam



TRANSFORMASI
**KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM**

Arah Baru Perubahan Kebijakan
Pendidikan Tinggi Islam

Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd (Ed.)

 Kalimedia

T R A N S F O R M A S I
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM

**Arah Baru Perubahan Kebijakan
Pendidikan Tinggi Islam**

Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd (Ed.)

 **Kalimedia**

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI
ISLAM: Arah Baru Perubahan Kebijakan Pendidikan
Tinggi Islam**

Penulis: Bakhtiar., dkk

Editor: Agus Zaenal Fitri

Desain sampul dan Tata letak: Yofie AF.

ISBN: 978-602-6827-95-1

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. (0274) 486598

e-Mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan, I 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan karunianya, bunga rampai dari tulisan mahasiswa S3 program beasiswa dari MORA (*Ministry of Religious Affaris*) angkatan ke III di IAIN Tulungagung program studi Manajemen Pendidikan Dasar Islam pada matakuliah Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam bisa segera ditelaah dan dikaji melalui terbitnya buku ini.

Buku ini diberijudul "**Transformasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam**" yang ingin membahas tentang bagaimana merespon arah baru perubahan kebijakan pendidikan tinggi Islam melalui gagasan yang kritis transformatif. Perubahan merupakan suatu keniscayaan, sebab tidak ada yang kekal di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya pada aspekstruktur dan bentukorganisasi, misalnya perubahan dari sekolah tinggi ke institut atau dari institut ke universitas, tetapi bagaimana perubahan itu berangkat dari *mindset* yang benar, karena perguruan tinggi merupakan "ruh" akademik dalam sebuah bangsa dan negara yang maju.

Maka cara berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak harus mampu mewarnai setiap perubahan kebijakan yang dihasilkan.

Buku ini terdiri dari empat bab, pada Bab I ini menjelaskan tentang arah kebijakan Pendidikan terutama terkait dengan perubahan pada aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Islam serta aspek kurikulum dan pembelajarannya, dengan kata lain bahwa pendidikan Islam harus dikelola lebih baik lagi dengan terus menerus melakukan perubahan dari *the existing education to the other new and better one*.

Bab II, membahas tentang strategi peningkatan mutu pendidikan Islam. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu perubahan status kelembagaan, penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keilmuan misalnya melalui konsep integrasi keilmuan agar perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) dapat melahirkan intelektual profesional yang ulama/ulama profesional yang intelek, mencetak lulusan yang berotak Jerman dan berhati Mekkah berwatak nusantara sehingga menjadi manusia yang *kaffah*.

Bab III ini menjelaskan tentang model kebijakan Pendidikan tinggi Islam. Konsep pembahasannya berdasarkan produk kebijakan yang telah berjalan selama ini, seperti kebijakan pengembangan program studi umum di PTKI, program pemberian bantuan Pendidikan, penggabungan (*merger*) program studi/jurusan, pengembangan perguruan tinggi berbasis pesantren, pesantren berbasis perguruan tinggi serta konsep perguruan tinggi berbasis riset (*research university*). Skema *research university* ini hadir sebagai pendorong bagi perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan berinovasi

dalam meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian skema riset itu merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian indikator riset, yakni; publikasi, kekayaan intelektual, dan proto tipe industri.

Kemudian Bab IV, merupakan bab terakhir yang fokus pembahasannya pada kebijakan strategis Pendidikan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Pendidikan saat ini sangat erat kaitannya dengan pasar sebagai konsumen dan dunia bisnis. Konsep Pendidikan yang menempatkan mahasiswa sebagai konsumen utama adalah konsep manajemen yang diadopsi dari dunia industry seperti istilah *customer first*, *service excellence* dan *customer satisfaction*. Perubahan di era revolusi industri 4.0 dalam dunia Pendidikan menuntut adanya perubahan paradigma bagi pendidik (dosen), pendidik tidak boleh hanya mengandalkan hafalan dan ingatan dalam pembelajaran, karena *searching engine* seperti google, firefox jauh lebih mampu menyimpan dan mengeluarkan jutaan dokumen dalam memorinya, maka cara mendidik harus digeser dari pendekatan hafalan dan ingatan memori menuju peningkatan kualitas dan ketajaman dalam berfikir dan analisis yang lebih tinggi (*higher order thinking skill*), serta penguatan pendidikan karakter. Sebab hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh mesin, melainkan oleh Pendidikan sebagai manusia yang diberikan potensi akal dan hati. Pada bagian dalam buku ini membahas tentang orientasi perguruan tinggi menuju *world class university* (WCU), bagaimana upaya riil yang harus dilakukan PTKI untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia agar tidak tertinggal dengan perguruan tinggi umum yang selama ini bertengger di 5000 universitas terbaik di dunia, maka perlu ada *driving force* melalui usaha

yang sungguh-sungguh dalam merubah mindset dan culture pendidikan yang selama ini masih bersifat pragmatis menuju idealis-realistis.

Sebagai penutup, bahwa buku ini masih perlu banyak masukan dan kajian lanjutan dari para pakar, akademisi, dan praktisi dalam dunia Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar konsep dari kebijakan yang ada selama ini tidak hanya ideal dalam tataran konsep, tetapi juga bisa *well implemented* untuk diterapkan di dunia Pendidikan secara *massive* dan terstruktur. Maka hadirnya buku ini akan menjadi sumbangan pemikiran yang konstuktif bagi lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang lebih transformatif dalam dunia Pendidikan khususnya pada perguruan tinggi keagamaan Islam.

Wallahu a'lam bi showab

Tulungagung, Januari2019
Editor,

Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Transformasi Kebijakan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam	3
BAB II STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM	23
1. Perubahan Status Kelembagaan pada Lembaga Pendidikan Islam	25
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan Islam	43
3. Integrasi Keilmuan Lembaga Pendidikan Islam	71
4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam	91
BAB III MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM	131
1. Kebijakan Pengembangan Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Islam	133
	vii

Transformasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam

2. Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	151
3. Kebijakan Penggabungan (Merger) Fakultas pada PTKIN	177
4. Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren	197
5. Pesantren Berbasis Perguruan Tinggi	213
6. Universitas Berbasis Riset	233
BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI ISLAM	251
1. Hubungan Perguruan Tinggi dengan Market dan Bisnis	253
2. Pengembangan Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0	269
3. Internasionalisasi Perguruan Tinggi Islam	293
4. <i>World Class University</i> Perguruan Tinggi Islam	317

BAB I
PENDAHULUAN

1

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Bakhtiar

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menjadi landasan pedoman kebijakan pendidikan oleh seluruh komponen penyelenggara pendidikan di Negera Republik Indonesia. Berdasarkan landasan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dalam UUSPN, maka selanjutnya setiap komponen penyelenggara pendidikan menyusun dan merumuskan arah kebijakan pengembangan pendidikan, arah dan strategi pendidikan di masing-masing institusi penyelenggara pendidikan.

Permasalahan yang terjadi sekarang adalah pada penyelenggaraan pendidikan Islam oleh lembaga pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Soeroyo, bahwa pendidikan Islam masih terkesan terkukung dalam kemunduran, keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami masyarakat Islam. pendidikan Islam

terjebak dalam lingkaran yang tak kunjung selesai yaitu persoalan tuntutan kualitas, relevansi dengan kebutuhan, perubahan zaman, dan bahkan pendidikan apabila diberi “embel-embel Islam”, dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan.¹

Dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai bagian dari Pendidikan Nasional maka perlu adanya kebijakan yang memihak terhadap pendidikan Islam, pemerintah diharapkan memperlakukan dengan perlakuan yang sama antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Sehingga dengan kebijakan pendidikan Islam yang baik dapat membantu pendidikan Islam di Indonesia dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, bangsa dan negara.²

Dalam membentuk, merumuskan dan menyusun kebijakan pendidikan oleh masing-masing institusi, baik oleh Kemenag dan Kemendikbud serta Kemenritekdikti, maka masing-masing institusi dapat melakukan transformasi kebijakan pendidikan sesuai dengan ciri institusi. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga akan menjadi penguat bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi yang lain. Arah kebijakan pengembangan, arah dan strategi pendidikan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan atau keluar dari landasan kebijakan yang lebih besar di atasnya.

¹ Mohammad Emnis Anwar, Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 03, Januari 2014), h. 484.

² *Ibid.*, h. 485.

Perlu ada arah dan kebijakan yang menyeluruh untuk mengakomodir dan menghilangkan semua permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, walaupun pada masa sekarang sudah ada dan sudah mulai ada kemajuan, terutama pada lembaga pendidikan dini, dasar dan menengah yang sudah mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun sekarang yang paling kentara pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi Islam, yang masing terlalu jauh tingkat jurang pemisah dengan pendidikan umum lainnya. Arah dan kebijakan pendidikan di kementerian Agama sangat menentukan untuk mencapai kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kajian yang dilakukan dalam makalah ini adalah yang berkenaan dengan transformasi kebijakan pendidikan. Transformasi kebijakan pendidikan dilihat pada transformasi arah kebijakan pengembangan lembaga pendidikan Islam dan arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pembahasan kajian transformasi arah kebijakan pengembangan lembaga pendidikan Islam merupakan telaah dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sedangkan tentang arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah telaah dari rencana strategis Kementerian Agama dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

B. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari kata bahasa Inggris, yang diartikan dengan mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga

administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif.³

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones (dalam M. Hasbullah) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.⁴

Duke dan Canady sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo, mengelaborasi pemaknaan kebijakan dengan delapan konsep arah pemaknaan kebijakan, yaitu 1). Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2). Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3). Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, 4). Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5). Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6). Kebijakan sebagai norma perilaku dengan cirri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantive, 7). Kebijakan sebagai keluaran system pembuatan kebijakan, dan 8). Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁵

Kebijakan bersentuhan langsung dengan pemerintahan sebagai pengambil kebijakan yang bersifat tindakan politik,

³ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 37.

⁴ *Ibid.*, h. 38.

⁵ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 3.

sehingga kebijakan tidak terlepas dengan kebijakan Negara. Kebijakan Negara memiliki cirri-ciri khusus yang selalu melekat pada kebijakan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, administrator, para monarki dan sebagainya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kebijakan Negara yang dikoordinir oleh para eksekutif dan legislatif terdapat kebijakan pendidikan sebagai salah satu produk kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan pendidikan atau dalam bahasa inggris di sebut dengan *educational policy* yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan atau kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh para eksekutif yang menangani pendidikan.

Carter V Good sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imran dan selanjutnya oleh M. Hasbullah, mengemukakan bahwa pengertian *educational policy* merupakan pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.⁷

Kebijakan publik untuk pendidikan berkenaan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan

⁶ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, h. 39.

⁷ *Ibid.*, h. 41.

pendidikan. Secara faktual kebijakan pendidikan ada pada dua tataran, yaitu:⁸

1. Pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kebutuhan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis. Secara spesifik kebijakan pendidikan oleh pemerintah adalah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan seperti pengalokasian sumber-sumber financial dan penggunaannya, gedung, perlengkapan dan peralatan, dan fasilitas lainnya.
2. Satuan pendidikan yang melaksanakan pelayanan belajar melalui kegiatan pembelajaran. Kebijakan satuan pendidikan berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yaitu pengayaan kurikulum, penetapan tujuan instruksional, pembagian tugas tenaga pengajar, seleksi siswa baru, pengukuran kemajuan belajar siswa, penyediaan buku pelajaran dan sebagainya.

Oleh M. Hasbullah mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konstek politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Lebih lanjut M. Hasbullah mengemukakan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka

⁸ Syaiful Sagala, *Administarsi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 95.

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.⁹

Bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang dihasilkan juga membawa dampak tersendiri terhadap implementasinya. Dalam hubungan ini apakah tujuan-tujuan itu yang telah dirumuskan dengan jelas sehingga implementasi mudah atau masih kabur sehingga implementasinya susah di implementasi oleh tingkat bawah. Semua proses kebijakan akan membawa dampak pada keberhasilan implementasinya.

Kebijakan pendidikan berisi semua peraturan-peraturan yang menyangkut pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, serta kementerian agama. Kebijakan pendidikan sebagai produk sistem dan politik pendidikan sangat luas dan beragam, secara stratifikasi akan dimulai dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, peraturan/keputusan Direktorat Jenderal dan seterusnya sampai dengan peraturan/keputusan sekolah/madrasah.

Kebijakan pendidikan pada kementerian agama terutama pada rencana strategis kemenag dan rencana strategis pendidikan Islam yang berada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menggambarkan arah, kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam kurun waktu tertentu. Seperti rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019.

⁹ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, h. 41.

C. Transformasi Arah Kebijakan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.¹⁰

Dari tujuh arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019, yang menyangkut dengan arah kebijakan pendidikan ada pada poin nomor 6, yaitu Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah

¹⁰ Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015-2019, h. 1.

dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.¹¹

Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini.
- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan.
- e. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
- g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan.¹²

Proses transformasi harus menjadi pusat perhatian semua pihak. Pihak-pihak ini harus berusaha keras dalam mengimplementasikan proses transformasi tersebut dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam harus mendesain dan ditargetkan bahwa semua pihak harus menga-

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

lami transformasi ke arah positif-konstruktif, kreatif-produktif, dan dinamis-progresif.¹³

Transformasi arah, kebijakan dan strategi pendidikan harus mengarah kepada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Pendidikan Islam menjadi pendidikan modern dengan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

D. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Masa depan umat manusia di zaman modern sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia mampu eksis secara fungsional di tengah-tengah kehidupan global yang amat kompetitif. Maka selanjutnya lembaga pendidikan Islam akan menjadi minat masyarakat dalam mendidik anak-anaknya. Harapannya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu sekolah-sekolah unggulan yang bernuansa Islam akan menjadi alternatif pilihan masyarakat.¹⁴ Segala permasalahan tersebut telah di sahuti oleh kementerian agama dengan memasukkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam.

1. Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2015-2019 adalah:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).

¹³ Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 83.

¹⁴ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Bogor: Kencana, 2003), h. 171.

- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
 - 1. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
 - 2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
 - 3. Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan.
 - 4. Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
 - 5. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan.
 - 6. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan.
 - 1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
 - 2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
 - 3. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
 - 4. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan
- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
 - 1. Peningkatan akses pendidikan keagamaan.
 - 2. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
 - 3. Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.

4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
 5. Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
 6. Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
1. Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
 2. Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama.
 3. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama.
2. Strategi Pendidikan Islam
- Berdasarkan arah kebijakan maka strategi Pendidikan Islam pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan melalui 5 kegiatan prioritas, yaitu:
- g. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam.
 - h. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam.
 - i. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah.
 - j. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
 - k. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam, maka dibutuhkan kebijakan turunan sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan Islam yaitu:

- a. Rancangan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- b. Rancangan Peraturan tentang Kurikulum Mata Pelajaran Agama dan Mata Pelajaran Bahasa Pada MA/MAK;
- c. Rancangan Peraturan tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah;
- d. Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Administratif, Teknis dan Kelayakan Pendirian Madrasah;
- e. Rancangan Peraturan tentang Peserta Didik RA, MI, MTS, MA/MAK;
- f. Rancangan Peraturan tentang Struktur Kurikulum MI dan MTS;
- g. Rancangan Peraturan tentang Penjurusan dan Program Studi MA;
- h. Rancangan Peraturan tentang Penjurusan MAK;
- i. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah;
- j. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Madrasah;
- k. Rancangan Peraturan tentang Komite Madrasah;
- l. Rancangan Peraturan tentang Kelompok Kerja Madrasah;
- m. Rancangan Peraturan tentang Akreditasi Madrasah;
- n. Rancangan Peraturan tentang Ulangan Tengah/Akhir Semester, Penilaian Akhir dan Ujian Madrasah;

- o. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
- p. Rancangan Peraturan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah MI, MTS, MA, MAK dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah MI, MTS, MA, MAK;
- q. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Ijazah Luar Negeri;
- r. Rancangan Peraturan tentang Pengembangan Madrasah;
- s. Rancangan Peraturan tentang Penggunaan Biaya Operasi Madrasah;
- t. Rancangan Peraturan tentang Sanksi Administratif;
- u. Rancangan Peraturan tentang Status Madrasah Filial;
- v. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Kelengkapan Administrasi dan Visitasi Lapangan;
- w. Rancangan Peraturan tentang Pendaftaran Pesantren;
- x. Rancangan Peraturan tentang Hasil Pendidikan Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan;
- y. Rancangan Peraturan tentang Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
- z. Rancangan Peraturan tentang Penilaian Khusus Perizinan Satuan Pendidikan Muadalah;
- aa. Rancangan Peraturan tentang Penamaan Satuan Pendidikan Muadalah;
- bb. Rancangan Peraturan tentang Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Muadalah;

- cc. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Muadalah;
- dd. Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Penilaian Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Muadalah;
- ee. Rancangan Peraturan tentang Penerbitan Ijazah Pada Satuan Pendidikan Muadalah;
- ff. Rancangan Peraturan tentang Akreditasi Satuan Pendidikan Muadalah.
- gg. Rancangan Instruksi Presiden tentang menyesuaikan Program Pendidikan menengah universal;
- hh. Rancangan keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri atau Menko Kesra tentang "Pendanaan Pendidikan Islam di Daerah".

Peraturan-peraturan inilah yang akan mengatur semua implementasi pendidikan di kementerian agama yang akan menjadi pedoman pelaksana oleh semua lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan, mulai dari jenjang dini, dasar, menengah, atas dan tinggi. Implementasi dari semua peraturan tersebut sangat membutuhkan semua dukungan dari pihak yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan menunjuk kepada aktivitas yang menjalankan semua peraturan-peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kerja pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman akan dapat memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi oleh lembaga pendidikan serta masyarakat.

E. Permasalahan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Berbagai permasalahan terjadi pada lembaga pendidikan Islam, baik itu mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Beberapa permasalahan yang terjadi mencakup kepada masalah pendanaan, sumber daya manusia, kualitas, manajemen sampai pada perubahan budaya.¹⁵

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Agama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dapat dipahami bahwa kebijakan yang sudah di buat sudah sangat kompleks dengan wilayah kerja kementerian agama yang sangat luas. Wilayah dan lingkup kerja Kementerian Agama bukan hanya pendidikan saja, tetapi mencakup semua hal yang berkenaan dengan keagamaan. Kinerja pendidikan Islam hanya ditangani oleh satu Direktorat Jenderal.

Namun dengan segala keterbatasan penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama, tetapi proses transformasi kebijakan dan kelembagaan sudah berjalan secara baik. Transformasi kebijakan dari arah kebijakan sebelumnya dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif berdasarkan dari capaian kinerja periodese sebelumnya.

Transformasi kebijakan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tidak mengarah kepengembangan lembaga, tetapi lebih kepada peningkatan akses dan mutu. Sedangkan transformasi pada pendidikan menengah mengarah kepada peningkatan akses, mutu, relevansi dan juga daya saing. Hal

¹⁵Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 135.

ini dapat kita lihat dari pengembangan lembaga MAN regular menjadi MAN Insan Cendikia dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan), pesantren tradisional menjadi pesantren modern.

Transformasi lembaga pendidikan Islam pada level pendidikan dasar, menengah, dan atas, sekarang lebih diminati oleh masyarakat. Banyak contoh madrasah atau sekolah umum yang berlabelkan Islam (SDI, SMP I dan SMAI) sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan pesantren yang dulunya identik sebagai tempat belajar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kini bertransformasi menjadi pesantren modern dan menjadi tujuan utama orang tua dari kalangan menengah ke atas untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya.¹⁶

Sedangkan transformasi pada tingkat perguruan tinggi, Kementerian Agama juga melakukan peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Perguruan tinggi yang berkualitas itu setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan stakeholder, berupa: 1). *Social need* (kebutuhan masyarakat); 2). *Industrial needs* (kebutuhan industri); dan 3). *professional needs* (kebutuhan profesional).

Transformasi perguruan tinggi keagamaan Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau Ekonomi atau lainnya menjadi STAI atau STAIN. Selanjutnya dari STAI atau STAIN menjadi IAI atau IAIN. Kemudian transformasi IAIN menjadi UIN. Selanjutnya permasalahan yang timbul dari Kebijakan transformasi atau konversi IAIN menjadi UIN nampaknya menyisakan dampak negatif yang ditinggalkan. Jika pada

¹⁶ Andi Wahyono, Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi, *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435), h. 117.

awalnya IAIN memiliki fakultas agama (Tarbiyah, Syariah, Dakwah, Adab, dan Ushuludin), maka konsekuensi logis yang ditimbulkan dari konversi tersebut adalah UIN harus membuka fakultas-fakultas umum. Akibat dari transformasi ini, akan muncul dua kebijakan yang akan mengatur satu tubuh UIN. Singkatnya dalam satu tubuh UIN akan berada dalam dua kendali kebijakan yaitu fakultas agama berada di bawah Kementerian agama dan fakultas umum berada di bawah Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekilas permasalahan ini tidak akan menimbulkan dampak besar, namun adanya tumpang tindih kebijakan dan adanya kemungkinan kebijakanyang tidak selaras dapat menjadikan tubuh UIN menjadi “sakit” karena tak tentuarah dan memikul beban yang berat.¹⁷

Munculnya Universitas Islam Negeri (UIN) pada PTKIN merupakan memberikan dampak terhadap arah kebijakan yang diambil. Jika STAIN/IAIN masih sangat kental dengan nuansa keilmuan agama, maka tidak demikian dengan UIN.¹⁸

Kementerian Agama berjalan sangat sukses dalam hal transformasi pengembangan lembaga pendidikan Islam (Pendidikan usia dini, Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi), namun belum dapat sepenuhnya bertransformasi dalam kebijakan pendidikan sehingga menyebabkan dikotomi/dualism kebijakan. Solusi untuk menanggulangi hal ini adalah dengan percepatan transformasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Agama.

¹⁷ *Ibid.*, h. 118.

¹⁸ Fitri, *Organisasi Pembelajaran*, h. 144.

Penutup

Kebijakan pendidikan merupakan segala bentuk peraturan-peraturan Negara yang diatur oleh pemerintah di bidangnya pendidikan sebagai pedoman pelaksana pendidikan. Secara khusus turunannya akan diatur oleh masing-masing kementerian yang menangani pendidikan. Peraturan-peraturan pelaksana yang menyangkut pendidikan Islam diatur oleh Kementerian Agama melalui Direktorat pendidikan masing-masing jenjang pendidikan.

Transformasi arah kebijakan dan strategi pendidikan Islam mengarah pada peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing. Transformasi kebijakan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tidak mengarah kepengembangan lembaga, tetapi lebih kepada peningkatan akses dan mutu. Sedangkan transformasi pada pendidikan menengah mengarah kepada peningkatan akses, mutu, relevansi dan juga daya saing. Hal ini dapat kita lihat dari pengembangan lembaga MAN regular menjadi MAN Insan Cendikia dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan). Transformasi perguruan tinggi keagamaan Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau Ekonomi menjadi STAI atau STAIN. Selanjutnya dari STAI atau STAIN menjadi IAI atau IAIN. Kemudian transformasi IAIN menjadi UIN.

Daftar Pustaka

- Anwar, Mohammad Emnis. Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03, Januari 2014.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019.
- Fitri, Agus Zaenal. *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Hasbullah, M. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kemenag, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bogor: Kencana, 2003.
- Qomar, Mujamil. *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Wahyono, Andi. Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435.

BAB II

URGENSI

PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN ISLAM

1

PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Fadhli

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam hingga saat ini masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”. Paradigma ini tentunya tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang memiliki kualitas baik seperti MAN Insan Cendikia dan beberapa Sekolah Islam terpadu lainnya yang memang menjadi tujuan bagi orangtua siswa. Namun kualitas ini masih belum merata, bahkan jumlah lembaga pendidikan Islam yang kualitasnya masih perlu ditingkankan jauh lebih banyak. Sebagai contoh jika dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN) sangat jarang siswa-siswi madrasah yang masuk dalam kategori sepuluh besar Indonesia.

Pada dasarnya sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar telah menempatkan sekolah-sekolah Islam (madrasah) sama/sejajar dengan sekolah umum. Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional. Istilah yang digunakan untuk menjelas-

kan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (pasal 12, 17, dan 30). Oleh karena itu, istilah Pendidikan Islam yang digunakan dalam Renstra ini mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: (i) Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan; (ii) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/Informal; (iii) Pendidikan keagamaan Islam di berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/Informal. Namun masih banyak terjadi perbedaan antara sekolah Islam/madrasah dengan sekolah umum terutama pada pembiayaan untuk sarana dan pembinaan lainnya.

Kompleksitasnya pengelolaan dan permasalahan lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih belum ditemukan formula ampuhnya. Beberapa permasalahan yang kerap kali dibicarakan yaitu belum maksimalnya mutu pendidikan di semua tingkatan pendidikan mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Belum maksimalnya persoalan mutu ini disebabkan oleh berbagai aspek seperti: rendahnya kompetensi guru, sarana

dan prasarana yang kurang maksimal,¹ pembiayaan dan lain sebagainya.

Pada tataran pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama baik itu PTKIN maupun PTKI juga memiliki problematika yang sangat kompleks beberapa masalah kompleks itu antara lain mencakup 1) *budgeting* atau pembiayaan, 2) sumber daya manusia 3) persepsi masyarakat terhadap PTKI ini juga Dianggap sebagai masalah. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa PKN sebagai lembaga dakwah dan bukan sebagai lembaga akademik dan 4) yang paling penting adalah permasalahan pada aspek manajemen lembaga dan kualitas lulusannya.

Upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam merupakan sesuatu yang perlu menjadi prioritas utama bagi pengambil kebijakan. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam itu bertujuan memberi jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan Islam dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam untuk dapat meningkatkan mutunya adalah dengan perubahan status kelembagaan. Perubahan merupakan suatu yang mutlak dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam. Perubahan setatus kelembagaan menjadikan lembaga pendidikan Islam memiliki akses yang lebih luas dan lebih baik serta daya tawar. Sebagai sebuah Organisasi, lembaga pendidikan Islam bagaimanapun tidak mungkin tidak akan melakukan perubahan, perubahan bagi organisasi dimana manusia yang berada di dalamnya dilakukan oleh manusia,

¹ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajar* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017) h. 123-124.

manusia tersebutlah yang menginginkan terjadinya perubahan dalam organisasi sehingga organisasi melalui kesepakatan bersama anggota-anggota dapat mencapai tujuan tersebut.²

Selain itu menurut Siagian semua lembaga harus terus beradaptasi dengan perubahan karena adanya faktor-faktor yang selalu mendorong perubahan. Faktor pendorong tersebut antara lain: 1). Tantangan utama dimasa depan 2). Perubahan dalam konfigurasi ketenagakerjaan 3). Peningkatan di bidang tingkat pendidikan para pekerja 4. Revolusi dibidang teknologi 5). Perkembangan perekonomian dunia 6). Berbagai kecenderungan sosial 7). Faktor geopolitik 8). Persaingan 9). Pelestarian lingkungan.³

Melakukan perubahan juga merupakan perintah Allah. Allah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik maka manusia diperuntahkan untuk melakukan perubahan karena Allah tidak akan memberikan perubahan itu tanpa adanya usaha dari hambanya. Sebagaimana dalam alquran surat Ar- Ra'd ayat 11 Allah berfirman:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak

² Amiruddin Siahaan dan Wahyuli Lius Zen, *Manajemen Perubahan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 41.

³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Untuk dapat melakukan perubahan dengan baik, maka diperlukan manajemen yang baik pula. Manajemen dalam perubahan merupakan suatu hal yang bersesuaian pentingnya dengan perubahan itu sendiri. Paton dan McCalman menegaskan *“management and change are synonymous; it is impossible to undertake a journey, for in many respects that is what change is, without first addressing the purpose of the trip, the route you wish to travel and with whom.”*⁴ Pendapat ini bahkan menegaskan bahwa perubahan dan manajemen merupakan sesuatu yang sama/sinonim. Paton dan McCalman memberkan analogi dengan sebuah perjalanan yang tidak mungkin dilakukan tanpa membahas tujuan, jalur/rute yang ditempuh dan dengan siapa saja perjalanan itu dilakukan. Mengelola perubahan adalah tentang bagaimana dapat menangani kerumitan dalam perjalanan. Mengelola perubahan adalah tentang mengevaluasi, merencanakan dan mengimplementasikan secara operasional, taktis dan strategis sebuah tujuan yang ingin di capai.

Dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara lembaga pendidikan Islam melakukan perubahan untuk menjadi lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

⁴Robert A. Paton and James McCalman. *Change Management* (Los Andles: Sage Publication, 2008) h. 3.

B. Prosedur Perubahan Status Lembaga Pendidika Islam

1. Konsep dan Makna Manajemen Perubahan

Ada kata-kata filosofis yang selalu disampaikan oleh para ahli dalam manajemen perubahan yaitu “tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Kata-kata ini memberikan penegasan bahwa perubahan itu mutlak akan selalu ada. Sejalan dengan pandangan ini Luecke “*change will not disappear nor dissipate. Technology, civilizations and creative thought will maintain their ever-accelerating drive onwards. It could be argued that a state of continuous change has almost become routine.*”⁵ Luecke menggunakan istilah perubahan tidak akan hilang atau menghilang. Teknologi, peradaban, dan pemikiran kreatif justru akan mendatangkan perubahan. Dapat dikatakan bahwa perubahan akan terus berkelanjutan bahkan hampir menjadi rutin.

Oleh karena itu kita di tuntut untuk dapat memana-jemen/ mengelola perubahan yang terus-menerus dan mutlak ada tersebut. Albach dkk menambahkan pentingnya manajemen dalam perubahan sebagai: *change management supports those in a company that are responsible to overcome rigid behavior patterns to effectively change internal structures and to develop an environment which serve as a flexible guide.*⁶ Manajemen perubahan mendukung pengambil kebijakan/pemimpin dalam lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatasi

⁵Robert A. Paton and James McCalman. *Change Management* (Los Andles: Sage Publication, 2008) h. 5.

⁶Horst Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart dan Ralf Reichwald. New Challenges and Opportunities for Change Management. Dalam Horst Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart dan Ralf Reichwald (Ed). *Management of Permanent Change* (New York: Springer, 2015), h. 6.

pola-pola lama yang kaku untuk secara efektif mengubah struktur internal organisasi dan untuk mengembangkan lingkungan yang berfungsi sebagai landasan yang fleksibel.

Pemimpin akan memimpin anggota organisasi untuk melakukan perubahan di organisasi termasuk pada lembaga pendidikan. Faktor kepemimpinan menjadi kunci dalam keberhasilan mengelola perubahan. Kegagalan dalam strategi melakukan perubahan dapat dihindari jika pemimpin perubahan melakukan keseimbangan antara rasa dengan pendekatan yang lebih bijaksana untuk menerapkan perubahan.⁷ Pemimpin harus memiliki langkah-langkah praktis untuk memaksimalkan peluang keberhasilan perubahan organisasi.

2. Strategi Perubahan Lembaga Pendidikan Islam

Seperti sudah di jelaskan pada bagian pendahuluan bahwa untuk dapat menjadikan lembaga pendidikan Islam harus melakukan perubahan. Perubahan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam yaitu: a) Penegerian Lembaga Pendidikan Islam baik Madrasah maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan b) Transformasi atau alih status pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik dari STAIN Ke IAIN maupun dari IAIN ke UIN.

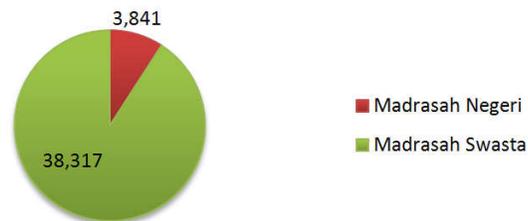
a) Substansi Penegerian Lembaga Pendidikan Islam

Proses penegerian Madrasah swasta merupakan salah satu usaha yang terus dilakukan oleh Kementerian Agama. Hal ini dilakukan karena jumlah madrasah swasta jauh lebih banyak di bandingkan madrasah negeri.

⁷ Douglas B Reeves, *Leading Change in Your School* (Virginia: ASCD, 2009), h. 7.

Berdasarkan data Kementerian Agama dari 42.158 MI, MTs dan MA di Indonesia maka 38.317 atau 90,89 persen di antaranya adalah madrasah swasta yang nota bene diselenggarakan oleh masyarakat; dan hanya 3.841 atau 9,11 persen yang merupakan madrasah negeri.⁸ Untuk lebih memudahkan dalam melihat data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

**Perbandingan Jumlah Madrasah Swasta
Dan Negeri**



Gambar 2.1 Perbandingan Jumlah Madrasah Swasta dan Negeri

Walaupun saat ini madrasah swasta mendapatkan berbagai bantuan BOS, BOP, BSM, KIP dan sebagainya. Namun masih belum dapat di katakan sama dengan madrasah negeri. Beberapa perbedaannya antara lain:

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat pada madrasah negeri lebih tinggi di bandingkan madrasah swasta
- 2) Bantuan sarana dan prasarana kepada madrasah negeri lebih baik di bandingkan madrasah swasta (DAK dan DAU)

⁸ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah: Kemenag atau Kemdikbud. (<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6595>) di Akses Tanggal 30 Agustus 2018.

- 3) Madrasah negeri bisa memanfaatkan dana BOS ke arah peningkatan kualitas pembelajaran karena dana BOS tidak terpakai untuk gaji guru.

Atas dasar beberapa poin di atas maka kementerian agama sebenarnya pada tiap tahunnya membuat permohonan untuk penegerian beberapa madrasah. Namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya menyetujui tidak lebih dari 50 madrasah setiap tahunnya.

Untuk itu kementerian agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat. PMA ini di buat dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan madrasah, pemerintah dapat mendirikan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau menegcrikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Prosedur dalam penegerian Madrasah sebagaimana dalam PMA Nomor 14 tahun 2014 tertuang dalam BAB III pasal 5 sampai pasal 7 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penegerian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan masyarakat;

- b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi;
 - c. rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
- (3) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
 - (4) Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
 - (5) Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal dapat menetapkan status madrasah liliat dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Penetapan madrasah liliat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:

- a. kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah; dan/atau
- b. keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasah nya kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya PMA ini diharapkan dapat mempermudah akses madrasah-madrasah swasta untuk dapat menjadi negeri. Tingginya animo masyarakat/yayasan yang ingin menegerikan madrasah nya harus direspon oleh pemerintah melalui percepatan-percepatan dalam hal administrasi dan kemudahan akses serta biaya. Kementerian Agama harus terus berkoordinasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b) Substansi Transformasi/Alih Status pada PTKIN

Proses perubahan dan pengembangan IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) dimulai dan di dasari sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 31 tahun 2002 tepatnya tanggal 20 Mei 2002 tentang Perubahan Institut

Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bertransformasinya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tonggak pergerakan dan perubahan lembaga pendidikan tinggi Islam. Selanjutnya transformasi tersebut diikuti pula oleh 5 (lima) IAIN/STAIN lainnya di Indonesia yang juga bertransformasi menjadi universitas, yakni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN SUKA Yogyakarta), STAIN Malang (sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), IAIN Sulthan Syarif Qasim Riau (UIN Sulthan Syarif Qasim Riau), IAIN Alauddin Makassar (sekarang UIN Alauddin Makassar), dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN Bandung).

Pengembangan pendidikan tinggi Islam merupakan sebuah keniscayaan. Untuk mengembangkan pendidikan tinggi Islam, pengembangan perguruan tinggi Islam mutlak diperlukan. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Dalam konteks UIN Malang Arifa menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui oleh UIN Malang dalam bertransformasi. Transformasi UIN Malang, secara ringkas dibagi menjadi tiga tahapan yaitu⁹: 1) *Unfreezing*. STAIN Malang beranjak dari zona nyaman dengan menganalisis berbagai permasalahan. 2) *Moving*. Perubahan STAIN Malang menjadi UIN adalah perubahan besar dan menyeluruh. Untuk itu, STAIN Malang memerlukan berbagai landasan. 3) *Refreezing*. STAIN/Malang

⁹Laily Nur Arifa. Perubahan STAIN/IAIN Menjadi Uin Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (Contoh Kasus Perubahan STAIN menjadi UIN Malang Perspektif Manajemen Perubahan Kurt Lewin). *Vicratina*. Vol 01, No 2 (2017), h. 27-42.

telah berubah menjadi UIN. Perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan nama saja, namun juga perubahan kelembagaan, filosofis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis. Meskipun begitu, perubahan ini bukanlah akhir. Pola ini akan kembali ke awal karena perubahan adalah sebuah keniscayaan.

Dalam rencana strategis direktorat jenderal pendidikan Islam tahun 2015 – 2019, Kementerian Agama telah menandatangani rencana pembangunan PTKIN baru, penegerian perguruan tinggi swasta serta perubahan bentuk sehingga memberikan peluang bagi peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Islam khususnya pendidikan tinggi Islam.¹⁰ Kebijakan ini merupakan kebijakan strategis yang dimiliki oleh kementerian Agama dan harus terus mendapatkan dukungan dan pengawasan agar kebijakan ini dapat diwujudkan.

C. Manfaat dan Tujuan Perubahan Status Lembaga Pendidikan Islam

Perubahan dalam lembaga pendidikan Islam memiliki tujuan dan mafaat pada dasarnya adalah: (1) meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan Islam, (2) meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota organisasi pendidikan Islam, (3) berorientasi kepada masa depan pendidikan Islam, (4) mendekatkan diri pada *stakeholder/* pemangku kepentingan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan pada lembaga pendidikan Islam adalah untuk kepentingan orga-

¹⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015 – 2019* (Kementerian Agama, 2015), h. 21.

nisasi dan semua orang yang ikut terlibat atau yang menggunakan jasa lembaga pendidikan Islam.

Capaian yang dihasilkan dari adanya perubahan-perubahan dalam pembangunan pendidikan Islam dapat dilihat sesuai arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan Pendidikan Islam 2010- 2014 yaitu : (1). Perluasan dan Pemerataan Akses; (2). Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; dan (3). Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan.¹¹

Selain itu yang paling penting bagi bangsa ini sebenarnya bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan bangsa dan negara. Pengakuan ini ditandai dengan diberikannya posisi khusus dalam undang-undang pendidikan nasional. Timbulnya berbagai masalah yang ada pada lembaga pendidikan Islam melahirkan kesadaran dan semangat bahwa pendidikan Islam harus memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Margono yang menyatakan bahwa:

Islamic education plays an important role in developing the nation, and as such it is granted a special position in the national educational laws of both of these states. Although perspectives still exist which place Islamic education as a second class subject which is regarded to be on a lower level when compared to general education subjects, these same problems bring forth the realization that Islamic education

¹¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2015 – 2019* (Kementerian Agama, 2015), h. 3.

*must play an important role in an individual's life, so that it can be felt in every aspect of society.*¹²

Ada dua motivasi utama menjadikan IAIN menjadi UIN: untuk memperbaharui metodologi dan pembedangan kembali studi Islam dan kepentingan politik, yakni memajukan umat Islam. Tujuan utama dari konsep UIN sendiri adalah untuk menghilangkan dikhotomi ilmu. Dalam hal ini paradigma UIN erat kaitannya dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Ismail Raji al-Faruqi dan Muhammad Naquib al-'Attas. Jika Islamisasi ilmu pengetahuan adalah tataran teoritis, maka UIN dapat dikatakan sebagai tataran praktis mewujudkan ide Islamisasi tersebut.¹³

Ja'far memberikan pandangan yang sangat menarik tentang bagaimana mmenjadikan pendidikan Islam lebih maju sebagai berikut:

*One important thing is by learning from the golden history of Islamic education, Indonesian Islamic education should be reconstructed in to modern system. Perhaps the knowledge is classic as inheritance but the way in transforming should be conducted in modern with no any objection of modern science. As everything is changing including the educational institution, Islamic education will be left behind again if Moslems are still afraid of being open mind in understanding the result of civilization, science.*¹⁴

¹² Untung Margono. Islamic Education in Indonesia and Malaysia. *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 7, No. 2, Desember 2012, h. 363-378.

¹³ Syamsul Bahri. Perubahan Paradigma Keilmuan Iain Menuju Uin Ar-Raniry. *Jurnal Islam Futura*. Vol. Xi, No. 2, Februari 2012, h. 368-52.

¹⁴ Handoko Ja'far. Indonesian Islamic Education: Towards Science Development. *Walisongo*, Vol. 23, Nomor 2, Nov. 2015, h. 331-344.

Pendapat diatas menekankan hal yang penting adalah bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan Islam kita harus belajar dari sejarah emas kemajuan Islam, namun pada era moderen ini, pendidikan Islam Indonesia harus direkonstruksi ke dalam sistem modern pula. Mungkin pengetahuan itu klasik perlu di jadikan sebagai warisan dan pelajaran, namun cara mentransformasikan pendidikan Islam untuk lebih maju harus dilakukan secara modern tanpa keberatan terhadap sains modern. Karena semuanya berubah termasuk lembaga pendidikan, pendidikan Islam akan tertinggal lagi jika umat Islam masih takut membuka pikiran dalam memahami hasil peradaban, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari berbagai pemaparan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa beberapa manfaat yang didapat dari transformasi lembaga pendidikan Islam menjadi UIN adalah: 1) memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain, 2) memberikan peluang bagi peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Islam khususnya pendidikan tinggi Islam.

D. Penutup

Pendidikan Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendidikan yang memuat substansi dan pendekatan nilai-nilai agama adalah pendidikan umum dengan kekhasan Islam, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Upaya pengembangan pendidikan Islam kita harus belajar dari sejarah emas kemajuan Islam, namun pada era moderen ini, pendidikan Islam Indonesia harus direkonstruksi ke

dalam sistem modern pula. Mungkin pengetahuan itu klasik perlu di jadikan sebagai warisan dan pelajaran, namun cara mentransformasikan pendidikan Islam untuk lebih maju harus dilakukan secara modern tanpa keberatan terhadap sains modern.

Faktor kepemimpinan menjadi kunci dalam keberhasilan mengelola perubahan. Kegagalan dalam strategi melakukan perubahan dapat dihindari jika pemimpin perubahan melakukan keseimbangan antara rasa dengan pendekatan yang lebih bijaksana untuk menerapkan perubahan.

Capaian yang dihasilkan dari adanya perubahan-perubahan dalam pembangunan pendidikan Islam dapat dilihat sesuai arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan Pendidikan Islam 2010- 2014 yaitu : (1). Perluasan dan Pemerataan Akses; (2). Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; dan (3). Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan.

Daftar Pustaka

- Albach, H., Meffert, H. Pinkwart, A dan Reichwald, R. (2015). *New Challenges and Opportunities for Change Management*. Dalam Horst Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart dan Ralf Reichwald (Ed). *Management of Permanent Change*. New York: Springer.
- Arifa, L. N. (2017). *Perubahan STAIN/IAIN Menjadi Uin Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (Contoh Kasus Perubahan STAIN menjadi UIN Malang Perspektif Manajemen Perubahan*

- Kurt Lewin). *Vicratina*. Vol 01, No 2 (2017) hal 27-42.
- Bahri, S. (2012). Perubahan Paradigma Keilmuan Iain Menuju Uin Ar-Raniry. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Volume Xi, No. 2, Februari 2012. hal 36-52
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015 – 2019*. Kementerian Agama
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. *Madrasah: Kemenag atau Kemdikbud*. (<http://pendis.kemenag.go.id/-index.php?a=detilberita&id=6595>) di Akses Tanggal 30 Agustus 2018
- Fitri, A. Z (2017). *Organisasi Pembelajaran*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- Ja'far, H. Indonesian Islamic Education: Towards Science Development. *Walisongo*, Volume 23, Nomor 2, November 2015, hal 331-344
- Margono, U. Islamic Education in Indonesia and Malaysia. *Jurnal AtTa'dib*. Volume 7 Nomor 2, Desember 2012, hal 363-378.
- Paton, R. A dan McCalman, J. (2008). *Change Management*. Los Andles: Sage Publication.
- Reeves, D. B. (2009). *Leading Change in Your School*. Virginia: ASCD.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, A dan Zen, W. L. (2012). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

2

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Yuni Masrifatin

A. Pendahuluan

Sumber daya manusia atau lebih dikenal dengan SDM yang adalah sebagai satu unsur dalam organisasi di dalam yang juga salah satu fungsi manajemen selain perencanaan, pengarahan, pengendalian. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Apapun bentuk serta tujuan organisasi atau lembaga, dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia pula. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi atau lembaga kegiatan organisasi atau lembaga.¹

Eksistensi bangsa Indonesia di tengah percaturan era global sekarang, akan dipengaruhi kemampuan sumber daya

¹H AB Andi Malla, 'Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Inspirasi*, 10.1 (2010), 165-74 <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2798/0>>.32

manusia Indonesia, terutama yang bercirikan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemantapan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan adalah potensi yang merupakan asset dan material/non finansial di dalam organisasi sekolah, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi/sekolah.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan, khususnya Pendidikan Islam ada sejak adanya manusia itu sendiri (Nabi Adam dan Ibu Hawa), bahkan ayat Al Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan perintah tentang shalat, puasa dan lainnya, tetapi justru perintah iqra' (membaca, merenungkan, menelaah, meneliti atau mengkaji) atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan.² Kapasitas individu yang mampu mengkonstruksi system belajar berkelanjutan dalam rangka mengubah dan mengadaptasi organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang sedang berubah.³ Sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Masalah diatas penulis merasa penting untuk membahas tentang penguatan sumber daya manusia di lingkungan

² Akhmad Syahri, 'Pengembangan Madrasah Unggulan di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Sumurpanggung Margadana Tegal Jawa Tengah', *Al-Wijdân: Journal of Islamic Education Studies*, 2017, h. 3-12.

³ Agus Zainul Fitri "Organisasi Pembelajar" IAIN Tulungagung Press, Tulungagung, h. 230.

pendidikan Islam. Sumberdaya manusia bisa dikatakan sebagai pelaku yang menjadi dominasi atas keberhasilan sebuah lembaga pendidikan Islam.

B. Penguatan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi pasti memiliki cita-cita yang ingin diraih. Tujuan-tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Dan di antara sumber daya yang paling penting adalah SDM (sumber daya manusia). Karena untuk menjadikan pendidikan berkualitas, terutama dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, maka sumber daya manusianya harus berkualitas juga. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat vital dalam setiap organisasi, karena faktor sumber daya manusia sangat dominan dalam proses kerja organisasi, maka untuk mencapai tujuan organisasi perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keterampilan, perilaku serta pengetahuan pegawai. Disamping⁴ itu, perubahan yang terjadi seiring modernisasi baik dalam lingkup organisasi maupun di luar organisasi menuntut untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga sebagai investasi dalam organisasi, sdm memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bangsa.

Untuk itu sebagai sumber daya utama suatu organisasi, perhatian penuh terhadap sumber daya manusia suatu keniscayaan, karena kondisi lingkungan yang dinamis, penempatan pegawai, tidak selalu menyebabkan keberhasilan, kondisi lingkungan yang cenderung berubah mengharuskan organisasi secara kontinyu melakukan penyesuaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.

Sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja. Jadi penguatan sumber daya manusia adalah proses menggunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Sumber Daya Manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif. Dimensi kualitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (*ide*), pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. sedangkan dimensi kuantitatif adalah terdiri atas prestasi dunia kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, nilai produktifitas dari SDM tersebut akan menghasilkan nilai balik (*rate of return*) yang positif.⁵

C. Penguatan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya termasuk lingkungan alam dan lingkungan

⁴ Agus Zainul Fitri, 'Quality Assurance System between the Islamic State University and the State University', *Jurnal Pendidikan Islam*, 2.2 (2016), h. 208–30.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Republik Indonesia, 'Target Kemendikbud Dalam Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2017', *Kemendikbud*, 2015. h. 34.

manusia. Di dalam interaksi tersebut manusia bukan hanya hasil interaksi dengan alamnya dan dengan sesama manusia, melainkan hasil pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan fitrahnya. Dengan adanya kecenderungan pemanfaatan pendidikan Islam yang berbasis pada masyarakat (community based on education management),⁶ maka terdapat suatu ruangan yang terbuka bagi pengembangan inovasi dan kreativitas. Pendidikan Islam diharapkan dapat lebih berkembang sehingga lembaga pendidikan Islam memiliki daya tarik tersendiri, karena lebih berdimensi keluar dan global.

Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan berbagai prasyarat di dalam pelaksanaannya, antara lain lingkungan kehidupan manusia hendaknya memberikan kesempatan kepada perkembangan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada padanya. Pendidikan Islam, dalam pertumbuhan spiritual dan moral akan mampu menolong individu menguatkan iman, akidah, dan pengenalan terhadap Allah SWT, melalui hukum, moral dan ajaran agama, dengan demikian peserta didik dalam melaksanakan tuntunan iman kepada Allah SWT dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama dan nilainya dalam kehidupan pada tingkah lakunya, dan hubungannya

⁶ Surya Dharma, 'Penilaian Kinerja Guru', *Depdiknas, Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*, 2008, h. 49.

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nO fe7KLUAhVHRY8KHUMAD38QFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fgurupembaharu.com%2Fhome%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2011%2F02%2F22-04-B3-Penilaian-Kinerja-Guru.doc&us>>.

dengan Allah SWT dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, akan mempertegas pentingnya pendidikan akhlak dan spiritualitas dalam menyongsong globalisasi.⁷ Setidaknya ada dua macam perspektif pembangunan Pendidikan Agama Islam pada sekolah; perspektif pembangunan nasional dan perspektif pembangunan internasional. Perspektif pembangunan nasional lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai Pendidikan Agama Islam pada sekolah lebih kepada kepentingan pembangunan nasional. Sedangkan perspektif pembangunan internasional, lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai pada konstalasi pembangunan yang lebih bersifat global.

Kemajuan globalisasi yang paralel dengan gejala modernisasi di seluruh duni tentu memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Indonesia. Namun arus globalisasi yang terjadi tentu tidak sela manya selaras dengan kemajuan sebuah bangsa. Makin seringnya komunikasi antar budaya serta sistem nilai yang terjadi antar sebuah suku bangsa kerap identik dengan perbenturan antar nilai, kepentingan, serta peradaban. Mengutip Huntington, bahwa perbenturan antar peradaban yang terjadi di penghujung abad ke 20 justru mengindikasikan akan adanya disparitas baru hubungan antara agama dengan negara, khususnya Islam. Tak pelak arus globalisasi yang terjadi di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk muslim, harus dipikirkan secara bersama agar dampak yang terjadi tidak melulu identik dengan pertentangan bahkan perbenturan antar budaya. Situasi ini kemudian menjadikan pendidikan

⁷Heni Purwati, 'Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Dosen', *Aksioma*, September.2 (2011), 4 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26877/aks.v2i2/Septembe.42>>.

Islam pada sekolah menemukan peluangnya untuk membangun pendidikan yang berwawasan multikultural.⁸

Pendidikan Agama Islam khususnya di sekolah kemudian harus diarahkan untuk membangun sistem kesadaran yang berpijak kepada kesamaan prinsip penghargaan atas multibudaya (*multiculture*) serta lintas iman (*crossfaith*). Sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk, pendidikan Islam berwawasan multibudaya dan lintas iman sangatlah dibutuhkan terutama untuk membangun karakter positif yang mampu menumbuhkan sikap toleran dan inklusif antar umat beragama.⁹ Peluang lain sebagai konsekuensi penghormatan tersebut, pembangunan pendidikan Islam dalam konteks pembangunan internasional saat ini adalah adanya tuntutan bagi sikap keterbukaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan.¹⁰ Oleh karena itu, sikap keterbukaan terhadap segala bentuk perbedaan budaya dan keyakinan ini tentu saja harus dirumuskan sebagai salah satu paradigma pendidikan Islam yang ditujukan bagi pengembangan pendidikan agama berwawasan multikultural dan kearian lintas keyakinan. Dengan demikian perspektif pembangunan Pendidikan Agama Islam pada sekolah sangat

⁸ Hamlan and H AB Andi Malla, 'Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Inspirasi*, 10.1 (2010), h. 165–74.

⁹ A Gafur, 'Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Silabus Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum. Makalah. Disajikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Pendidikan Karakter Berbasis Masjid.', in *Seminar Dan Lokakarya Pendidikan Karakter Berbasis Masjid*, 2012, h. 1–7.

¹⁰ Agus Zaenul Fitri, 'Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.2 (2013), h. 235–58.

utopis dan agar terwujud secara realisis menempa peserta didik yang masih dalam proses hingga menjadi lulusan sekolah sebagai cikal-bakal manusia Indonesia seutuhnya, pendekatannya harus tercentra pada prinsip universal (holistik) dan terkait satu sama lain secara struktural maupun fungsional (sistemik).¹¹

D. Kebijakan Kemenag dalam Peningkatan Pendidikan Islam

Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2013 telah memasuki usia yang ke -67 sejak lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Pada prinsipnya kementerian ini mempunyai tugas penting yang membawahi semua problematika keagamaan di tanah air ini. Tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 45 tahun 1974 lampiran 14, Bab I Pasal 2 adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

Tugas ini juga merupakan bentuk konkret pengamalan Pancasila; Sila pertama yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pengamalan UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat 2 “Negaraa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemenag mempunyai banyak tugas di antaranya; pelayanan haji, zakat dan wakaf, nikah, talak dan rujuk, pelayanan dakwah (penyuluh agama),

¹¹ A. Fatih Syuhud, ‘Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi’, *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*, 13.1 (2008), h. 1–11.

pendidikan agama dan keagamaan (madrasah dan pesantren), pembinaan ormas keagamaan, dan peradilan agama.

Tugas tersebut merupakan tantangan Kemenag yang sangat berat manakala di tubuh pejabat internal Kemenag sendiri tidak mampu melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas. Terlebih memasuki era globalisasi dan westernisasi sekarang ini. Banyak munculnya aliran sesat, sempalan agama serta beberapa masalah yang berkaitan dengan umat menunjukkan belum efektifnya pembangunan spiritual bangsa, menuntut jawaban

Kemenag harus profesional dengan landasan utama adalah mengamalkan doktrinitas agama. Maraknya tayangan dan media yang bernuansa sensasional dan pornografi menuntut kepekaan Kemenag dalam memelihara nilai serta norma agama. Di antara kementerian yang lain mungkin Kementerian Agama merupakan kementerian yang sangat sensitif. Dikatakan sensitif karena di samping terisi orang-orang yang notabene “bermoral” juga membawa nama “agama”, sehingga orang memandang sebagai lembaga yang suci, tanpa noda atau “dosa”.¹² Tidak disangsikan jika ada kasus korupsi sekecil apa pun di lembaga ini akan terekspos secara besar-besaran di media massa. Sebaliknya sebesar apa pun prestasi lembaga ini justru tidak akan terdengar oleh masyarakat.

Tantangan Kemenag lainnya adalah masalah pendidikan di madrasah dan pembinaan keagamaan pada umumnya. Pendidikan keagamaan yang berada dalam naungan Kemenag

¹² Akmal Mundry, ‘Komitmen Organisasional Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren’, *Pedagogik*, 03.01 (2015), h. 88–105.

secara formal memang telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan adanya SKB tiga menteri, nomor 6 tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 tahun 1975¹³ yang memuat;

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum,
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas,
3. Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu:

- (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama;
- (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
- (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk menjalankan 5 kebijakan tersebut, dalam rencana pelaksanaannya telah ditetapkan dalam 11 program Kementerian Agama, salah satunya yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pendidikan Islam yaitu Program Pendidikan Islam, khususnya untuk menjalankan kebijakan pada no. 3 di atas. Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkat-

¹³Ahmad Zaini Aziz, 'Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah', *EL TARBAWI*, 2015.21-32

kan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis diantaranya adalah ,Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan IslamKeluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:Tersedianya data dan informasi perencanaan, Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan, Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta tersedianya peraturan perundang-undangan, Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum,

Keluaran tersebut akan dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan; pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan tatalaksana; pengelolaan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN, kerumah-tanggaan, perlengkapan dan keprotokolan.¹⁴

¹⁴ Malla, H AB Andi, 'Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Inspirasi*, 10 (2010), 165-74 <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2798/0,24-54>

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah, Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI, Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI, Meningkatnya mutu tata kelola MI,¹⁵ Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA.¹⁶

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan

¹⁵ Syahri, akhmad, 'Pengembangan Madrasah Unggulan Di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Sumurpanggang Margadana Tegal Jawa Tengah', *Al-Wijdân: Journal of Islamic Education Studies*, 2017, h. 5.

¹⁶ Dwi Atmanta and Sudji Munadi, 'Evaluasi Program Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Taman Kanak-Kanak Di LPMP D.I. Yogyakarta', *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 1.2 (2013), h. 141–53.

partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi; peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola pendidikan.¹⁷

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah, Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah, Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan MA, Meningkatkan mutu tata kelola MA, Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah; penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; serta penyediaan safeguarding (monitoring, rakor, evaluasi) bagi BOS pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah, Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan

¹⁷ Mundiri, Akmal, 'Komitmen Organisasional Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren', *Pedagogik*, 03 (2015), h. 1-4.

lainnya; peningkatan kompetensi kepala madrasah; serta penyediaan tunjangan fungsional, profesi dan purna bakti.¹⁸

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam, Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah, Meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Meningkatnya mutu layanan pendidikan PTAI, Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTAI, Meningkatnya mutu tata kelola PTAI, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PTAI, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma'had Aly pada PTAI; penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; penguatan konsorsium ilmu-ilmu keIslaman yang memperkuat pengembangan dan pengkajian ilmu-ilmu keIslaman di PTAI; serta peningkatan mutu tata kelola PTAI.¹⁹

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan

¹⁸ Kata Pengantar, 'Pedoman Pelaksanaan Simposium Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016', *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan*, 2016, h. 1-17.

¹⁹ Suniarti Chalid, 'Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi', in *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 2007, h. 1307-12.

mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam, Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah, Meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI, Keluaran tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan belajar; penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan lainnya.²⁰

Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan meliputi:

- (1) merencanakan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas,
- (2) mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas
- (3) menilai kinerja sumber daya manusia
- (4) memberikan motivasi, dan
- (5) memelihara sumber daya yang berkualitas.

Sejalan dengan langkah yang diambil Nabi Muhammad tersebut, Mujamil Qomar mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia mencakup tujuh komponen, yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai.²¹

²⁰ Suniarti Chalid, 'Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi', in *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 2007, h. 1-8.

²¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 131.

hal ini merupakan proses yang dilakukan suatu lembaga agar memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengemban tanggung jawab sesuai keahliannya. Menurut E. Mulyasa, dalam proses manajemen sumber daya manusia terdapat tujuh komponen yaitu:

- a) Human Resource Planning; merupakan perencanaan SDM yang melibatkan pemenuhan kebutuhan akan personil saat ini dan masa akan datang, dalam konteks ini pimpinan perlu melakukan analisis tujuan pekerjaan syarat-syarat pekerjaan serta ketersediaan personil.
- b) Recruitment adalah upaya pemenuhan personil melalui pencarian yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada rencana SDM yang telah ditentukan. Kemudian dari pendapatan yang diperoleh dalam rekrutmen, dilakukanlah seleksi.
- c) Selection; untuk menentukan personil yang kompeten sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Apabila personil yang dibutuhkan.²²

Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang Qur'ani dan unggul, diperlukan adanya aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Agil Husin al-Munawar bahwa secara normatif, proses aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan yaitu: a. Dimensi Spiritual, yakni iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan alat kontrol psikis

²² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 152.

dan sosial bagi individu dan masyarakat. Pendidikan akhlak dalam Islam tersimpul dalam prinsip “berpegang teguh pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran” berhubungan erat dalam upaya mewujudkan tujuan dasar pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah SWT.²³

E. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi Faktor Penting dalam Kompetisi antar Negara

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam kompetisi antar negara. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Terbatas tentang Peningkatan SDM Indonesia di Kantor Presiden “Setelah pekerjaan besar yaitu infrastruktur telah kita jalankan selama kurang lebih 3,5 tahun ini, kita akan bergeser pada pekerjaan kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia. Karena peningkatan kualitas SDM sangat menentukan sekali dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain,” katanya. “Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah juga harus diperkuat dengan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik,” lanjut Presiden. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya *vocational school*, *vocational training*, politeknik dan juga *link and match* antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan politeknik perlu dilakukan guna mendukung kebutuhan industri. “Meskipun hal ini juga sudah mulai dikerjakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan,” kata Kepala Negara. Oleh

²³Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ed Ahmad Barizi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 188.

karenanya, untuk meningkatkan kualitas SDM ini, Presiden berharap semua pihak dapat bergerak bersama. Mulai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama untuk pendidikan di pondok pesantren. "Juga nantinya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kerja kita yang juga perlu kita *upgrade* dan tentu saja pendidikan vokasional yang ada di SMK-SMK yang memerlukan sarana dan prasarana maupun perubahan mendasar bagi cara-cara pendidikan di lapangannya," ujar Presiden.²⁴

Dalam rapat, Presiden juga menyampaikan saat bertemu dengan sejumlah pemimpin bank umum di Indonesia pagi tadi salah satu hal yang dibahas adalah produk kredit pendidikan. Presiden berharap perbankan di Tanah Air dapat memberikan kredit pendidikan atau yang juga dikenal dengan *student loan* kepada pelajar. Presiden memberikan contoh mengenai *student loan* di Amerika Serikat yang nilai nominal *outstanding* seluruh kredit pendidikan telah melampaui *total outstanding* pinjaman kartu kredit. Untuk kartu kredit di Amerika Serikat, nilainya USD 800 miliar, sedangkan kredit pendidikan mencapai USD 1,3 triliun. "Ini saya kira sebuah contoh yang mungkin harus kita dorong agar kredit pendidikan atau *student loan* betul-betul bisa kita kerjakan di sini. Ini juga salah satu investasi di bidang SDM Indonesia, supaya

²⁴ Rahmawati and Fauzi Amri, 'Perencanaan Strategi Sistem, Teknologi Dan Manajemen Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah Dan Kompetensi Lulusan', in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 2013., h. 21-22

masyarakat semuanya bisa mengakses pendidikan diantaranya melalui kredit pendidikan," pungkask Kepala Negara.²⁵

Beberapa penguatan SDM yang didanai Negara diantaranya

1. Academic Writing dan Short Course

Dalam rangka perencanaan anggaran tahun 2019 untuk penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maupun di kampus PTKIN, maka dengan ini diumumkan beberapa hal terkait hal itu. Semua SK Rektor/ Pimpinan PTKI tentang penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari PTKIN harus diunggah (*upload*) ke portal litapdimas.kemenag.go.id. sebagai salah satu syarat pertimbangan dana penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019. Diperlukan pembaruan atau pendaftaran ulang admin LP2M/P3M untuk operator litapdimas.kemenag.go.id. setiap PTKIN dengan surat tugas Rektor atau lembaga yang diberi wewenang Rektor. Jumlah admin minimal 3 (tiga) orang bagi IAIN/UIN dan 2 (dua) orang untuk STAIN.

Adapun ketentuan admin sesuai dengan petunjuk teknis sebelumnya. Bagi yang belum mempunyai ID peneliti harus mendaftarkan diri ke litapdimas.kemenag.go.id. sesuai jadwal yang ditentukan. Mekanisme pengusulan proposal melalui [litapdimas](http://litapdimas.kemenag.go.id) mengalami perbaikan, demi menjaga kualitas dan mutu proposal penelitian, yaitu dengan menulis secara langsung dalam form litapdimas.kemenag.go.id. (fill in) sesuai

²⁵ Triwiyanto, 'Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2013 <<https://doi.org/10.17977/JIP.V19I2.4208>>., h. 1-5.

ketentuan. Bagi PTKIS segala ketentuan pengajuan proposal mengikuti agenda klaster di Pusat (Direktorat PTKI). Pengusulan proposal akan dimulai terlebih dahulu untuk klaster di pusat, baik penelitian, publikasi ilmiah maupun pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 10-25 Agustus 2018. Untuk pengusulan proposal bagi PTKIN pada 1-15 September 2018 sesuai jadwal.²⁶

Penelitian Dan Pengelolaan HKI, Penelitian Kolaborasi internasional, Penelitian Terapan Global/Internasional, Penelitian Afiriasi Program Pasca Sarjana, *Sabbatical Leave Luar Negeri, Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange), Short Course Overseas Research Methodology, Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam*. Klaster khusus PTKIS, sebagai berikut: Penelitian Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Pengembangan Nasional. Kalau Publikasi ilmiah diantaranya: Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal, Penulis Jurnal Internasional Bereputasi, Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan, Konferensi Internasional dalam negeri, Alih Media/Film Pendek/Video Dokumenter, *Shortcourse Overseas Academic Skill Writing*.

Pengabdian Masyarakat dengan kluster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, Pengabdian kepada masyarakat terintegrasi Nasional, *Short*

²⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta (<http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>, Nomor : 2361/Dj.I.III/PP.04/08/2018) Jakarta, 02 Agustus 2018, h. 3.

Course Pengabdian Berbasis Riset, Short Course Overseas Community Development, Klaster-klaster di PTKIN, sebagai berikut. Penelitian Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional, Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya, semua penelitian di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan penelitian untuk integrasi keilmuan. Semua klaster penelitian dapat mengajukan judul penelitian tentang integrasi keilmuan, sebagai distingsi PTKI dengan PTU. Adapun ketentuan umum dalam pengusulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah sebagai berikut: Pengusul harus mempunyai ID litapdimas, baik ketua ataupun anggota, Pengusul adalah tenaga fungsional, baik dosen, pustakawan, maupun laboran, Peneliti, pengabdian, dan pengelola jurnal harus ber-NIDN dan mempunyai jabatan fungsional. Adapun khusus pustakawan/laboran tidak diharuskan ber-NIDN. Klaster pembinaan/kapasitas tidak diharuskan memiliki jabatan fungsional. Bagi yang mempunyai jabatan fungsional, klaster pembinaan/kapasitas hanya dikhususkan bagi asisten ahli.

Penelitian harus berkelompok, kecuali penelitian pembinaan/kapasitas dan program pascasarjana harus individu. Selain klaster pembinaan/kapasitas, ketua peneliti harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau menjabat sebagai ketua jurusan. Penelitian kolaborasi internasional harus mencantumkan mitra luar negerinya. Penelitian afirmasi

program pascasarjana diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang menempuh program doktoral di PTKI dan sedang proses penulisan disertasi minimal sudah menyelesaikan tiga bab. Khusus pengusul bantuan pengelola jurnal dapat mengusulkan juga untuk penelitian atau pengabdian. Jumlah anggaran atau nominal setiap klaster masih mengacu pada ketentuan petunjuk teknis tahun 2017/2018, kecuali sudah ada petunjuk teknis terbaru setelah surat ini. Tema-tema penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah mengacu pada 15 (lima belas) tema Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).²⁷

2. Program 5000 Doktor MORA Scholarship

Komponen Bantuan Studi S3 Luar negeri meliputi Biaya Program Penguatan Bahasa Asing dan Akademik, Biaya Pendidikan di Luar negeri, serta Biaya Hidup. Detail komponen bantuan adalah sebagai berikut: Biaya Program penguatan bahasa asing dan akademik (*Language and Academic Preparation Course*) di Indonesia; Biaya hidup selama mengikuti program penguatan bahasa asing dan akademik. Biaya ujian IELTS® atau TOEFL® serta ujian bahasa lain sesuai dengan bahasa pada kampus tujuan yang dilaksanakan di Indonesia, Biaya pendaftaran (*admission fee*), Biaya kuliah (*tuition fee*), Biaya hidup (*living cost*) selama melaksanakan studi (*maksimum 4 tahun*), Biaya *settlement (settlement allowance)*, Asuransi kesehatan, Biaya buku (*book allowance*), Biaya tiket pulang pergi (*return airfare*), Biaya visa, Biaya tunjangan keluarga (diberikan mulai tahun kedua selama maksimal 2

²⁷ Susilana R Wahyudin D, 'Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran', *Kurikulum Pembelajaran*, 2011., h. 32.

tahun), Bantuan riset (satu kali), Biaya mengikuti *international conference* sebagai pembicara. Ketentuan mengenai besaran biaya hidup, *settlement*, dan biaya buku diatur dalam SK Dirjen Pendidikan tentang Penetapan Standar Biaya Beasiswa Luar negeri. Biaya bantuan riset dan keikutsertaan sebagai pembicara pada *international conference* disesuaikan dengan proposal pengajuan dan ditetapkan berdasarkan hasil review.²⁸

Ketentuan Umum dalam program ini adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil di PTKI dan Dosen pada Fakultas Agama Islam pada PTU, Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di PTKI, Pegawai Negeri Sipil pada Unit Eselon I Kementerian Agama Pusat, Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil di PTKI dan pada Fakultas Agama Islam pada PTU, Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di PTKI, Alumni S2 Universitas Luar Negeri pada Kajian Islam.²⁹

Program Reguler Bantuan Studi S3 Luar negeri merupakan program bantuan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon penerima bantuan untuk melanjutkan studi S3 di universitas-universitas luar negeri yang berkualitas. Secara umum, program reguler ini memiliki dua tahapan seleksi, yaitu seleksi Tahap I dan seleksi Tahap II. Seleksi tahap I merupakan seleksi administrasi dimana kelengkapan dokumen dari pendaftar akan direview kesesuaian serta keasliannya. Bagi pendaftar yang telah memenuhi syarat administrasi, akan masuk ke dalam seleksi tahap II. Pada tahap

²⁸ Purwati, Heni, 'Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Dosen', *Aksioma*, September (2011), 4 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26877/aks.v2i2/Septembe.42>>3-7

²⁹ H Ahmad and Afan Zaini, 'Urgensi Manajemen Pendidikan Islam', *Jurnal Ummul Qura*, 2015., h. 27.

ini, calon penerima beasiswa akan melalui tes yang terdiri dari penulisan esai, wawancara, tes bahasa, TPA dan *psikotes*. Bagi mereka yang lulus pada seleksi tahap II (sebagai *awardee*), akan diikutsertakan ke dalam program Persiapan Bahasa Asing dan Akademik –*Language and Academic Preparation (LAP) Program*.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing sesuai dengan ketentuan kampus tujuan, mencari calon supervisor, mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* dari universitas yang dituju, dan memiliki keterampilan akademik maupun non-akademik yang memadai untuk melakukan studi di luar negeri, seperti penulisan proposal, pembuatan artikel ilmiah, *critical review*, metodologi riset, *academic network and communication*, serta *cross culture skill*. Pada akhir program ini, *awardee* diharapkan sudah mendapatkan LoA unconditional, memiliki supervisor dan siap untuk berangkat studi. Alur seleksi program reguler diperlihatkan dalam gambar di bawah ini. Program Reguler Bantuan Studi S3 Luar negeri memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada *awardee* untuk dapat memilih universitas tujuan.³⁰

Program Kerjasama untuk Bantuan Studi S3 Luar negeri memiliki beberapa skema, yaitu: *Special Pathways Leading to PhD (SPL-PhD)*, *University of Canberra*, *University of Western Sydney*, *Central Queensland University*, *MoRA-ATN Research and Innovation Scholarship (MoARIS)*, *MoRA-McGill Scholarship on Religion and Society*, *MoRA-Coventry Peace and Social Relations Studies*, *MoRA-France Scholarship on Applied Science and Technology (SAST)*, *MoRA-Leiden Scholarship on Religion and Society*.

³⁰ subdit_akademik@kemenag.go.id, ustus 2017 <http://diktis.kemenag.go.id/penyetaraanijazah/20> ag

F. Penutup

Bangsa Indonesia di tengah percaturan era global sekarang, akan dipengaruhi kemampuan sumber daya manusia Indonesia, terutama yang bercirikan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemantapan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resources. Sumber Daya Manusia (SDM). Demikian juga untuk sebuah lembaga pendidikan. Kapasitas individu yang mampu mengkonstruksi system belajar berkelanjutan dalam rangka mengubah dan mengadaptasi organisasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang sedang berubah.

Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang Qur'ani dan unggul, diperlukan adanya aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an. Dimensi Spiritual, yakni iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Pendidikan akhlak dalam Islam tersimpul dalam prinsip "berpegang teguh pada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran" berhubungan erat dalam upaya mewujudkan tujuan dasar pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah SWT.

Sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk kemajuan semua lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan Islam yang notabene adalah lembaga yang dianggap sempurna oleh masyarakat sebagai lembaga yang menjadikan peserta didiknya memiliki kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

Daftar Pustaka

- Agus Zainul Fitri. *“Organisasi Pembelajar”* Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019.
- Ahmad, H. and Afan Zaini. ‘Urgensi Manajemen Pendidikan Islam’, *Jurnal Ummul Qura*, 2015.
- Atmanta, Dwi, and Sudji Munadi. ‘Evaluasi Program Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Taman Kanak-Kanak Di LPMP D.I. Yogyakarta’, *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 1, 2013.
- Aziz, Ahmad Zaini. ‘Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah’, *EL TARBAWI*, 2015.
- Dharma, Surya. ‘Penilaian Kinerja Guru’, *DEPDIKNAS, Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*, 2008, 49 <<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nOfE7KLUAhVHRY8KHUMAD38QFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fgurupembaharu.com%2Fhome%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2011%2F02%2F22-04-B3-Penilaian-Kinerja-Guru.doc&us>>
- Fitri, Agus Zaenul. ‘Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman*, 8, 2013.
- Fitri, Agus Zainul. ‘Quality Assurance System between the Islamic State University and the State University’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 2016.

- Gafur, A, 'Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Silabus Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum. Makalah. Disajikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Pendidikan Karakter Berbasis Masjid.', in *Seminar Dan Lokakarya Pendidikan Karakter Berbasis Masjid*, 2012.
- Hamlan, and H AB Andi Malla, 'Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Inspirasi*, 10 (2010), 165–74
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ » Republik Indonesia, 'Target Kemendikbud Dalam Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2017', *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2015.
- Malla, H AB Andi, 'Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Inspirasi*, 10 (2010), 165–74 <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2798/0>>
- Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ed Ahmad Barizi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mundiri, Akmal, 'Komitmen Organisasional Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren', *Pedagogik*, 03, 2015.
- Pengantar, Kata, 'Pedoman Pelaksanaan Simposium Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016', *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan*, 2016.
- Purwati, Heni, 'Meningkatkan Kompetensi & Profesionalisme Dosen', *Aksioma*, September (2011), 4 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26877/aks.v2i2/Septembe.42>>

- Rahmawati, and Fauzi Amri, 'Perencanaan Strategi Sistem, Teknologi Dan Manajemen Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah Dan Kompetensi Lulusan', in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 2013.
- Suniarti Chalid, 'Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi', in *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 2007.
- syahri, Akhmad. 'Pengembangan Madrasah Unggulan di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Sumurpanggang Margadana Tegal Jawa Tengah', *AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies*, 2017.
- Syuhud, A Fatih. 'Tantangan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi', *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*, 13, 2008.
- Triwiyanto, 'Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2013 <<https://doi.org/10.17977/JIP.V19I2.4208>>
- Wahyudin D, Susilana R, 'Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran', *Kurikulum Pembelajaran*, 2011.

3

INTEGRASI KEILMUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Muhamad Fatih Rusydi Syadzili

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam sebagai agen peradaban dan perubahan sosial, kehadirannya berada dalam atmosfer modernisasi serta globalisasi yang menuntut pendidikan Islam agar lebih dinamis dan proaktif. Hal ini yang membuat pendidikan Islam terus melakukan inovasi serta gebrakan baru dalam memberikan kontribusi yang signifikan dan transformasi positif. Pendidikan Islam diharapkan terus melakukan perbaikan, supaya kemajuan umat Islam bisa lebih baik dalam tataran intelektual teoritis maupun praktis.

Urgensitas pendidikan Islam bukan hanya terdapat dalam transformasi nilai-nilai moral manusia dari akses negatif globalisasi dan modernisasi, namun pendidikan Islam akan lebih berperan jika mampu melakukan penanaman nilai-nilai moral terhadap tekanan dan himpitan keterbelakangan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya ditengah kecepatan mobilisasi sosial kemasyarakatan.

Hambatan pendidikan Islam dalam perbaikan tataran intelektual yang teoritis dan praktis ada pada pandangan

sebagian besar masyarakat tentang dikotomik ilmu secara substansial (“ilmu agama” dan “ilmu umum”).¹ Jika ditelaah kembali, keterkaitan sains atau ilmu umum dalam kehidupan manusia ternyata mampu membantu dan meringankan beban manusia dalam tatanan peradaban manusia, namun ada sisi negatif yang diberikan oleh sains yakni telah tercipta tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat seperti adanya kehancuran nilai-nilai *humaniy* yang akhirnya muncul kriminalitas, kesenjangan sosial, serta embrioritas dehumanisasi. Hal ini berdampak terhadap perilaku manusia yang menuju ke arah individualisasi (privatisasi agama).²

Dampak negatif yang muncul, diakibatkan ilmu barat condong pada pola ilmu yang sekuler, sehingga pola perilakunya tidak akan bisa lepas dari filsafat materialistis, naturalisme dan eksistensialisme yang amat jauh dari nilai-nilai kespiritualitas, moral serta etika. Berdasar problematika sains tersebut, maka pendidikan (pendidikan Islam) sebagai pendidikan yang *holistic-integratif* dengan landasan *metanarasi-absoluitik* (Al-Qur’an dan Al-Hadits) mencoba menata sistem di atas pondasi keimanan dan kesalehan yang berkaitan langsung dengan Tuhan.³

¹ M.Zainuddin, *UIN: Menuju Integrasi Ilmu dan Agama*, dalam M.Zainuddin (ed.), *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan* (Malang: Bayumedia, 2004), h. 3.

² Peter F. Beyer, *Privatization and the Public Influence of Religion in Global Society*, and see Mike Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity Theory, Culture and Society Special Issue* (Landon: Sage Publications, 1990), h. 93.

³ Rochan Achwan, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, No. 2, 1991, h. 50-65.

B. Paradigma Integrasi Pendidikan Islam

Secara etimologi, integrasi merupakan asal kata dari *integrate (verb)*, *integration (noun)* yang jika kita artikan berarti suatu penggabungan bagian-bagian yang terpisah dalam satu kesatuan. Untuk itu, term *university* yang asal muasalnya dari *union of diversity* maka kata integrasi memiliki semacam kedekatan pemahaman dengan term *university*.

Integrasi Ilmu merupakan perpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam) dengan Ilmu Pengetahuan Umum atau Sains. Untuk menciptakan keterpaduan antara Ilmu Agama dan Sains membutuhkan lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan atas keterpaduan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah suasana pendidikan, kultur akademik, kurikulum, sarana dan prasarana serta profil guru guna mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan. Integrasi, terpadu atau apapun sebutannya tidak hanya bersifat formal, yang hanya mencakup persoalan-persoalan sepele dan artifisial, tetapi integrasi dalam kualitas berbagai komponen sistem penyelenggaraan pendidikan, yang semuanya itu berujung pada terwujudnya kepribadian siswa yang *integrative*.

Integrasi memiliki keterkaitan dengan keilmuan, dalam hal ini Jamison memaparkan tentang integrasi. Bagi Jamison integrasi adalah "*globalization and the revival of traditional knowledge*" yang berarti integrasi merupakan suatu pengembangan paradigma keilmuan yang dalam konteks era teknologi dan informasi butuh yang namanya integrasi.

Ada semacam ketersinambungan antara disiplin keilmuan yang ada dengan kondisi era kekinian, sehingga integrasi sebagai sebuah penggabungan dari serpihan yang

berserakan digabungkan menjadi satu dalam sebuah integrasi keilmuan. Ilmu terapan lama, di sinkronkan dengan era kekinian, maka akan menciptakan keilmuan yang bersifat mutakhir.

Hal ini yang oleh para ilmuwan coba kembangkan, keberadaan integrasi amat memungkinkan menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih dinamis dan kondusif. Sehingga integrasi keilmuan dalam era kini tidak bisa dipungkiri lagi, akan banyak hal yang bisa dihasilkan.

Paradigma keilmuan, budaya, dan seni dalam Islam yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam masih terasa tidak relevan dengan jati diri sebenarnya dari Islam yang berwatak universal dan menjadi rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin). Paradigma ilmu termasuk dalam persoalan budaya dan seni yang dipelihara dan dijadikan acuan baku oleh perguruan tinggi Islam masih sangat konservatif, dengan adanya dikotomi ilmu, yakni ilmu umum versus ilmu agama, atau dikotomi ilmu versus agama.

C. Konsep Integrasi Pendidikan Islam

Ilmu sains dalam pandangan orang cenderung diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat empiris. Positif, terukur dan dapat diuji atau dieksperimentasikan. Sehingga ilmu agama cenderung dipandang sebagai perwakilan dari sesuatu yang bersifat supra ilmiah. Karena ada pelampauan fisik, empiris, dan meta positif didalamnya. Ilmu agama cenderung dianggap sebagai sesuatu ilmu yang bersifat metafisik, metaempiris dan metapositif.

Pendidikan secara global seringkali ditanggapi dengan nada pesimis. Berbagai upaya *recovery* untuk menjawab rasa

pesimistik terus dilakukan, salahsatunya memperbaiki kurikulum sesuai tuntutan masyarakat. Menurut Mastuhu.⁴ hal-hal pokok yang harus diperhatikan antara lain:

1. Kesesuaian dengan visi-misi, orientasi, tujuan, lengkap dengan, kecerdasan komplit yang ingin dikembangkan. Struktur, komposisi, jenis, jenjang, dan jumlah mata pelajaran lengkap dengan bobot isi dan waktu pelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, orientasi dan tujuan yang ingin dicapai menurut level atau tingkat-tingkat kelas.
2. Seiring prinsip otonomitas dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu, maka sebaiknya masing-masing penyelenggara perguruan merencanakan kurikulumnya sendiri sesuai dengan pandangannya, namun harus tetap dalam rambu-rambu kebangsaan, kebernegeraan dan matched dengan tantangan lokal dan global.

Cerminan kurikulum Islami harus memuat prinsip:

- a) Mengandung nilai kesatuan dasar bagi persamaan nilai Islam pada setiap waktu dan tempat;
- b) Mengandung nilai kesatuan kepentingan dalam mengembangkan misi ajaran Islam;
- c) Mengandung materi yang bermuatan pengembangan spiritual, intelektual dan jasmaniah.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, permasalahan aktual pendidikan Islam adalah ketidaksesuaian hasil pendidikan

⁴ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21 (The New Mind Set of Education in The 21sr Century* (Yogyakarta: Safiria Insani, 2003), h. 101.

agama yang diajarkan di lingkungan lembaga pendidikan dengan tuntutan masyarakat pada umumnya. Pendidikan agama hanya berorientasi pada proses transfer pengetahuan-agama dan belum sampai pada pembinaan komitmen moral mereka yang dalam bahasa agama kita sebut, *tammimu makarim al-akhlak*. Orangtua dan masyarakat pada umumnya memposisikan dirinya, lepas dari tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan agama. Inilah permasalahan utama pendidikan agama dan umum di sekolah yaitu terputusnya tiga jaringan yang saling berhubungan dalam pelaksanaan pendidikan agama yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat sebagai suatu kesatuan sistem. Imran Siregar⁵ mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut:

1. Proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama di sekolah diperlakukan sama dengan pelajaran umum.
2. Karakteristik mata pelajaran agama adalah menanamkan nilai-nilai, sikap dan perilaku siswa. Kurikulum yang dibutuhkan adalah memuat materi tentang materi esensial yang berorientasi pada *process base* bukan pada *content base*.
3. Belum terselenggaranya secara optimal koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai tiga unsur yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.

Bertolak dari rumusan UU Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 2003 pasal 339, yang mengisyaratkan bahwa

⁵ Ali M dan Luluk Y. R., *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern; Mencarai ,Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), h. 273.

tujuan pendidikan Indonesia mengarahkan warganya kepada kehidupan yang beragama. Maka sebagai salah satu bentuk realisasi dari UU Sisdiknas tersebut, Integrasi adalah alternatif yang harus di pilih untuk menjadikan pendidikan lebih bersifat menyeluruh (*integral-holistik*). Gagasan integrasi (nilai-nilai Islami dan umum) ini bukanlah sebuah wacana untuk meraih simpatik akademik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dijalankan sebagai pedoman pendidikan yang ada, mengingat pendidikan selama ini dipengaruhi oleh dualisme yang kental antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum/sekuler yang menyebabkan dikotomi ilmu, sebagaimana dipaparkan di atas. Bukti nyata dari kebutuhan adanya panduan dan model integrasi ilmu ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya berbagai seminar nasional berkenaan dengan reintegrasi ilmu, sampai pada kebijakan dari pemerintah, seperti kebijakan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, madrasah mengalami perubahan, sekolah agama menjadi, sekolah umum bercirikan khas Islam.

Sejarah menunjukkan, sudah sejak lama sebelum Istilah Integrasi memposisikan diri dalam memberikan kerangka normatif Nilai-nilai Islami pada pembelajaran. Islamisasi sains tidak lain adalah sebuah reintegrasi ilmu, dalam menangkal ilmu (sekuler) yang disertai isme-isme yang datang dari luar yang belum tentu sesuai dengan peredaran darah dan tarikan nafas yang kita anut, yang akhir-akhir ini dikenal istilah integrasi.

Dengan demikian kehadiran perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengklaim memberi pengajaran pengetahuan universal. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapat-

kan suatu kebenaran. Kebenaran merupakan obyek pengetahuan. Kebenaran yang dimaksud adalah fakta-fakta dan berbagai macam hubungan yang berdiri satu sama lain secara harmoni sebagai subyek dan predikat dalam kaitan logis. Universitas meningkatkan kapasitas manusia dalam

Sebagai hasil kebutuhan tersebut, untuk tingkat Universitas, akademisi ataupun umum misalnya terbit buku Integrasi Ilmu; sebuah rekonstruksi holistik karangan Mulyadi Kertanegara, yang diharapkan menjadi buku dasar untuk UIN walaupun masih bersifat umum. Melacak jejak Tuhan: Tafsir Islami atas Sains karangan Mehdi Golshani yang sekarang menjadi hak paten milik negara. Bahkan secara revolusioner Armahedi Mahzar menerbitkan Revolusi Integralisme Islam: 'Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami', 2004. Inilah beberapa alasan mendasar pentingnya integrasi untuk diterapkan dalam pembelajaran.

Sejalan dengan Edward, Bernard Lewis juga memberikan penilaian yang sama. Dalam bukunya *The Crisis of Islam*, Ia bahkan memaparkan sebuah data secara detail tentang perbandingan pencapaian antara Timur dan Barat, baik dari ekonomi sampai jumlah peneliti dan karya ilmiah yang dihasilkan. Hampir semua Negara Islam dipengaruhi oleh kemiskinan dan tirani. Kedua masalah ini sering dihubungkan, khususnya oleh mereka yang berkepentingan mengalihkan perhatian dari mereka sendiri, ke Amerika- yang pertama kepada dominasi dan eksploitasi ekonomi Amerika, yang sekarang disebut "globalisasi"; yang kedua kepada dukungan Amerika bagi banyak tiran Muslim yang mau mengikuti kehendak mereka.

Kekacauan politik yang terjadi di Negara-negara Islam saat ini tentu akan menjadikan ekonominya semakin kacau dan pada gilirannya menjadikan sains dan teknologinya juga tidak berkembang. Stabilitas politik merupakan syarat utama dalam kemajuan sebuah peradaban. Tanpa adanya stabilitas politik, maka kemajuan dalam sektor apapun tidak mungkin dapat diwujudkan. Stabilitas politik akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor, khususnya ekonomi dan ilmu pengetahuan. Negara-negara berkembang biasanya akan lebih mengutamakan peningkatan ekonomi dibanding mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah yang menjadi alasan mengapa ilmu pengetahuan di Negara berkembang, seperti Indonesia, tidak begitu unggul. Berbeda dengan Negara maju yang telah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, ilmu pengetahuan relatif lebih cepat berkembang.

Problem utama dari realitas tersebut adalah adanya penekanan pada ilmu agama dengan mengesampingkan sains dan teknologi. Penekanan dalam ilmu agama tentu merupakan hal positif. Namun, mengesampingkan pengembangan sains dan teknologi, untuk alasan apapun, bukan hal yang positif. Maka, di sini, dibutuhkan rumusan konseptual tentang epistemologi pendidikan Islam yang integratif sebagaimana yang pernah dikembangkan di era keemasan Islam, yaitu pendidikan Islam yang mendorong kemajuan sains dan peradaban.

D. Strategi Integrasi Pendidikan Islam

Pengembangan pendidikan Islam, secara teoritis sangat terlihat dengan pola pengembangan yang strukturalis, birokratis, kaku dan sentralistik. Keberadaan ini bisa terlihat dari

beberapa kebijakan yang diberikan oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam.

Salah satu isu penting lain mengenai reputasi yang banyak dikaji peneliti adalah perihal manfaat pengukuran reputasi bagi universitas. Perlu diketahui, konseptualisasi dan pengukuran reputasi institusi telah menarik perhatian dalam literatur manajemen dan pemasaran.⁶ Institusi pendidikan tinggi yang mengukur reputasi korporasi mereka dapat menentukan peluang dan potensi reputasi korporasi dan keunggulan bersaing yang lebih baik melawan pesaing.⁷

Sepuluh faktor yang bisa menjadi indikator pengukuran reputasi korporasi di institusi pendidikan tinggi yaitu: daya tarik emosional, perilaku, studi, citizenship dan tanggung jawab sosial, kepemimpinan, kinerja, tempat kerja, persaingan, karir, dan inovasi. Faktor yang dinilai paling penting bagi pelanggan institusi/lembaga pendidikan tinggi yaitu: inovasi, perilaku, kinerja, dan studi. Indikator yang paling tidak penting dari pengukuran reputasi korporasi bagi pelanggan lembaga pendidikan tinggi yaitu: pemimpin yang menarik, tanggung jawab lingkungan, *value for money*, dan kekaguman.

Model pengukuran reputasi korporasi di lembaga pendidikan tinggi dari perspektif pelanggan dapat digunakan

⁶Fombrun, C.J. dan Rindova, V.P., "The road to transparency: reputation management at Royal Dutch Shell", in Schultz, M., Hatch, M.J. and Larsen, H.A. (Eds), *The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 77-96.

⁷Sontaite, M. dan Bakanauskas, A. (2011), "Measurement Model of Corporate Reputation at Higher Education Institutions: Customers' Perspective", *Management of Organizations: Systematic Research*, Vol. 59 No. 5, pp. 1392-1142.

secara praktis sebagai: (i) alat yang membantu untuk mengevaluasi reputasi korporasi dari lembaga pendidikan tinggi, potensi lembaga pendidikan tinggi, dan bidang utama yang perlu diperbaiki; (ii) instrumen untuk pemeriksaan diri dan evaluasi yang lebih dalam; (iii) panduan untuk pembuatan program bagi pengembangan reputasi korporasi dan manajemen di lembaga-lembaga pendidikan tinggi; (iv) cara praktis yang membantu untuk membangun dan mengelola reputasi korporasi dari lembaga pendidikan tinggi; dan (v) topik diskusi ilmiah dan objek penelitian lebih lanjut.

Di lain pihak,⁸ terdapat skala empat dimensi untuk menilai reputasi sekolah berbasis orangtua yaitu: orientasi orangtua, kualitas pembelajaran, lingkungan yang aman, dan pengajar yang baik. Berikutnya, mendesain skala *Reputation Quotient* yang mengandung enam dimensi yaitu: daya tarik emosional, produk dan layanan, visi dan kepemimpinan, lingkungan tempat kerja, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kinerja keuangan. Selanjutnya,⁹ terdapat lima dimensi yang terkandung dalam skala reputasi berbasis pelanggan yaitu: orientasi pelanggan, pemberi kerja yang baik, perusahaan yang kuat secara finansial dan terpercaya, kualitas produk dan layanan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketercapaian lembaga pendidikan Islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan mengantisipasi

⁸ Skallerud, K. (2011), "School reputation and its relation to parents' satisfaction and loyalty", *International Journal of Educational Management*, Vol. 25 No. 7, pp. 671-686.

⁹ Walsh, G., Beatty, S.E. dan Shiu, E.M.K. (2009), "The customer-based corporate reputation scale: replication and short form", *Journal of Business Research*, Vol. 62 No. 10, pp. 924-30.

akan adanya perubahan pasar tenaga kerja. Sedangkan peradaban yang telah diciptakan oleh ilmu agama adalah mampu membangun semangat keberagaman yang tinggi dengan dimensi transendensi-spritiual, dalam artian wujud keberhasilan pendidikan Islam adalah pada pembangunan secara psikis.

Berdasar kondisi tersebut, perlu adanya perwujudan suatu strategi yang lebih bagus. Karena dalam pengembangan suatu lembaga, perlu adanya pengembangan yang mampu membuat pendidikan Islam semakin maju, sebagaimana:

- a. Adanya kemampuan tenaga pendidik yang handal baik dalam pemikiran maupun penelitian
- b. Terdapatnya kemampuan tradisi akademik yang mampu mendorong adanya kewibawaan akademik
- c. Keberadaan manajemen yang bagus serta kokoh yang akan membangun potensi pengembangan kreativitas
- d. Adanya kemampuan antisipatif masa depan yang proaktif

Dengan demikian, tidak akan ada pernyataan bahwa ilmu agama hanyalah penghambat produktivitas pemikiran karena ajaran-ajaran agama telah membatasi umatnya dalam mempercepat kemajuan teknologi. Karena berdasarkan problematika sains pada agama, maka agama akan menjadi candu yang akan merantai manusia.

Kejadian ini seperti menciptakan pendikotomian ilmu, ada ilmu agama dan non agama, biarpun secara historis Islam telah memiliki ilmu sains sejak lama. Namun pendikotomian ini tidak akan menimbulkan masalah yang signifikan dalam sistem pendidikan Islam, sebagaimana pendapat Kartanegara bahwasanya dikotomi antara ilmu agama dengan non agama

telah dikenal dengan ragam karya seperti karya klasik Al-Ghazali dan Ibn Khaldun.¹⁰

E. Prolematika Integrasi Pendidikan Islam

Berkaitan dengan Pendidikan Islam dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia, pengertiannya mencakup dua hal. Pertama, lembaga pendidikan Agama. Kedua, isi atau program pendidikan. Lembaga pendidikan Agama (Islam) yang lazim dikenal masyarakat dan menjadi binaan Kementerian Agama meliputi Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Madrasah, (terdiri dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah Negeri dan swasta), Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah/Sekolah Agama terdiri dari tingkat Awaliyah, Wustha, dan Ulya. Di tingkat Perguruan Tinggi terdapat STAIN, IAIN, UIN dan Fakultas-fakultas atau Akademi Agama yang dikelola masyarakat/pihak swasta¹¹.

Adapun pendidikan agama dalam arti isi atau program adalah merupakan bagian dari Pendidikan Islam, di mana tujuan utamanya ialah membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga ia mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai pengetahuan agama.¹² Dalam sistem pendidikan di Indonesia, istilah pendidikan Islam dibakukan menjadi nama mata pelajaran yang berisikan

¹⁰ Esha Muhammad In'am, *Reaktualisasi Kepemimpinan Klasik di Era Demokrasi Deliberatif* (Fukuyama: Conference Agenda, 2008), h. 19.

¹¹ Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amissco, 1996), h. 36.

¹² Arifin, M, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5.

pengajaran Aqidah, al-Qur'an dan Hadits, Fiqh, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Pendidikan Islam yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pendidikan agama yang diberikan pada lembaga-lembaga formal baik yang menyelenggarakan pengajaran agama Islam maupun yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Pengajaran agama Islam diselenggarakan di sekolah-sekolah umum dengan pendidikan agama Islam sebagai sebuah bidang studi. Adapun pendidikan Islam diselenggarakan pada sekolah-sekolah agama seperti madrasah mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.

Wacana perpaduan antara sains dan Agama di Indonesia sudah lama digaungkan sebagaimana yang tertuang dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 pasal 30 yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan Agama pada semua strata pendidikan sebagai bentuk kesadaran bersama untuk mencapai kualitas hidup yang utuh.

Integrasi sinergis antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan, dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi.¹³

Agama, dalam hal ini Islam sebagai paradigma, saat ini masih sebagai justifikasi atau pembenaran terhadap konsep-

¹³ Turmudi, dkk., *Islam, Sains dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains dan Teknologi Islami Masa Depan* (Malang: UIN Maliki Press, 2006), h. 15.

konsep sains dan belum menjadi paradigma keilmuan yang menyeluruh (holistik). Orientasi dan sistem pendidikan di sekolah antara ilmu Agama dan ilmu umum haruslah diintegrasikan secara terpadu dalam sebuah proses pelarutan, maksudnya antara Agama dan sains dapat disinergikan secara fleksibel, dan link and match.

Integrasi sains dan teknologi dengan Islam dalam konteks sains modern bisa dikatakan sebagai profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu dibarengi atau dibangun dengan pondasi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu Islam dan kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi.

Integrasi Pendidikan Islam dengan sains dan teknologi pada dasarnya merupakan upaya untuk memadukan antara Pendidikan Islam dengan sains dan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan hasil yang dicapai oleh peserta didik. Dengan cara ini maka diharapkan pendidikan agama Islam tidak sekadar sebagai wahana transfer pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga penanaman nilai-nilai keIslamaan yang nantinya mampu diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan

Namun kenyataan pelaksanaan di lapangan masih ditemukan adanya banyak hambatan atau problematika yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut yang tentunya harus diidentifikasi dan terus diupayakan solusi serta jalan keluar agar semua permasalahan yang menjadi hambatan dan

problematika dalam pelaksanaan proses integrasi tersebut dapat segera teratasi. Di antara berbagai problematika yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia umat Islam yang perlu terus ditingkatkan. Berkaitan sumber daya manusia, umat Islam seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar linier sebanding dengan kuantitas jumlahnya. Akan tetapi, dengan kuantitas yang besar, ternyata belum sebanding dengan kualitasnya.
2. Minimnya sarana dan prasarana serta sumber bacaan materi keagamaan terutama yang berkaitan dengan sains. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber bacaan materi keagamaan terutama yang berkaitan dengan sains mengakibatkan pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting, seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas.
3. Sistem, pendekatan, strategi dan metode yang diterapkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam masih belum seluruhnya mengintegrasikan sains dan teknologi.
4. Pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik sejauh ini dianggap masih belum mampu mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan sains dan teknologi seperti terjadinya krisis moral dan krisis sosial yang kini makin menggejala dalam kehidupan masyarakat.

5. Pendidikan Islam belum seluruhnya memiliki kompetensi menjadi guru agama sebagai hasil/produk lembaga pendidikan profesional keguruan.

Perubahan status kelembagaan PTKIN, baik dari STAIN ke IAIN, maupun IAIN ke UIN tentu masih meninggalkan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara cepat, terutama perubahan mindset, budaya akademik dan kinerja.¹⁴

F. Penutup

Ilmu sains dan ilmu agama memiliki dua terma yang berbeda satu sama lain, namun dua terma ini tidak bisa saling ditinggalkan satu sama lain. Dikarenakan ada titik yang bisa diintegrasikan. Walaupun pendikotomian dari keduanya selalu ada

Ilmu sains dan ilmu agama saling terintegrasi di era keemasan Islam, sebagaimana terdapat dua tokoh keilmuan yang ada seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun yang sama-sama mempunyai dua terma keilmuan yang berbeda, namun keduanya bisa saling berdampingan satu sama lain.

Sebagian kecil dari konsep atau teori untuk menjadikan Universitas Islam Negeri menjadi universitas yang unggul. Konsep atau teori saja tentu tidak cukup. Diperlukan kerja keras, upaya terus menerus, berkesinambungan serta bersama-sama dari semua komponen universitas atau yang dikenal *civitas academica* Universitas Islam Negeri yang

¹⁴ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 141.

memiliki banyak sumber daya yang unggul. Tapi sumber daya ini tidak mungkin bisa didayagunakan secara maksimal bila tidak didukung oleh kepemimpinan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Agus Zaenul Fitri. *Organisasi Pembelajaran*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Ali M dan Luluk Y. R. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern; Mencarai, Visi Baru atas, Realitas Baru Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Esha Muhammad In'am. *Reaktualisasi Kepemimpinan Klasik di Era Demokrasi Deliberatif*. Fukuyama: Conference Agenda, 2008.
- Fombrun, C.J. dan Rindova, V.P. "The road to transparency: reputation management at Royal Dutch Shell", in Schultz, M., Hatch, M.J. and Larsen, H.A. (Eds), *The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- M.Zainuddin. *UIN: Menuju Integrasi Ilmu dan Agama, dalam M.Zainuddin (ed.), Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21 (The New Mind Set of Education in The 21sr Century)*. Yogyakarta: Safiria Insani, 2003.

- Peter F. Beyer. *Privatization and the Public Influence of Religion in Global Society, and see Mike Featherstone (ed.), Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity Theory, Culture and Society Special Issue*. Landon: Sage Publications, 1990.
- Rochan Achwan. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1, No. 2 1991.
- Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amissco, 1996.
- Skallerud, K. "School reputation and its relation to parents' satisfaction and loyalty", *International Journal of Educational Management*, Vol. 25 No. 7, 2011.
- Sontaite, M. dan Bakanauskas, A. "Measurement Model of Corporate Reputation at Higher Education Institutions: Customers' Perspective", *Management of Organizations: Systematic Research*, Vol. 59 No. 5, 2011.
- Turmudi, dkk., *Islam, Sains dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains dan Teknologi Islami Masa Depan*. Malang: UIN Maliki Press, 2006.
- Walsh, G. Beatty, S.E. dan Shiu, E.M.K. "The customer-based corporate reputation scale: replication and short form", *Journal of Business Research*, Vol. 62 No. 10, 2009.

4

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Makherus Sholeh

A. Pendahuluan

Seorang pemimpin atau rektor memegang peranan penting dalam pengembangan dan maju tidaknya sebuah lembaga atau kampus yang dipimpinnya. Dengan adanya seorang figur pemimpin yang kapabel akan memiliki dampak yang kuat bagi kemajuan lembaga. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasikan dan memotivasi sumberdaya agar lebih kompeten, mengkoordinasikan perubahan, serta membangun pemberdayaan dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler dalam Fred C. Lunenburg menjelaskan bahwa:

*“the leadership process involves (a) developing a vision for the organization; (b) aligning people with that vision through communication; and (c) motivating people to action through empowerment and through basic need fulfillment. The leadership process creates uncertainty and change in the organization”.*¹

¹Fred C. Lunenburg, Leadership versus Management: A Key Distinction—At Least in Theory, *International Journal of Management, Business, and Administration*, volume 14, number 1, 2011, h. 1

Hasil riset tentang kepemimpinan pendidikan telah banyak dilakukan salah satunya oleh Borko, Wolf, Simone & Uchiyama dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memegang peranan sangat penting dalam mendorong upaya reformasi sekolah.² Tantangan melakukan transformasi dalam sebuah organisasi menjadi lebih berat jika dilakukan secara individual, tanpa memperhatikan keadaan lingkungan internal dan eksternal. Gerakan dalam melakukan transformasi ini setidaknya memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terarah, agar nantinya perubahan yang diinginkan bisa sesuai yang diharapkan. Pemimpin dalam hal ini perlu memberikan motivasi kepada staf untuk melakukan kerja-kerja yang didasari oleh kepentingan bersama. *For achieving the the success in this circumstance, it is required to change the organizational tasks and activities and management way especially leadership of organizations.*³

Peran pemimpin dalam Pendidikan Perguruan Tinggi di Era globalisasi adalah senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu atau kualitas. Maka perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan hasil dari

² Borko, Wolf, Simone & Uchiyama, *Schools in Transition: Reform Efforts and School Capacity in Washington State*, *Educational Evaluation and Policy Analysis* Summer 2003, Vol. 25, No. 2, pp. 171–201

³ Mahmood Ghorbani and Soheylla Yekta, *A Study of Relationship Between Transformational Leadership and Personnel Creativity in Higher Education Centers*, dalam *World Applied Sciences Journal* Volume 17 No 6, 2012, h. 690.

komunikasi dan motivasi ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, pengalaman, lulusan keyakinan dan perilaku luhur serta dalam arti seimbang.⁴ Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan lahir. Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk menggodog kader-kader pemimpin Bangsa memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵

Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik negeri maupun swasta secara kuantitatif dari waktu ke waktu sampai saat ini sungguh luar biasa, terdapat 52 Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) atau 13,3% dan 539 Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) atau 86,7%.⁶ Dari sekian banyaknya lembaga PTAI memiliki problematik antara lain: 1. Relevansi program studi yang dikembangkan dengan masyarakat pendukungnya, 2. Kualitas layanan dan, 3. Kemampuan dan keterampilan *managerial* dan *leadership-nya*.⁷ Tragisnya lagi, bila dihadapkan

⁴ Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 56.

⁵ *Ibid.*, h. 190.

⁶ Rahman El Junusi, Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7 No. 2 November 2015, h. 278.

⁷ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 23.

antara PTKIN dan PTKIS berposisi tidak lebih ibarat pedagang kaki lima (PKL) yang *reot* di depan toko swalayan yang megah.⁸

Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan perguruan tinggi itu tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan; tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan diberlakukannya otonomi kampus; dimana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai; namun terkadang mengabaikan aspek mutu itu sendiri.⁹

Masalah penting yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana manajemen Perguruan Tinggi diatur dalam suatu administrasi yang rapi, efisien dan transparan. Peraturan-peraturan akademik dan administrasi mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati dengan disiplin dan dedikasi semua pihak. Dengan sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa perahu akan melaju kearah yang sudah ditentukan walaupun nakhodanya berganti ditengah perjalanan. Prasarana dan sarana akademik harus diciptakan sebagai landasan berpijak, disamping landasan mutu per-

⁸ Imam Suprayogo. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam* (Malang: UIN Press, 2008), h. 121.

⁹ M. Rosul Asmawi, Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu di Perguruan Tinggi, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Volume, 9, Nomor. 2, Desember 2005, h. 67.

guruan tinggi ini terutama sangat ditentukan oleh peran tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas dan berbobot.¹⁰

Menurut Tampubolon dalam Biner Ambarita Indonesia akan menghadapi tiga tantangan utama yang saling berkaitan, sangat kompleks dan akan dihadapi dalam waktu yang bersamaan, yaitu heterogenitas penduduk Indonesia, tingkat perkembangan masyarakat yang berbeda. Dan pengaruh proses perkembangan sosio-ekonomi.¹¹ Untuk menghadapi kondisi ini, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang tidak saja harus mampu bersanding dengan SDM dari negara-negara lain tetapi juga harus mampu bersaing dengan mereka. Untuk itu, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan, sehingga dalam menjalankan misi utamanya, perguruan tinggi dapat membentuk SDM yang bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi handal yang diperlukan untuk membangun masa depannya serta mampu mengamalkan ilmu, budaya, seni dan teknologi yang dikuasainya.

B. Transformasi SDM di Perguruan Tinggi Islam

Transformasi SDM di lembaga pendidikan dasar Islam dalam merebut posisi papan atas pertama-tama harus difokuskan kepada pemimpin, pendidik/karyawan, peserta didik. Mereka harus senantiasa dibimbing, diarahkan, dibantu, di-

¹⁰ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2005), h. 284.

¹¹ Biner Ambarita, Strategi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Generasi Kampus*, Volume 2, Nomor 1, April 2009, h. 22.

fasilitasi, distimulasi, didorong, dan diberikan pengalaman agar mampu mentransformasikan ke arah yang serba positif, baik menyangkut kecerdasan, pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan, perilaku, akhlak dan sebagainya. Jika kondisi ini sudah menjadi budaya di lembaga pendidikan dasar Islam niscaya lembaga pendidikan dasar Islam mampu bersaing dan merebut posisi papan atas dunia pendidikan nasional maupun internasional.

1. Proses Transformasi pemimpin

Bagi seorang *top-leader* baik Rektor, Dekan, Kepala Sub bagian Kajar dll, upaya dalam mentransformasi harus dilakukan pada diri mereka sendiri. Mereka harus mengintrospeksi atau mengoreksi kelemahan diri sendiri mereka dan selalu berusaha untuk meminta dengan tulus masukan serta mau untuk menerima kritik atau masukan-masukan dari bawahannya, baik dari dosen, tenaga kependidikan/karyawan, maupun dari pihak lain selama masukan/kritik tersebut untuk kebaikan. Kritik dan masukan yang telah dia terima akan dijadikan sebagai dasar dan pijakan untuk melakukan transformasi pada diri mereka sendiri. Selain melakukan outokritik dan menerima saran serta masukan dari bawahan, transformasi manajer pendidikan Islam juga dapat dikondisikan oleh atasannya langsung. Adapun transformasi yang dilakukan manajer antara lain:

- a. Mentransformasikan kecenderungan sektarian menjadi kenderungan profesional.
- b. Mentransformasikan pendekatan politis-ideologis menjadi pendekatan akademik-kultural.

- c. Mentransformasikan sikap memihak kelompok tertentu menjadi meyatukan semua kelompok sebagai satu warga besar.
- d. Mentransformasikan sikap menampilkan diri sebagai pemimpin golongan menjadi sikap menampilkan diri sebagai pemimpin milik semua golongan.
- e. Mentransformasikan kecenderungan membuat faksi-faksi menjadi semangat menjaga keutuhan bawahannya.
- f. Mentransformasikan sikap mempertajam persoalan perbedaan (*khilafah*) menjadi sikap mengalihkan pada persoalan yang setrategis.
- g. Mentransformasikan kebiasaan otoriter menjadi kebiasaan demokratis.
- h. Mentransformasikan kebiasaan pengambilan keputusan otoritatif menjadi kebiasaan pengambilan keputusan partisipatif.
- i. Mentransformasikan sikap diskriminatif menjadi sikap berbagi secara adil.
- j. Mentransformasikan pola-pola kerja birokratis menjadi pola-pola kerja kolegial.
- k. Mentransformasikan kebiasaan memarahi bawahan menjadi kebiasaan memberikan contoh keteladanan.
- l. Mentransformasikan kesukaan mengawasi bawahan menjadi kesukaan memfasilitasi mereka.
- m. Mentransformasikan ketakutan menghadapi resiko menjadi keberanian mengelola resiko.
- n. Mentransformasikan sikap kaku menjadi sikap fleksibel (luwes)

- o. Mentransformasikan sikap mebatasi interaksi menjadi sikap mengembangka interaksi.
- p. Mentransformasikan kebiasaan menunggu instruksi atasan menjadi kebiasaan mencari terobosan baru.¹²

2. Proses transformasi kepribadian pendidik.

Transformasi terhadap para pendidik sangatlah penting karena para pendidik adalah ujung tombak yang turut mengkondisikan keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Maka integritas kepribadian pendidik harus terjamin memiliki sifat, perilaku, sikap dan tindakan yang positif. Pendidik adalah sosok panutan atau model yang akan ditiru oleh peserta didik. Bila kepribadian mereka ternoda, niscaya akan berpengaruh dan berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik.¹³ Sebagai seorang manajer atau rektor harus memiliki kewajiban untuk mengelola pendidik secara maksimal dengan cara mentransformasikan kepribadian pendidik menjadi baik, terutama kepribadian yang terkait dengan tugas-tugas sebagai pendidik.

Oleh karena itu, perhatian manajer atau rektor harus dicurahkan dalam mendesain transformasi kepribadian pendidik, antara lain:

- a. Mentransformasikan kebiasaan sekedar mengajar menjadi kebiasaan yang benar-benar mengajar.
- b. Mentransformasikan sikap tidak peduli terhadap keberadaan peserta didik menjadi sikap menyelami

¹² Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 90-91.

¹³ *Ibid.*, h. 85.

latar belakang dan problem-problem yang dihadapi peserta didik.

- c. Mentransformasikan sikap amatir menjadi sikap professional.
- d. Mentransformasikan kebiasaan tidak peduli terhadap perencanaan pembelajaran menjadi kebiasaan menyiapkan perencanaan pembelajaran.
- e. Mentransformasikan kebiasaan melestarikan pengetahuan menjadi kebiasaan memburu pengetahuan.
- f. Mentransformasikan kebiasaan hanya menyampaikan pengetahuan menjadi kebiasaan menemukan pengetahuan.
- g. Mentransformasikan kebiasaan memproteksi pengetahuan menjadi kebiasaan mengembangkan pengetahuan.
- h. Mentransformasikan keadaan kurang kompeten menjadi sangat menguasai tugas-tugas.
- i. Mentransformasikan kebiasaan berperan mendominasi pengajaran menjadi beralih kebiasaan memerankan peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran.
- j. Mentransformasikan sikap malas mengajar menjadi bersemangat.
- k. Mentransformasikan kebiasaan indiscipliner menjadi sangat disiplin.
- l. Mentransformasikan sikap membebani peserta didik menjadi sikap membantu kesulitan yang dialami peserta didik.
- m. Mentransformasikan kesan menakutkan menjadi kesan kesan menggairahkan semangat belajar peserta didik.

- n. Mentransformasikan sikap membuat jarak dengan peserta didik menjadi sikap yang senantiasa berusaha mendekati peserta didik.
- o. Mentransformasikan sikap monoton selama proses pembelajaran menjadi sikap inovatif.¹⁴

3. Proses transformasi karyawan/tenaga kependidikan.

Sebagaimana kita pahami bahwa di antara yang terkait dalam suatu organisasi, maka personil atau pegawai menjadi unsur yang teramat penting, yang mana personil mempunyai fungsi yang besar, dan itu merupakan fakta yang tak terelakkan.

Tenaga kerja atau karyawan adalah merupakan faktor produksi yang bersifat senantiasa bergerak dan selalu berubah-ubah, mempunyai akal dan perasaan serta motivasi, jika tenaga kerja sebagai faktor produksi merasa senang bekerja dengan penuh semangat dan bergairah, maka dapat dipastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi akan semakin mudah tercapai.

Sebab kebaikan daripada kinerja seorang karyawan salah satunya bisa ditilik dari riwayat pekerjaannya, yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalaman, namun hal tersebut tidak selalu menjamin kinerja yang lebih baik. Sering terjadi bahwa seorang yang belum dapat dikatakan berpengalaman ternyata justru memiliki tingkat kinerja yang lebih baik.

Adapun transformasi itu dikondisikan oleh manajer antara lain:

- a. Mentransformasikan tradisi bekerja asal-asalan menjadi tradisi bekerja dengan target yang jelas.

¹⁴ *Ibid.*, h. 85-86.

- b. Mentransformasikan sikap kebiasaan menunggu perintah atasan menjadi kebiasaan berkreasi dan memiliki inisiatif sendiri.
- c. Mentransformasikan kebiasaan menunggu perintah atasan menjadi kebiasaan berkreasi dan memiliki inisiatif sendiri.
- d. Mentransformasikan kecenderungan ideologis menjadi kecenderungan profesional.
- e. Mentransformasikan kebiasaan banyak berbicara menjadi kebiasaan banyak bekerja.
- f. Mentransformasikan kemampuan bekerja hanya secara individual menjadi kemampuan bekerja secara kolektif dalam *teamwork*.
- g. Mentransformasikan kebiasaan bergantung pada orang lain menjadi kebiasaan mandiri.
- h. Mentransformasikan pola kerja monoton menjadi pola kerja varian-dinamis.
- i. Mentransformasikan kecenderungan pada masa lampau menjadi kecenderungan merespons masa depan.
- j. Mentransformasikan sikap usil terhadap pekerjaan orang lain menjadi sikap bersemangat menangani pekerjaannya sendiri.
- k. Mentransformasikan pola kerja yang boros menjadi pola kerja yang efektif-efisien.
- l. Mentransformasikan respons pasif terhadap pekerjaan yang dihadapi menjadi respons proaktif.
- m. Mentransformasikan sikap kerja yang ceroboh menjadi sikap kerja yang teliti dan cermat.
- n. Mentransformasikan sikap kerja tanpa berpikir menjadi bekerja dengan menggunakan logika kerja.

- o. Mentransformasikan pola hidup konsumtif menjadi hidup produktif.¹⁵

4. Proses transformasi pada peserta didik

Transformasi kearah yang serba positif pertama-tama harus difokuskan kepada peserta didik. Mereka harus senantiasa dibimbing, diarahkan, dibantu, difasilitasi, distimulasi, didorong, dan diberikan pengalaman agar mampu melakukan transformasi kearah yang positif, baik menyangkut kecerdasan, pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan, perilaku, akhlak, dan sebagainya.¹⁶

- a. Mentransformasikan keadaan tidak paham menjadi paham.
- b. Mentransformasi kemampuan daya serap materi yang lambat menjadi cepat.
- c. Mentransformasikan wawasan yang sempit menjadi wawasan yang luas/komprehensif.
- d. Mentransformasikan sikap pasif menjadi inisiatif-kreatif.
- e. Mentransformasikan gaya hidup konsumtif menjadi gaya hidup produktif.
- f. Mentransformasikan sikap bergantung pada orang lain menjadi sikap mandiri.
- g. Mentransformasikan sikap eksklusif menjadi sikap inklusif.
- h. Mentransformasikan sikap fanatik menjadi toleran.
- i. Mentransformasikan sikap malas menjadi sikap rajin.

¹⁵ *Ibid.*, h. 87-88.

¹⁶ *Ibid.*, h. 83.

- j. Mentransformasikan kebiasaan nakal menjadi kebiasaan taat.
- k. Mentransformasikan kondisi minder menjadi percaya diri.
- l. Mentransformasikan kebiasaan indisipliner menjadi kebiasaan disiplin.
- m. Mentransformasikan sikap sulit bergaul menjadi sikap fleksibel dan mampu bergaul.
- n. Mentransformasikan kondisi tidak terampil menjadi terampil.
- o. Mentransformasikan pikiran yang beku menjadi pemikiran kritis.¹⁷

C. Makna Strategi Mutu Perguruan Tinggi Islam

Peraturan-peraturan akademik dan manajemen mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati dengan disiplin dan dedikasi semua pihak. Dengan sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa perahu akan melaju kearah yang sudah ditentukan walaupun nakhodanya berganti ditengah perjalanan.

Strategi itu lazimnya dikaitkan dengan perubahan, sehingga menjadi strategi perubahan. Mengenai strategi mutu pendidikan berarti bagaimana mutu pendidikan itu harus dirubah dengan strategi yang tepat. Mengenai strategi perubahan itu ditujukan agar organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka inilah diperlukan usaha untuk merubah organisasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Indrawijaya mengemukakan bahwa: "Usaha para manajer untuk memperbaiki atau merubah

¹⁷ *Ibid.*, h. 84.

organisasi pada masa yang lampau lebih banyak dipusatkan pada perubahan: (1) subsistem teknologi; (2) subsistem managerial; atau (3) subsistem manusia".¹⁸

Melakukan perubahan itu memang tidak mudah, karena itu perlu disusun perencanaan yang matang, sehingga di hasilkan rencana, program dan kebijakannya secara tepat untuk selanjutnya dilakukan penerapan secara konsisten. Unsur yang dapat dirubah itu tidak selalu seluruhnya dilakukan perubahan; salah satu saja dapat dilakukan berarti telah melakukan perubahan; sebagaimana dijelaskan oleh Robbins bahwa: Strategi cenderung masuk salah satu kategori dari empat kategori yang ada: manusia, struktur, teknologi, dan proses organisasi.¹⁹ Bahwa jika ada kekuatan yang memprakarsai perubahan, ada seseorang yang menerima peran sebagai agen perubahan, dan telah ditetapkan apa yang harus dibuang, maka kita perlu memperhatikan bagaimana melaksanakan perubahan tersebut. Kita mulai melihat dengan langkah-langkah dalam proses perubahan tersebut. Keberhasilan perubahan membutuhkan pencairan (*unfreezing*) status quo, perpindahan (*moving*) ke keadaan yang baru, dan pembekuan kembali (*refreezing*) perubahan tersebut agar menjadi permanen.

Proses perubahan itu membutuhkan langkah-langkah melalui : (1) pencairan (*unfreezing*) status quo, yakni dominasi kekuasaan itu harus dicairkan dengan menerapkan aturan; (2) perpindahan (*moving*) ke keadaan yang baru, yakni adanya estapet kekuasaan sesuai yang telah direncanakan; dan

¹⁸ Adam I. Indrawijaya. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi* (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 28.

¹⁹Stephen Robbins. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi* (Jakarta: Arcan, 1994), h. 428.

(3) pembekuan kembali (refreezing) perubahan tersebut agar menjadi permanen, yakni penetapan dengan keputusan.²⁰

D. Perguruan Tinggi Islam dalam Orientasi Standar Mutu

Dasar hukum standar Pendidikan Tinggi pada Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi dan b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti) SN Dikti Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 menetapkan ada 24 standar penilaian mutu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Standar Penilaian Mutu

Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil PKM
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Penelitian	Standar Pelaksanaan PKM

²⁰ M. Rosul Asmawi, *Strategi Meningkatkan Lulusan*, h. 68.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Standar Saprasi Penelitian	Standar Saprasi PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi didorong agar memiliki empat tujuan, yakni: (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5. *Sistem Penjaminan Mutu*, <http://diktis.kemendiknas.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>, diakses 23 Oktober 2018 pukul 09.57 WIB

Untuk mewujudkan empat tujuan di atas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.²² Dari delapan standar tersebut, maka perguruan tinggi wajib berorientasi dan menerapkan standar mutu yang baik.

1. Standarisasi Kompetensi Lulusan

Pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.²³

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kom-

²² Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, 11, <https://www.adpgmiindonesia.com/docstation/comdocstation/14/permenristekdiktinomor44tahun2015snpt.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2018 pada pukul 10.00 WIB

²³ UU No. 12 tahun 2012 tentang *Sistem Penjaminan Mutu*

petensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.²⁴

Untuk itu, PTAI harus terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan

²⁴Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, 11.

Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi: 1) Standar Capaian Pembelajaran 2) Standar Waktu Penyelesaian Studi 3) Standar Kesesuaian dengan bidang pekerjaan 4) Standar Partisipasi Alumni.

2. Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan PTAI. Kurikulum yang tersusun harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka PTAI memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas kedepannya. Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di PTAI dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Universitas serta kebijakan SPMI PTAI yang mencakup standar: 1. Struktur Kurikulum 2. Standar Pengembangan Kompetensi 3. Standar Pengembangan materi.

3. Standarisasi Proses Pembelajaran

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.²⁵

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Untuk itu, PTI harus terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi:

- a. Aspek Integrasi
- b. Aspek Proses Pembelajaran
- c. Aspek Perencanaan Perkuliahan.

4. Standarisasi Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir

²⁵ *Ibid.*, h. 7-9.

proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi /psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-upload nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs SIAKAD dengan tepat waktu. Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (testee). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: 1) Aspek Integrasi 2) Aspek validitas dan reliabilitas 3) Aspek Peraturan dan Kebijakan 4) Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan.

5. Standarisasi Dosen & Tenaga Pendidikan

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada

pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.²⁶

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.²⁷

Untuk itu, PT harus terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi: 1. Standar recruitment dosen 2. Standar recruitment tenaga kependidikan, 3. Standar beban kerja dosen 4. Standar pembinaan dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar mutasi tenaga kependidikan 6. Standar penilaian kinerja 7. Standar promosi.

6. Standarisasi Sarana dan Prasarana

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan

²⁶ Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, h. 26-31.

²⁷ *Ibid.*, h. 26.

dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri). Pengelolaan prasarana dan sarana di PTI harus bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana. Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis PTI pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan

7. Standarisasi Pengelolaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencana-

kan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.²⁸

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.²⁹

²⁸ UU No. 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2018 pada pukul 10.15 WIB.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan tinggi*

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.³⁰ Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.³¹

8. Standarisasi Pembiayaan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan. Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a. Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- b. Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activitybased costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a)

jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

E. Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Islam

PTKI yang bermutu berarti menjalankan menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai mutu yang jelas, baik mutu *input*, mutu *proses*, mutu *output* maupun *outcomes* yang dapat dijalankan melalui implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan Menurut Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu pendidikan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.³²

Mutu didefinisikan sebagai suatu yang memuaskan dan melampaui keinginan. Konsep ini disebut mutu sesuai persepsi (*quality in perception*).³³ Untuk mengembangkan performen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, perlu menata sistem penjaminan mutu yang handal. Prinsip utama penjaminan mutu diarahkan untuk meningkatkan 8 (delapan) hal pokok, yaitu (1) fokus pada pelanggan (*customer focus*), (2) kepemimpinan (*leadership*), (3) melibatkan semua orang (*involment of people*), (4) pendekatan proses (*process approach*), (5) pendekatan sistem manajemen (*system approach to management*), (6) peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*), (7) pendekatan berdasarkan fakta untuk pengambilan kepu-

³² Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu pendidikan

³³ Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, [Terj.] Ahmad Ali Riyadi (Jogjakarta: Ircisod, 2006), h. 56.

tusan (*factual approach to decision making*), dan (8) hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok (*mutually beneficial supplier relationship*).³⁴

Menurut Brown dan Marshall terdapat empat dimensi mutu dalam pendidikan tinggi, yaitu *accountability, curricular alignment, assessment and student satisfaction*.³⁵ Menurut Igor dan Elena, Sistem jaminan mutu nasional harus melaksanakan:

1. Menetapkan tanggung jawab organisasi dan lembaga yang mengambil bagian dalam proses pendidikan;
2. Evaluasi, baik internal maupun eksternal, program universitas;
3. Sistem akreditasi, sertifikasi dan prosedur lainnya;
4. Bukti evaluasi kerjasama internasional dan program jaringan.³⁶

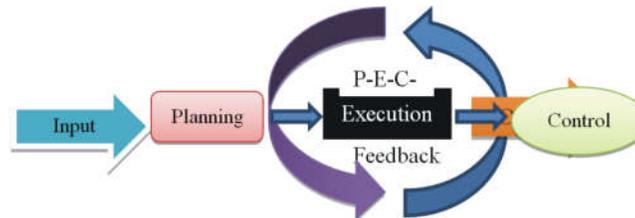
Mutu sangat berkaitan dengan ciri khas yang diberikan dan menunjukkan kesiapan lulusan untuk bekerja sebagaimana diharapkan oleh pelanggan. Di bawah ini merupakan gambaran proses penjaminan mutu akademik di perguruan tinggi.³⁷

³⁴ Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Malang* (Malang: Kantor Jaminan Mutu UIN Malang, 2005), h. 14.

³⁵ Jennifer Field Brown and Bennie L. Marshall, Continuous Quality Improvement: An Effective Strategy For Improvement Of Program Outcomes In A Higher Education Setting, *Nursing Education Perspectives: July-August 2008 - Volume 29 - Issue 4 - p 205-211*

³⁶ V. Petrovskiya Igor dan N. Agapova Elena, Strategies of Raising the Quality of Higher Education and Attaining Equality of Educational Opportunities, *International Journal of Environmental & Science Education*, 2016, VOL. 11, NO. 9, 2519-2537, DOI: 10.12973/ijese.2016.704a

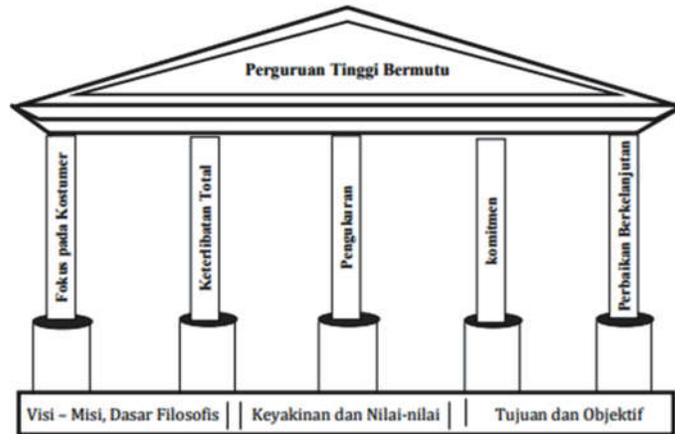
³⁷ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran*, h. 35.



Gambar 2.2 Proses Penjaminan Mutu Pendidikan

Siklus di atas sebetulnya diadopsi dari siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*), yang selanjutnya dikembangkan dengan istilah PECF (*Plan, Execute, Control, Feedback*). Terkait dengan tentang kompetensi lulusan PTKI yang bermutu setidaknya mencakup: 1) pengetahuan dan kemampuan cara berfikir; 2) Keterampilan dasar, misalnya (a) kemampuan berkomunikasi; (b) kemampuan memanfaatkan teknologi informasi; (c) kemampuan belajar mandiri; 3) keterampilan kognitif, misalnya; (a) memahami metodologi riset; (b) kemampuan menganalisis secara tajam dan kritis; 4) keterampilan dalam bidang tertentu yang ditekuni di program studi.

Peningkatan mutu harus dimulai dari sikap mental semua unsur, yakni pimpinan, dosen, staff akademik, karyawan serta siapa saja yang berkecimpung didalam komunitas lembaganya. Mutu digerakkan oleh visi-misi, dasar filosofis lembaga, keyakinan dan nilai-nilai, tujuan dan objektif, yang kesemuanya itu mempengaruhi cara kerja, cultur kerja, serta layanan (*service*) yang diberikan kepada pelanggan. Dari uraian tersebut dapat digambar dengan metafor bangunan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi

Hakikat mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dapat difokuskan beberapa hal berikut: (a) Menciptakan konsistensi tujuan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki layanan akademik dan menjadikan PT sebagai lembaga yang kompetitif dan berkelas dunia. (b) Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif, sehingga seluruh sumberdaya dan pelakunya mesti terus belajar, dilatih keterampilan baru untuk revolusi mutu. Memperbaiki mutu layanan ialah prioritas utama dalam menjaga dan melayani kepada kostumer. (c) Menciptakan budaya mutu. Budaya dipahami sebagai kebiasaan positif dalam menciptakan kinerja para pelakunya. Misalnya rasa tanggung-jawab, kooperatif, jujur, saling membantu/menolong, serta tidak saling curiga dan iri hati. Penciptaan budaya mutu memerlukan waktu dan keteladanan dari semua pihak, dari pimpinan puncak hingga bawahan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:³⁸

1. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
 - a. Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester.
 - b. Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
 - c. Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
 - d. Pemberian beasiswa Tahfidz Qur'an.
 - e. Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 untuk melanjutkan pendidikan S2.
 - f. Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - g. Penyeleksian mahasiswa baru.
 - h. Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.
 - i. Pendirian PTKI baru.
 - j. Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

³⁸DIKTIS, *Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*, dapat dilihat di <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>, diakses pada 10 Oktober 2018 10:15 WIB

2. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
 - a. Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
 - b. Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
 - d. Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.
 - e. Peningkatan mutu akademik PTKIN.
 - f. Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.
 - g. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
 - h. Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
 - i. Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional.
 - j. Mendorong penyelenggaraan enterpreneurship pada beberapa lembaga.
 - k. Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
 - l. Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU
 - m. Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI
 - n. Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
 - o. Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
 - p. Pembinaan bagi kopertais.
 - q. Penguatan kelembagaan LPTK.

3. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:
 - a. Sertifikasi dosen.
 - b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.
 - c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - d. Peningkatan kompetensi dosen.
 - e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
 - f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
 - g. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentasi makalah AICIS.
 - h. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
 - i. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
 - j. Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK
4. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:
 - a. Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
 - b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
 - c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus).
 - d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - e. Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
 - f. Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin.
 - g. Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.

5. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:
 - a. Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan.
 - b. Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No.55/2014).
 - d. Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil 'alamin.³⁹

F. Penutup

Pendidikan berkaitan dengan peningkatan kualitas/mutu, tapi ada juga hukum alam yang tidak dapat ditinggalkan perkembangan kuantitatif akan dibarengi dengan kemunduran kualitas atau antara kuantitatif dan kualitatif itu tidak dapat berjalan seiring. Jika selama 30 tahun lalu tidak mengejar pada perkembangan kuantitatif dan era reformasi akan mengangkat kualitas dengan tetap menjaga kuantitasnya karena pada perkembangan penduduk selalu meningkat terus tanpa

³⁹ DIKTIS, *Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*, dapat dilihat di <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>, diakses pada 10 Oktober 2018 10:15 WIB

disertai jumlah lembaga yang dapat menampungnya, maka akan banyak anak didik yang tidak dapat melanjutkan belajarnya. Sekarang baru terasa kalau kita meningkatkan mutu kualitasnya dan kuantitasnya terasa sangat mudah tetapi kalau mutu kualitas yang ditingkatkan akan terasa sangat sulit sekali dan ibaratnya cukup menantang, sedangkan kualitas itu sendiri bagaimana standarnya. Tentu perlu ada standar kompetensi baik nasional maupun internasional menurut standart perguruan tinggi tersebut. Sebelum zaman orde baru kualitas atau mutu tidak dikedepankan yang utama banyaknya pendaftar ke Perguruan Tinggi Dengan adanya ilmu pengetahuan dapat masuk lewat internet, sehingga memberi pengaruh besar pada dunia pendidikan di Perguruan Tinggi. Di satu sisi mengalami kemajuan, namun di sisi lain juga merasa sedih karena masih adanya kesenjangan antara daerah yang mudah menjangkau dan daerah yang minim informasi, padahal peningkatan pendidikan pada hakekatnya menyangkut kemampuan kita dalam mengelola informasi, maka siapa yang cepat menangkap informasi, maka dialah yang maju untuk segi kualitasnya di Perguruan Tinggi tersebut.

Manajemen strategi yang berwawasan ke depan adalah suatu pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen dalam bisnis yang dimulai dari *implementasi* strategi berdasarkan praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh korporasi yang berwawasan ke depan. Biasanya korporasi yang telah mampu membuktikan keberhasilannya dalam praktek manajemen dijadikan profil yang dapat ditiru oleh beberapa pembuat keputusan bisnis dari dasar-dasar pengambilan keputusan strategi dianalisa dan dipahami untuk dapat dijadikan sebagai titik tolak pembuatan strategi bisnis yang pada akhirnya nanti akan diperoleh

strategi yang bernilai tinggi. Terdapat beberapa pandangan umum tentang mitos yang salah dan bertentangan dengan kenyataan. Mitos itu antara lain menyatakan bahwa untuk memiliki suatu keberhasilan besar harus memerlukan ide besar. Mitos ini dalam kenyataannya tidak demikian. Kadang-kadang tidak benar, karena perkembangan usaha tidak harus dengan ide-ide yang besar pula. Karena membangun usaha dengan ide besar adalah ide yang buruk, sebab apabila di tengah perjalanan dalam kenyataan tidak sama dengan ide-ide yang besar tadi, maka akan menjadi penghambat perkembangan usaha tersebut. Kebanyakan usaha muncul ke permukaan tanpa ide yang besar.

Disamping mitos ide besar terdapat mitos lain adalah di dalam membangun suatu usaha yang besar diperlukan seorang yang karismatik dan berwawasan bersar. Pendapat ini juga keliru karena pemimpin yang karismatik tidak diperlukan, bahkan dianggap mengganggu stabilitas usaha dalam jangka panjang. Kebanyakan pemimpin yang mempunyai misi ke depan adalah orang-orang sederhana dan pemalu yang segan muncul di depan khalayak ramai. Untuk memenuhi arena persaingan agar tercapai tujuan yang dinamis dan berkembang, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain.

Kepuasan pihak yang terlibat antara lain Rektor, Dosen dan Karyawan. Jangkauan ke depan dengan menciptakan peluang melakukan gebrakan bisnis yang ditekuni. Kecepatan dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan gebrakan yang ampuh dan tepat. Kejutan, dengan melakukan peningkatan kemampuan melalui gebrakan dan pembaruan. Menggeser aturan main, dengan melakukan berbagai usaha yang

dinamis. Membuat sinyal dengan mempengaruhi dinamika persaingan masa depan. Melaksanakan kesinambungan dengan melakukan antisipasi interaksi strategis (disesuaikan dengan dunia pendidikan).

Untuk memenangkan salah satu arena persaingan bisnis, misalnya arena per-saingan waktu dan kemampuan dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan beberapa faktor strategi dinamis, yaitu kecepatan dan kejutan dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan gebrakan ampuh serta melaksanakan kesinambungan dengan melakukan antisipasi interaksi strategis. Persaingan pada bisnis pendidikan akan nampak jalan dan sangat perlu diperhatikan apabila sebuah lembaga pendidikan berada di wilayah dimana terdapat banyak lembaga pendidikan. Sebagai contoh di satu wilayah terdapat lembaga pendidikan tingkat SMU dan jumlahnya 8 buah, 4 diantaranya Perguruan Tinggi umum dan 2 jurusan, 2 lagi madrasah aliyah. Walaupun yang sejenis cuma 2 buah Perguruan Tinggi, namun hal ini perlu menganalisa strategi bersaing dalam berebut peluang pasar. Pasar telah terbuka lebar, hanya bagaimana kita memperebutkannya, tentu saja melalui keunggulan bersaing.

Kalau keunggulan bersaing itu tetap dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan, maka tidak tertutup kemungkinan lembaga pendidikan itu akan mampu menjadi pemimpin pasar yang selalu mempertahankan 3 komponen pokok, yaitu: 1) Keampuhan operasional, 2) Kepemimpinan produk, 3) Kedekatan dengan pelanggan.

Daftar Pustaka

- Ambarita, Biner. Strategi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Generasi Kampus*, Volume 2, Nomor 1, April 2009.
- Asmawi, M. Rosul. Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu di Perguruan Tinggi, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Volume, 9, Nomor. 2, Desember 2005.
- Borko, Wolf, Simone & Uchiyama, Schools in Transition: Reform Efforts and School Capacity in Washington State, *Educational Evaluation and Policy Analysis* Summer, Vol. 25, No. 2, 2003.
- Brown, Jennifer Field and Bennie L. Marshall, Continuous Quality Improvement: An Effective Strategy For Improvement Of Program Outcomes In A Higher Education Setting, *Nursing Education Perspectives: July-August 2008 - Volume 29 - Issue 4 - p 205-211*
- DIKTIS. *Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*, <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>,
- El Junusi, Rahman. Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7 Nomor 2 November 2015.
- Fadjar, A. Malik. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2005.
- Fitri, Agus Zaenul. *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.

- Ghorbani, Mahmood and Soheylla Yekta, *A Study of Relationship Between Transformational Leadership and Personnel Creativity in Higher Education Centers*, dalam *World Applied Sciences Journal* Volume 17 No 6, 2012.
- Igor, V. Petrovskiya dan N. Agapova Elena, *Strategies of Raising the Quality of Higher Education and Attaining Equality of Educational Opportunities*, *International Journal of Environmental & Science Education*, 2016, VOL. 11, NO. 9, 2519-2537, DOI: 10.12973/ijese.2016.
- Indrawijaya. Adam I. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Lunenburg, Fred C. *Leadership versus Management: A Key Distinction— At Least in Theory*, *International Journal of Management, Business, and Administration*, volume 14, number 1, 2011.
- Muhaimin. *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Malang*. Malang: Kantor Jaminan Mutu UIN Malang, 2005.
- Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, [https://www.adpgmiindonesia.com/docstation/com_docstation/14/permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 snpt.pdf](https://www.adpgmiindonesia.com/docstation/com_docstation/14/permenristekdikti%20nomor%2044%20tahun%202015%20snpt.pdf)
- Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang penjaminan mutu pendidikan.
- Robbins, Stephen. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan, 1994.

- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*, [Terj.] Ahmad Ali Riyadi. Jogjakarta: Ircisod, 2006.
- Sufyarma. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. Tilaar, H.A.R. 2004.
- Suprayogo, Imam. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UIN Press, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, *. Sistem Penjaminan Mutu*, <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>
- UU No. 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf>

BAB III
MODEL KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TINGGI
ISLAM

1

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI UMUM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Muhammad Arif Syihabuddin

A. Pendahuluan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (dulu Perguruan Tinggi Agama Islam) sejak awal berdirinya didesain sebagai lembaga pendidikan tinggi khusus bidang kajian keagamaan (keislaman). Hal ini dapat dilihat dari penamaan Fakultas, seperti Tarbiyah, Syari'ah, Ushuludin, Dakwah dan sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mulailah dimasukkan jurusan umum terutama di Fakultas Tarbiyah seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dalam rumpun Jurusan Tadris. Di era reformasi dengan mulus dilakukan program integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum untuk menepis adanya dikotomi ilmu dalam tubuh PTKI. Berubahlah IAIN menjadi umum dengan membuka Fakultas umum yang terintegrasi dengan Fakultas ilmu-ilmu keagamaan seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Hukum dan Syari'ah dan lain-lain.

Merujuk pada pernyataan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Agus, menyatakan bahwa perguruan tinggi bisa disebut berkualitas setidaknya jika mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder*, berupa: (1) *social need* (kebutuhan masyarakat); (2) *industrial needs* (kebutuhan industri); dan (3) *professional needs* (kebutuhan profesional).¹

Analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sangatlah diperlukan, mengingat banyaknya perubahan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi hampir diseluruh aspek kehidupan tidak terkecuali dunia pendidikan. Ke-dinamis-an ini mestinya menjadi perhatian utama oleh Lembaga Pendidikan tinggi, terlebih Lembaga Pendidikan tinggi Islam, yang pada saat ini banyak *stakeholder* berharap padanya, dalam mencetak lulusan yang betul-betul berkualitas dan terampil bukan hanya dalam bidang keilmuan umum tetapi juga memiliki dasar keislaman yang kokoh.

Jika kita cermati, sampai saat ini masih banyak persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Lembaga Pendidikan tinggi Islam merupakan Lembaga agama yang mampu mencetak da'i kondang saja, bukan Lembaga akademik yang mampu mencetak ilmuwan. Anggapan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, karena sampai saat ini sebagian besar lulusan Lembaga Pendidikan tinggi Islam lebih banyak berperan sebagai ulama dari pada ilmuwan.² Selain itu, banyak dari masyarakat kita yang menjadikan Lembaga Pendidikan islam sebagai opsi

¹ Agus Zaenul Fitri, Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional, dalam *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, hal. 235-258.

² Imam Suprayogo, *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam* (Malang: UIN Press, 2008), h. 11.

ke dua setelah Lembaga Pendidikan umum. Artinya banyak dari orang tua yang menguliahkan putra-putri mereka ke perguruan tinggi islam, setelah mereka gagal dalam seleksi masuk di perguruan tinggi umum yang favorit. Sehingga ada kesan keterpaksaan dalam memilih perguruan tinggi islam untuk tempat Pendidikan tinggi putra-putri mereka.

Tidak dapat dipungkiri memang kondisi objektif *performance* perguruan tinggi islam pada umumnya masih menjadi problem. Islam yang mengajarkan tentang semangat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran mulia, ternyata dianggap belum mampu memberikan warna bagi sebagian besar Lembaga Pendidikan islam. Sehingga, kesan 'kolot', tidak modern, kurang mampu bersaing, melekat pada Lembaga Pendidikan Islam.³ Dari sini muncul pertanyaan, apakah pada kelanjutannya nanti Lembaga Pendidikan tinggi islam akan mampu bersaing dengan Lembaga Pendidikan tinggi umum dalam mencetak lulusan yang betul-betul berkualitas?

Dengan demikian, dirasa perlu adanya rumusan terkait perencanaan strategik dan transformatif yang berbasis pada pengembangan kelembagaan, akademik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana Pendidikan. Selain itu juga diperlukan pengembangan keilmuan yang integratif, yang nantinya bisa diharapkan menjadi pembeda serta ciri khas pengembangan keilmuan di perguruan tinggi islam. Dalam perumusan perencanaan strategik tersebut jelas penentu kebijakan berperan penting didalamnya, dengan memper-

³ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 151.

hatikan berbagai kebutuhan konsumen pada saat ini. Berangkat dari kegelisahan-kegelisahan diatas, maka fokus pembahasan pada tulisan ini adalah: 1) problematika di perguruan tinggi islam; 2) kebijakan pengembangan prodi umum di perguruan tinggi Islam; dan 3) Analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah.

B. Problematika di Perguruan Tinggi Islam

Sejak awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang kemudian berubah istilah menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam disingkat PTKI (Menyesuaikan dengan pasal 30 UU nomor 12 tahun 2012) telah mengalami dinamika yang sangat kompleks. Perkembangan PTKI sejak awal kemerdekaan hingga kini dihadapkan dengan dua persoalan penting yakni kualitas kelembagaan maupun filsafat keilmuan. Persoalan ini menjadi topik pembahasan yang serius dan terus bergulir di kalangan para ahli pendidikan Islam di tengah maraknya pendirian PTKI baru baik negeri maupun swasta di tanah air. Sampai saat ini jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menunjukkan perkembangan jumlah yang luar biasa. Perkembangan jumlah PTKIS tersebut nampaknya belum diimbangi dengan kualitas baik akademik maupun kelembagaan. Memang diakui ada beberapa PTKIS yang besar dan berkualitas, namun mayoritas masih belum menunjukkan kualitas yang baik. Indikator kualitas PTAI baik negeri maupun swasta dapat dilihat dari peringkat akreditasinya baik yang akreditasi program studi maupun institusinya.

Salah satu persoalan yang ada pada perguruan tinggi islam adalah tentang filsafat keilmuan internal umat islam.

Disini masih terjadi dikotomi ilmu antara ilmu umum dengan ilmu agama, antara Islam dengan Barat. Hal ini (dikotomi) mestinya dapat dihindari karena pada hakikatnya semua ilmu adalah ilmu Islam, kecuali ilmu yang secara jelas bertentangan dengan Islam.⁴ Sejak awal didirikannya perguruan tinggi Islam dibatasi hanya mengkaji ilmu-ilmu agama, sementara kajian bidang ilmu umum menjadi tugas perguruan tinggi umum. Keterpisahan secara diametral antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis-ekonomis berakibat pada rendahnya mutu Pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Ilmu-ilmu secular yang dikembangkan di perguruan tinggi umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di perguruan tinggi agama secara terpisah sedang terjangkit krisis relevansi, artinya belum dapat memecahkan banyak persoalan, mengalami kemandekan dan kebuntuan cenderung tertutup untuk pencarian alternative yang lebih mensejahterakan manusia, serta penuh bias kepentingan baik kepentingan keagamaan, ras, etnis, filosofis, ekonomis, politik, gender maupun peradaban.⁵ Kondisi seperti ini akan memperlebar jarak pemisah dan menyuburkan dikotomi ilmu. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih holistic integralistik atau paling tidak bersifat komplementer.

Jika kita tinjau sebenarnya sejarah kemajuan peradaban umat Islam bukanlah dihasilkan oleh kemajuan ilmu agama,

⁴ Bahrul Hayat dan Muhammad Ali, *Khazanah dan Praksis Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Cendekia, 2012), h. 326.

⁵ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 96.

melainkan oleh ilmu kedokteran, teknologi, astronomi, geologi, fisika, manajemen dan lain sebagainya. Sekalipun ada sumbangan ilmu-ilmu agama seperti fiqih, tauhid dan akhlaq dalam membangun peradaban dunia, tetapi tidak sebesar yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari kenyataan ini, tidak lantas kemudian para pemikir Islam menafikan peran dan fungsi ajaran Islam. Ajaran Islam yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis perlu diyakini. Sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh manusia juga dipandang memiliki kekuatan dalam memajukan peradaban.⁶

Membicarakan kualitas dan filsafat keilmuan pada perguruan tinggi Islam tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri khususnya kebijakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kebijakan pemerintah itu diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang dinamis dan lebih maju. Oleh karena itu berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah yang meliputi kebijakan bidang organisasi, kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, kemahasiswaan, kerjasama, dan sebagainya.

Persoalan selanjutnya adalah tentang kualitas kelembagaan. Persoalan ini menjadi topik pembahasan yang serius dan terus bergulir di kalangan para ahli Pendidikan Islam di tengah maraknya pendirian perguruan tinggi Islam. Perguruan Tinggi Islam sejak awal berdirinya didesain sebagai lembaga pendidikan tinggi khusus bidang kajian keagamaan (keislaman). Hal ini dapat dilihat dari penamaan Fakultas, seperti Tarbiyah, Syari'ah, Ushuludin, Dakwah dan sebagainya. Namun, seiring

⁶ Agus, *Organisasi Pembelajaran*, h. 145.

dengan perkembangan zaman, mulailah dimasukkan jurusan umum terutama di Fakultas Tarbiyah seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dalam rumpun Jurusan Tadris. Berubahlah IAIN menjadi umum dengan membuka Fakultas umum yang terintegrasi dengan Fakultas ilmu-ilmu keagamaan seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Hukum dan Syari'ah dan lain-lain.

Guna memperlancar program integrasi keilmuan tersebut khususnya bagi Perguruan Tinggi Islam, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menata fakultas dan Jurusan/Program Studi tentang Penamaan Perguruan Tinggi Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Sebuah keputusan yang bermaksud menata kelembagaan perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta dan menata nomenklatur yang mencerminkan integrasi keilmuan.

C. Pengembangan Prodi Perguruan Tinggi Islam

Pengembangan prodi pada perguruan tinggi Islam saat ini seakan menjadi sebuah tren. Menurut Agus, pengembangan prodi di perguruan tinggi Islam dapat dilakukan secara luas, prodi yang dipilih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah, ketersediaan tenaga pendidik serta sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya. Jika perguruan tinggi Islam dibolehkan membuka prodi Pendidikan, ekonomi, komunikasi, perbankan syari'ah, tafsir, hadis, Bahasa dan sastra, maka semestinya juga diperkenankan membuka prodi lain seperti pertanian, kelautan, kesehatan dan kedokteran dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaan

perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi islam adalah terletak pada sumber pengembangan ilmu pengetahuannya.⁷

Pengembangan prodi umum di perguruan tinggi islam merupakan perwujudan dari keniscayaan untuk menyiapkan calon-calon sarjana muslim yang memiliki komitmen akademik religius dan professional, serta mampu bersaing. Istilah pengembangan menurut Agus dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan prodi yang ada di suatu perguruan tinggi yang hanya dua atau tiga prodi dapat lebih meluas dan bertambah jumlahnya. Secara kualitatif, bagaimana menjadikan prodi yang ada menjadi lebih baik, bermutu dan lebih maju, selalu berada di depan dalam merespon dan mengantisipasi berbagai tantangan kehidupan.⁸

Berbicara tentang pengembangan sebuah prodi sama halnya mengajak seseorang untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan perubahan sebagai akibat dari keprihatinan terhadap kondisi dan ekstensi prodi yang dikelola, yang diikuti dengan pertumbuhan dan pembaruan atau perbaikan serta ditingkatkan secara terus menerus untuk dibawa kearah yang lebih ideal.⁹

Sudah semestinya dalam pengembangan sebuah kelembagaan diterapkan konsep Pendidikan yang holistik, yaitu sebuah proses Pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pembinaan fisik, pancaindera dan intelektual, melainkan juga penajaman pada ranah intuisi, estetika, moral dan intelektual.

⁷ *Ibid.*, h. 219.

⁸ *Ibid.*, h. 221.

⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 307.

Proyek pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan keagamaan transformatif tidak hanya sekedar berubah, proyek besar reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama mengandung arti dialog dan kerjasama antara disiplin ilmu umum dan agama.¹⁰

Dalam pengembangan perguruan tinggi islam, terdapat dua pilar yang perlu digarap, yaitu: pengembangan fungsionalitas–Etik–Akademik (normativitas transcendental dan historitas-empiris) dan pengembangan fungsionalitas–Etik–Teknologik (rekonstruktif transformatif dan pragmatis).¹¹

Pada pengembangan fungsionalitas – Etik – Akademik menuntu perguruan tinggi islam untuk membuka diri dengan ilmu-ilmu umum yang lebih luas, sehingga kajian agama nantinya tidak hanya pada tataran normatif transcendental keagamaan, tetapi juga menyentuh empiris-historis umat manusia. Model kajian keagamaan seperti ini nantinya menjadikan norma-norma keagamaan tidak lagi bertahta pada tataran idealitas kognitif, akan tetapi juga mengakar pada realitas empiris kehidupan nyata manusia yang senantiasa berkembang sesuai dengan historitas kehidupannya. Dengan model kajian seperti ini pulalah kajian keagamaan akan tetap memberika jawaban atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi manusia itu sendiri, sehingga agama tidak lagi terpinggirkan dengan semakin derasnya rasionalisasi sebagai akibat kian majunya peradaban modern dan post-modern. Menyadari akan pentingnya pemberdayaan agama saat ini,

¹⁰ Abdullah, *Islamic Studies*, h. 399.

¹¹ Amril M., “Pendidikan Tinggi Islam dalam Perspektif Kontemporer” dalam Muhmidayeli, et.al. *Membangun Paradigma Pendidikan Islam* (Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2007), h. 110-117.

maka kajian keilmuan di perguruan tinggi Islam sebagai Lembaga yang paling kompeten mestilah mengikutsertakan ilmu-ilmu umum dalam seluruh kajian keislamannya, sehingga pesan-pesan normatif keislaman tidak lagi dipahami sebatas substantivitas-idealitasnya saja, tetapi dari sisi eksistensialitas-fungsionalitas-empirisnya dalam kehidupan nyata.¹²

Pada pengembangan fungsionalitas–Etik–Teknologik orientasinya tidak hanya pada pengisian lapangan kerja yang dapat dinikmati hasilnya, tetapi mesti diarahkan pada penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Disinggung itu, pengembangan kelembagaan ini seyogyanya dapat menjadi wadah bagi pentransformasian sosial menuju kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini dapat menjadikan perguruan tinggi Islam nantinya sangat antisipatif dan korektif dengan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga eksistensi perguruan tinggi Islam bisa menjadi lebih hidup dan memberi arti bagi pengembangan masyarakat.¹³

Selanjutnya muncul gagasan untuk pengembangan program studi di perguruan tinggi Islam, yaitu gagasan keilmuan yang integrative dan interkonektif. Gagasan ini muncul dari tantangan perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.

Asumsi dasar yang dibangun pada gagasan ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan baik ilmu agama, ilmu sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama saling membutuhkan

¹² Agus, *Organisasi Pembelajaran*, h. 224.

¹³ *Ibid.*, h. 225.

dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia.¹⁴

D. Analisis Kritis terhadap Kebijakan Dirjen Pendis Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁵ Salah satu tugas tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan keagamaan dimulai dari pendidikan anak usia dini (RA) hingga pendidikan tinggi. Tugas dan peran Kementerian Agama menempati posisi yang sangat strategis. Melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Diktis) Kementerian Agama menjalankan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi Islam.¹⁶ Selanjutnya sesuai Pasal 219, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemaha-

¹⁴ *Ibid.*, h. 227-228.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

¹⁶ *Ibid.*

siswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan mutu akademik, ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di-rektorat.

Berdasarkan isi pasal di atas, secara ringkas tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama adalah memajukan pendidikan dengan cara memberikan aturan/norma, membantu, membimbing, memotivasi dan mengawasi jalannya perguruan tinggi islam baik negeri maupun swasta. Semua kegiatan tersebut dituangkan dalam berbagai produk kebijakan seperti Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan berbagai macam surat edaran. Produk-produk kebijakan tersebut disusun berdasarkan perundangan dan peraturan pemerintah yang berlaku di bidang pendidikan antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

4. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
6. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
7. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama

Serta peraturan dan perundangan lain yang terkait termasuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013. SK tersebut bertujuan untuk penertiban proses pendidikan di berbagai program studi yang dianggap tidak sesuai dengan nomenklatur perguruan tinggi.¹⁷ Dengan kata lain SK Dirjen Pendis dimaksudkan untuk mendorong Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta untuk maju dan memiliki epistemologi Islam yang modern.

Beberapa hal yang perlu dicermati dengan analisis kritis terhadap SK Dirjen Pendis nomor 3389 adalah:¹⁸

1. Tentang penamaan fakultas
Penamaan fakultas sebagaimana point III adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

¹⁸ Ibnu Hasan, Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dalam Jurnal *ISLAMADINA*, Vol. XVII, No. 2, Juni, 2016, h. 1-20.

tentang Pendidikan Tinggi khususnya pasal 66 tentang statuta.¹⁹ Kewenangan pemberian nama fakultas dan jurusan adalah kewenangan perguruan tinggi masing-masing (oleh Rektor), sedangkan penamaan Program studi adalah kewenangan pemerintah. Karena itu bila kita melihat realitas di lapangan maka terdapat penamaan fakultas yang beragam. Ada Fakultas Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, atau Fakultas Sastra. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Fakultas Kedokteran, ada pula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Artinya, penamaan fakultas ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan kewenangan Dirjen Dikti Kemendikbud. Dalam pasal 66 UU nomor 12 tersebut dinyatakan bahwa statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri, statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan statuta PTS ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Berdasarkan analisis diatas, maka sebaiknya penamaan fakultas diserahkan kepada rektor melalui mekanisme yang tertuang dalam statuta Perguruan Tinggi Keagamaan masing-masing.

Tentang penyelenggaraan Fakultas dengan pola Integrasi Keilmuan. Banyak paradigma epistemologi baru dalam dunia Pendidikan tinggi Islam, mulai dari paradigma integrasi keilmuan, interkoneksi ilmu, sampai paradigma Islamisasi keilmuan. Dalam kancah modernisasi perguruan tinggi Islam ada istilah mazhab UIN

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Semua paradigma atau mazhab tersebut memiliki kesamaan arah dan tujuan yakni untuk memajukan epistemologi Islam yang modern dan menolak adanya dikotomi keilmuan khususnya ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Gagasan reintegrasi ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu sekuler dilakukan karena pada prinsipnya secara epistemologis semua ilmu itu datang dari Allah melalui ayat Qur'aniyyah dan ayat kauniyyah pada saat yang sama.²⁰ Diperlukan gerakan rapprochement (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) atau gerakan penyatuan atau reintegrasi epistemologi keilmuan adalah suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan untuk mengantisipasi yang serba kompleks pada millenium ketiga serta tanggungjawab kemanusiaan secara global dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagai khalifatullah fi-al-ardh.²¹ Penyelenggaraan Fakultas dengan pola integrasi keilmuan sebagaimana pada butir b nomor (4) penamaan Fakultas dengan mengikuti nomenklatur yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu:

- a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- b. Fakultas Syariah dan Hukum
- c. Fakultas Adab dan Humaniora
- d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

²⁰ Ahmad Kamaruzzaman Bustaman dan Patrick Jory, *Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia* (Malaysia: Yayasan Ilmuan, 2011), h. 45.

²¹ Abdullah, *Islamic Studies*, h. 97.

- e. Fakultas Ushuludin dan Studi Agama
- f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomenklatur yang ditawarkan sebagaimana yang ada di UIN adalah penamaan fakultas yang mengandung dikotomi ilmu pengetahuan. Penamaan tersebut menggambarkan dualism yang digabungkan. Agar tidak terkesan dikotomi, maka nama Fakultas tetap sebagaimana nomenklatur di IAIN dan di Universitas umum seperti Fakultas Tarbiyah dengan program studi ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum. Misalnya Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dan lain-lain. Fakultas Syariah dengan program studi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, dan lain-lain

2. Jika SK Dirjen Pendis nomor 3389 diberlakukan dan mewajibkan yayasan atau badan penyelenggara untuk melaksanakannya dengan akan sangat memberatkan perguruan tinggi swasta terutama yang masih kecil karena terkendala kemampuan dana dan ketersediaan SDM yang terbatas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 3 mengamanatkan bahwa salah satu asas pendidikan tinggi adalah keadilan dan keterjangkauan. Ketentuan minimal jumlah prodi untuk sebuah fakultas dan universitas sebagaimana SK Dirjen Pendis tidak memiliki keterjangkauan bagi kalangan menengah ke bawah. Akan lebih bijak apabila secara bertahap perguruan tinggi Islam swasta diberikan kesempatan mengembangkan diri hingga mencapai jumlah minimal bahkan ideal. Upaya peningkatan kualitas kelembagaan perguruan

tinggi islam swasta dipandang jauh lebih penting dari pada sekedar penataan kelembagaan apalagi penataan dengan beban besar yang kecil kemungkinannya dapat dicapai. Barangkali prinsip *small but beautiful*, kecil tapi cantik/kecil dan berkualitas adalah lebih bermakna daripada besar namun tidak memiliki keunggulan.

Kebijakan Dirjen Pendis nomor 3389 akan menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki standar minimal yang lebih besar wadahnya (organisasinya) namun berpeluang kosong mahasiswa/ peminatnya serta semakin menurun kualitasnya. Hal itu terjadi karena besarnya minimal jumlah prodi yang berdampak besarnya biaya ketimbang keadaan sebelumnya. Secara filosofis, pendidikan tumbuh dari bawah, dari kemampuan penyelenggara lembaga pendidikan itu sendiri. Menambah prodi sangat bergantung kepada kesiapan penyelenggara/ yayasan terutama dengan kesiapan pendanaan dan SDM.²²

Daftar Pustaka

- Abdullah. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bustaman. Ahmad Kamaruzzaman dan Patrick Jory. *“Islamic studies and Islamic education in contemporary Southeast Asia”*. Malaysia: Yayasan Ilmuan, 2011.
- Fitri. Agus Zaenul. Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional, dalam *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013.

²² *Ibid.*

- Fitri. Agus Zaenul. *Organisasi Pembelajar: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Hasan. Ibnu. Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dalam Jurnal *ISLAMADINA*, Vol. XVII, No. 2, Juni, 2016.
- Hayat. Bahrul dan Muhammad Ali. *Khazanah dan Praksis Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2012.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3389 tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- M. Amril, "Pendidikan Tinggi Islam dalam Perspektif Kontemporer" dalam Muhmidayeli, et.al. *Membangun Paradigma Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2007.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Suprayogo. Imam. *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam*. Malang: UIN Press, 2008.
- Tajab. Muh. Sintesa Atas Dikotomi Pendidikan Islam, dalam Jurnal: *Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid"*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

Makherus Sholeh

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 4.708 yang terdiri dari sekolah tinggi 2.538, universitas 586, politeknik 279, akademi 1.064, institute 221 dan akademi komunitas 20.¹ Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia belum diikuti dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi, hal ini ditandai dari rendahnya daya saing perguruan tinggi Indonesia di lingkup internasional.

Perguruan tinggi di era globalisasi ini harus berbasis pada mutu, bagaimana fokus PT dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia telah ditunjukkan dengan menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu: 1) pemerataan dan kesempatan, 2) relevansi pendidikan

¹<https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> diakses pada 20 Desember 2018.

dengan pembangunan, 3) kualitas pendidikan; dan 4) efisiensi pendidikan.²

Menurut Brown dan Marshall terdapat empat dimensi mutu dalam pendidikan tinggi, yaitu *accountability, curricular alignment, assessment and student satisfaction*.³ Menurut Igor dan Elena, Sistem jaminan mutu nasional harus melaksanakan:

1. Menetapkan tanggung jawab organisasi dan lembaga yang mengambil bagian dalam proses pendidikan;
2. Evaluasi, baik internal maupun eksternal, program universitas;
3. Sistem akreditasi, sertifikasi dan prosedur lainnya;
4. Bukti evaluasi kerjasama internasional dan program jaringan.⁴

Namun, secara umum pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan persoalan yang serius berkaitan dengan mutu pendidikan, mulai dari rendahnya mutu masukan (*input*), proses (*process*), sampai dengan mutu lulusan (*output*), dan keluaran (*outcome*) yang dihasilkan.⁵ Untuk meningkat-

² Agus Zaenul Fitri, *Mengurangi GAP Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja*, dalam *Jurnal Edukasi*, Vol. 8. No. 7 September 2015, h. 3.

³ Jennifer Field Brown and Bennie L. Marshall, *Continuous Quality Improvement: An Effective Strategy For Improvement Of Program Outcomes In A Higher Education Setting*, *Nursing Education Perspectives: July-August 2008 - Volume 29 - Issue 4 - p 205-211*

⁴ V. Petrovskiya Igor dan N. Agapova Elena, *Strategies of Raising the Quality of Higher Education and Attaining Equality of Educational Opportunities*, *International Journal of Environmental & Science Education*, 2016, Vol. 11, No. 9, 2519-2537, DOI: 10.12973/ijese.2016.704a

⁵ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mencepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 11.

kan mutu pendidikan bukan hal yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan serta memberdayakan solidaritas anggota organisasi lembaga pendidikan Islam untuk membantu pencarian dana.⁶

Berdasarkan hasil penelitian dari Dwi Prihatin Amrih Rahayuningtyas dan Eka Triana tentang daya saing perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat otonomi dan peringkat yang diperoleh perguruan tinggi sebelumnya. Selain itu faktor lokasi terbukti berdampak signifikan dalam pengungkapan modal intelektual selanjutnya berdampak terhadap peningkatan daya saing PT.⁷

Bila berbicara kualitas dan mutu antara PTKI dan PTU tentu terdapat jarak yang sangat signifikan, walaupun berdasarkan hasil penelitian disalah satu PTKI dan PTU mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan di UIN Malang dipengaruhi oleh kulaitas manajemen dan akademik dengan proporsi yang lebih besar di ITS.⁸ Untuk mengejar kualitas dan mutu, dewasa ini keuangan menjadi hal terpenting dalam organisasi walau tak selamanya mutlak tapi memang wajib

⁶ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 150-151.

⁷ Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas* dan Eka Triana, Modal Intelektual dan Daya Saing Perguruan Tinggi di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Hlm: 153-162 Juli 2017, DOI: 10.18196/jai.180279

⁸ Agus Zaenul Fitri, *Quality Assurance System Beetween The Islamic State University and The Universty and the State University*, dalam *Jurnal Vol 2, No. 2, June 2016*, h. 208.

ada, dikarenakan dalam berjalannya organisasi akan melibatkan banyak kebutuhan yang nantinya berhubungan dengan keuangan dalam mengelola pendidikan tinggi.

Bagi sebagian masyarakat yang rata-rata di bawah garis kemiskinan merasakan pendidikan sangat mahal.⁹ Masih ada ketimpangan antara sesama warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat khususnya untuk melanjutkan paja jenjang perguruan tinggi. Hal ini juga yang menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya walau dengan harga yang sangat mahal.

Perguruan tinggi harusnya menjadiperhatian penting masyarakat. Mengingat mahalnya biaya pendidikan pada perguruan tinggi. Hal ini tak lepas dari mahalnya biaya operasional dalam penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai.¹⁰

Namun pada kenyataanya, isu klasik masih menghantui antara kualitas dengan biaya, tingkat perstisipasi dengan kelangkaan sumberdaya. Oleh karena itu dibutuhkan evolusi dalam kebijakan pembiayaan, yaitu: 1) Alokasi politis/historis,

⁹Bakry, Aminuddin, *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Dalam Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010, h. 78.

¹⁰Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia. Lihat (Depdiknas : 2005), h. 27.

2) Rumusan pembiayaan, 3) pembiayaan yang dikendalikan kebijakan, 4) pembiayaan berbasis kinerja dan 5) pembiayaan kategoris dan kompetitif.¹¹

Tantangan dalam mencapai tujuan SDGs (Sustainable Development Goals - SDGs) di antaranya adalah peningkatan akses ke perguruan tinggi yang terkendala mahal biaya pendidikan tinggi. Dalam menjawab tantangan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5): Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan, dan ayat (6) : Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.¹²

Pengaturan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Program BOPTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi.¹³

Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan Undang-

¹¹ Rahmania Utari, *Pembiayaan Pendidikan Tinggi: Berbagai Tren dan Isu*, Disarikan dari Forest, J.J & Altbach, *Hand Book of Higher Education* (Dordrecht: Springer, 2007), h. 8.

¹² UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹³ Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

Undang Nomor 12 tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% dari BOPTN harus digunakan untuk biaya penelitian.

Fokus pembahasan ini adalah kebijakan pemberian bantuan pendidikan perguruan tinggi negeri dan swasta. Tujuan pembahasan pada makalah ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemberian bantuan pendidikan tinggi negeri dan swasta.

B. Konsep Dasar Kebijakan & Landasan Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi

Menurut Wahab kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Kebijakan pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan Pendidikan merupakan sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.¹⁵

¹⁴Bakry, Aminuddin, *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* dalam Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010, h.10.

¹⁵Ali Muhdi. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), h. 121.

Maka dari itu kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Dalam tulisan ini akan disuguhkan bagaimana kebijakan pemerintah tentang bantuan biaya pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Dewasa ini, kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi juga semakin meningkat. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.¹⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut serta untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan pelayanan minimal, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada perguruan tinggi negeri. Program BOPTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan tinggi yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk biaya

¹⁶Riant D Nugroho. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi* (Jakarta: PT Elex Media Computindo 2000), h. 27.

operasional perguruan tinggi negeri; (2) Bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri;¹⁷

Landasan hukum kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi sebagai berikut:¹⁸

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

¹⁷ RISTEK DIKTI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri*, 2006, h. 1-2 Dapat dilihat di <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Iuknis-BOPTN-2016-final.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2018 08:10 WIB

¹⁸ *Ibid.*, h. 4.

5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
9. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.

C. Manfaat dan Tujuan Kebijakan Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi

Adapun manfaat pemberian bantuan operasional memiliki 2 keuntungan, yang pertama bagi Perguruan Tinggi dan yang kedua bagi masyarakat/orang tua:

1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi
 - b. Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi
 - c. Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi
 - d. Meningkatkan anggaran penelitian
2. Manfaat Bagi Masyarakat / Orang Tua:
 - a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa
 - b. Terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa.

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2, Fungsi pemberian BOPTN dipergunakan sebagai berikut:¹⁹

1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dana BOPT menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melaku-

¹⁹ RISTEK DIKTI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri*, 2006, h. 4 Dapat dilihat di <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Juknis-BOPTN-2016-final.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2018 08:10 WIB

kan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT. Ketentuan pelaksanaan penelitian mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.²⁰

2. Biaya pemeliharaan pengadaan;
Pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi tidak bisa dilakukan seandainya bila diinginkan keberadaanya senantiasa siap dengan kondisi layak pakai untuk digunakan mendukung kegiatan pendidikan tinggi. Dalam kondisi keterbatasan biaya pemeliharaan, maka dana BOPT untuk pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.
3. Penambahan bahan praktikum/kuliah;
Dalam proses pembelajaran banyak dibutuhkan bahan habis pakai, baik untuk kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik.
4. Bahan pustaka;
Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjamin terjaga

²⁰ *Ibid.*, h. 4.

dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu yang dipelajari sivitas akademika.

5. Penjaminan mutu;

Belanja ini bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO dan sertifikasi ISO ke lembaga Sertifikasi. Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi akan sangat membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja.²¹

6. Kegiatan kemahasiswaan;

Dalam meningkatkan layanan organisasi kemahasiswaan masih diperlukan tambahan anggaran, karena banyak kegiatan mahasiswa baik yang berhubungan dengan kepemimpinan maupun yang berhubungan dengan olah raga. Kegiatan ini diperlukan sebagai sarana agar mahasiswa selalu terpacu untuk melakukan aktivitas positif di dalam kampus, sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi.

Dinamika kegiatan kemahasiswaan termasuk kewirausahaan bagi mahasiswa yang begitu beragam sangat penting untuk didorong dan difasilitasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menopang kegiatan kemahasiswaan

²¹ *Ibid.*, h. 5.

pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga BOPT dalam hal ini sangat diharapkan untuk membantu pembiayaan tersebut.²²

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
Kegiatan operasional perguruan tinggi yang sangat padat dengan kegiatan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat, administratif dan kegiatan penunjang lainnya memerlukan dukungan sumber daya listrik yang sangat besar. Demikian pula kebutuhan akses informasi pengetahuan sivitas akademika secara *real time* melalui internet dengan kapasitas dan kecepatan yang memadai sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Langganan internet perlu diberikan bantuan karena banyak mahasiswa yang memerlukan informasi guna menunjang kegiatan belajar dalam hal mengerjakan tugas-tugas kuliah dan dalam menyelesaikan proyek akhirnya.
8. Pelaksanaan kegiatan penunjang;
Kegiatan-kegiatan lain yang sangat beragam dalam perguruan tinggi seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain memainkan peranan sangat penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang memuaskan.
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan software dan sistem jaringan, materi

²² *Ibid.*, h. 5-6.

pembelajaran (*handout*, modul, animasi, audio visual) dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, *teleconference*)

10. Honor dosen dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil;
Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan tinggi, keberadaan pegawai sangat sentral. Jumlah pegawai perguruan tinggi baik yang sudah BLU maupun yang masih PTN sangat besar terutama dengan status honorer, karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah pegawai honorer membawa implikasi membengkaknya biaya gaji.
11. Pengadaan dosen tamu;
Dalam meningkatkan mutu jurusan/program studi khususnya masalah kuliah tamu untuk dosen dan mahasiswa dapat dialokasikan untuk diberikan bantuan biaya, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan *update* pengetahuan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari pengetahuan yang ada di perguruan tinggi
12. Pengadaan sarana dan prasarana sederhana;
Belanja ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan kriteria:
 - 1) Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai maksimum Rp5.000.000.000,- per unit, maksimum 2 unit;
 - 2) Rehabilitasi atau pemeliharaan gedung dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per paket, maksimum 2 paket;

- 3) Perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 5.000.000.000,-
 - 4) Pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 2.500.000.000,-
 - 5) Untuk PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp 50.000.000.000,- maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% dari Total Nilai BOPTN
 - 6) Untuk PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 50.000.000.000,-, tetapi lebih kecil Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15 % dari Total Nilai BOPTN
 - 7) Untuk PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% dari Total Nilai BOPTN
13. Pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri; dan/atau
 14. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis perguruan tinggi masing-masing.

Bantuan BOPTN tidak dipergunakan untuk: 1) belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar; 2) tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; 3) tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil; dan 4) kebutuhan operasional untuk manajemen.

Tujuan pemberian dana bantuan biaya pendidikan tinggi sebagai berikut:²³

²³ *Ibid.*, h. 3.

- 1) Tujuan pemberian BOPTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai SPM. Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, menjaga agar SPP (*tuition*) perguruan tinggi tidak naik, dan BOPTN ini dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akan biaya operasional perguruan tinggi.
- 2) Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab BOPTN dalam mengelola dana BOPTN secara tepat guna.

Restrukturisasi tujuan bantuan biaya pendidikan tinggi ini akan dilanjutkan dengan pengembangan sarpras dan pemerataan pendidikan pada umumnya.

D. Implementasi Kebijakan Strategis Bantuan Pendidikan Tinggi Negeri

Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program pembangunan pendidikan dan sarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap

pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam pelaksanaannya bantuan pendidikan tinggi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara atau pemberi bantuan pendidikan tinggi, sebagai berikut:²⁴

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerima alokasi dana BOPTN pada APBN;
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menentukan alokasi dana BOPTN Satker berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
3. Perguruan tinggi menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BO-PTN dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-K/L;
5. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa TOR dan RAB atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-K/L dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran;
8. Dalam hal penelaahan RKA-K/L dengan Direktorat Jenderal Anggaran:
 - a. Apabila RKA-K/L disetujui maka ditetapkan menjadi DIPA;
 - b. Apabila RKA-K/L tidak disetujui, maka perguruan tinggi melakukan perbaikan RKA-K/L sesuai reko-

²⁴ *Ibid.*, h. 7.

- mendasi Direktorat Jenderal Anggaran. Setelah melakukan perbaikan RKA-K/L, perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-K/L hasil perbaikan dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Perguruan tinggi menggunakan dana BO-PTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
 10. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per output.

E. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:²⁵

1. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
 - a. Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, *on-going* 2 semester dan *on-going* 1 semester.

²⁵ DIKTIS, *Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*, dapat dilihat di <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>, diakses pada 10 Oktober 2018 10:15 WIB

- b. Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
 - c. Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
 - d. Pemberian beasiswa Tahfidz Qur'an.
 - e. Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 untuk melanjutkan pendidikan S2.
 - f. Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - g. Penyeleksian mahasiswa baru.
 - h. Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.
 - i. Pendirian PTKI baru.
 - j. Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.
2. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
- a. Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
 - b. Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
 - d. Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.
 - e. Peningkatan mutu akademik PTKIN.
 - f. Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.
 - g. Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
 - h. Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
 - i. Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional.

- j. Mendorong penyelenggaraan enterpreneurship pada beberapa lembaga.
 - k. Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
 - l. Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU
 - m. Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI
 - n. Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
 - o. Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
 - p. Pembinaan bagi kopertais.
 - q. Penguatan kelembagaan LPTK.
3. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:
- a. Sertifikasi dosen.
 - b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.
 - c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - d. Peningkatan kompetensi dosen.
 - e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
 - f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
 - g. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentasi makalah AICIS.
 - h. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
 - i. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
 - j. Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK

4. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:
 - a. Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
 - b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
 - c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus).
 - d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - e. Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
 - f. Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil 'alamin.
 - g. Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.²⁶
5. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:
 - a. Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan.
 - b. Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No.55/2014).

²⁶ *Ibid.*

- d. Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.

F. Penutup

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau kemandirian, baik secara akademik dan non akademik.

Jika otonomi Perguruan Tinggi merupakan kodrat perguruan tinggi, maka Negara bertanggungjawab melindungi dan menjamin kodrat tersebut melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan, antara lain adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum merupakan amanat dari Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme Pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs)

tersebut, di antaranya adalah peningkatan akses ke perguruan tinggi yang terkendala mahalny biaya pendidikan tinggi. Dalam menjawab tantangan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5): Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan, dan ayat (6): Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

Dengan berpedoman pada *Critical Theory*, *Poverty Theory* dan *Democracy Theory* kebijakan pendidikan yang strategis diusung untuk membentuk pemerataan akses dan persamaan hak dalam memperoleh pendidikan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Harus disadari bahwa reformasi finansial yang akan menyebabkan kenaikan SPP atau pun biaya pendidikan akan menghadapi protes yang keras dari kelompok mahasiswa yang menganut paradigma “pendidikan murah untuk semua”. Tetapi Universitas harus terus menyadarkan masyarakat kampus bahwa masa-masa emas pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah sudah berada di ujung perjalanan dan masyarakat harus mau berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Kalau langkah tidak populer ini tiudak berani kita lakukan, perguruan tinggi Indonesia akan meluncur cepat menuju jurang kehancuran.

Daftar Pustaka

- Bakry, Aminuddin. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* dalam Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Bakry, Aminuddin. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Dalam Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Brown, Jennifer Field and Bennie L. Marshall. Continuous Quality Improvement: An Effective Strategy For Improvement Of Program Outcomes In A Higher Education Setting, *Nursing Education Perspectives: July-August 2008 - Volume 29 - Issue 4 - p 205-211*
- Fitri, Agus Zaenul. *Mengurangi GAP Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja; Upaya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia*, dalam Jurnal *Edukasi*, Vol. 8. No. 7 September 2015, 3
- Fitri, Agus Zaenul. *Organisasi Pembelajaran: Strategi Membedayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Fitri, Agus Zaenul. *Quality Assurance System Beetween The Islamic State University and The Universty and the State University*, dalam Jurnal Vol 2, No. 2, June 2016. <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> diakses pada 20 Desember 2018.
- Igor V. Petrovskiya dan N. Agapova Elena, *Strategies of Raising the Quality of Higher Education and Attaining Equality of Educational Opportunities*, *International Journal of Environmental & Science*

Education, 2016, VOL. 11, NO. 9, 2519-2537, DOI: 10.12973/ijese.2016.704a

- Muhdi. Ali. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Nugroho. Riant D. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : PT Elex Media Computindo 2000.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rahayuningtyas, Dwi Prihatni Amrih dan Eka Triana. Modal Intelektual dan Daya Saing Perguruan Tinggi di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Hlm: 153-162 Juli 2017, DOI: 10.18196/jai.180279
- RISTEK DIKTI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri*, 2006. Dapat dilihat di <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Juknis-BOPTN-2016-final.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2018 08:10 WIB
- Utari, Rahmania. *Pembiayaan Pendidikan Tinggi: Berbagai Tren dan Issu*, Disarikan dari Forest, J.J & Altbach, *Hand Book of Higher Education*. Dordrecht: Springer, 2007.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3

KEBIJAKAN PENGGABUNGAN (MERGER) FAKULTAS PADA PTKIN

Didin Sirojudin

A. Pendahuluan

Semenjak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan, hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional. Bangsa Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan

yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam perkembangannya pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan persoalan yang serius berkaitan dengan mutu pendidikan mulai dari rendahnya mutu masukan (*input*) proses (*proses*) sampai dengan mutu lulusan (*output*) dan keluaran (*outcome*) yang dihasilkan.²

Untuk itu Pendidikan merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus di memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan ukuran dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi, demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan dan perubahan masyarakat adat istiadat kebudayaan dan lain sebagainya.³

Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari pemerintahan colonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuk-

¹ UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penjelasannya (Surabaya: Karya Utama. 2010), h. 2.

² Agus Zaenul Firti, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 11.

³ M. Shabir, *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Pada Pendidikan Islam*, Jurnal: Lentera Pendidikan, Vol.16 No.2 Desember 2013. h. 167.

nya orde baru terkesan “menganaktirikan, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam, karena Indonesia bukanlah negara Islam, namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB II, pasal 3 yang berbunyi “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan, yang menjadi tugas kementerian Agama Republik Indonesia maka kementerian agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu 5 tahun ke depan, sasaran strategis kementerian agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, sesuai tugas dan fungsinya, Kementrian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang Pendidikan.

⁴ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokus Media, 2006), h. 5-6.

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama bidang Pendidikan 2015 - 2019 adalah:⁵

1. Meningkatkan akses mutu pendidikan anak usia dini
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar menengah wajib belajar 12 tahun yang meliputi:
 - a. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas
 - c. Meningkatkan mutu peserta didik
 - d. Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan
 - e. Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya
 - f. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan
3. Meningkatkan akses mutu dan relevansi pendidikan tinggi keramat keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan
 - b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan
 - c. Meningkatkan mutu desain dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan
 - d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan
4. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - a. peningkatan akses pendidikan keagamaan

⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA-RI) nomor 39 tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2015 -2019.

- b. peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan
 - c. peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan
 - d. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan
 - e. peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan
 - f. meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada ke pendidikan keagamaan
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
 - a. peningkatan mutu & pemerataan guru pendidikan agama
 - b. peningkatan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama
 - c. peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama menang
 6. meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya
 - a. penguatan struktur dan tata organisasi pengelolaan pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis dan jalur pendidikan
 - b. penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian kajian kebijakan pengembangan norma standar prosedur dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif
 - c. penguatan penyusunan dan penjelasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata perikeadilan dan bermutu.

- d. penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
- e. peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga mengumpulkan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik
- f. menyelaraskan peraturan yang kemungkinan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- g. penguatan kapasitas pengelolaan pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel
- h. peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional indonesia dan arah kebijakan tertentu kementerian agama di bidang Pendidikan tahun 2015 - 2019 terkait peningkatan akses dan mutu mutu pendidikan, meningkatkan tata kelola pendidikan agama yang diarahkan untuk penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis jenjang serta memperbaiki efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan maka

pembahasan tulisan ini akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana kebijakan merger atau penggabungan fakultas di PTKIN.

B. Kebijakan Penggabungan (*merger*) Fakultas di PTKIN

Kata kebijakan ialah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*, dalam kamus besar bahasa Indonesia bijak, berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap petah lidah.⁶ adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita tujuan prinsip atau maksud dengan garis pedoman untuk mencapai sasaran garis haluan,⁷ dalam bahasa Inggris kebijakan diartikan sebagai *policy* atau berarti *plannation* (rencana kegiatan) atau *statemen of aim* (pernyataan yang diarahkan).⁸

Thomas Dye memberi batasan atas kebijakan sebagai apa yang hendak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah.⁹ Richar Hofbert mendefinisikan sebagai produk-produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh yang dapat mengidentifikasi diri dengan cita-cita masyarakat.¹⁰

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga cetakan 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 184.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008) h. 19.

⁸ Oxford University *Pocket Dictionary* edisi II Cet.V (Oxford University Press 1995) h. 319.

⁹ Thomas Dye *understanding public policy* (new jersey, 1978), h. 3.

¹⁰ Richad I. Hofferbert *the study of public policy* (Indianapolis, 1974) h. 4.

Sedangkan andreson sebagaimana dikutip imron berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.¹¹

Budiardjo mengemukakan bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang perilaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan tujuan dan cara-cara untuk mencapai yang tujuan tersebut.¹²

Dalam kamus hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar sana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya pernyataan cita-cita tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam rangka mencapai sasaran atau garis haluan.¹³

Dalam *ensiklopedi politika* kebijakan disebut dengan istilah kebijaksanaan yang dalam bahasa inggris juga disebut dengan *publik policy, policy* atau *beleid*. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh orang perilaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada umumnya pihak yang membuat kebijaksanaan tersebut sekaligus mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁴

¹¹ Ali Imron *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: proses, produk dan masa depannya* Ed.1, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 13.

¹² *Ibid.*, h. 14.

¹³ Sudarsono *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 75.

¹⁴ Cheppy Hari Cahyono Dan Suparlan Al Hakim *Ensiklopedi Politika* (Surabaya: Usaha Nasional 1982), h. 170.

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan sebagai suatu tinjauan pengertian itu dapat digunakan baik dari sudut proses pelaksanaan produk maupun dari sudut seni yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang mestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu mengikat siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut.

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling mempengaruhi aktivitas masyarakat pemerintah tentang interaksi dengan masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu untuk menyusun kebijakan umum apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan dasar islam turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat dalam bidang pendidikan dasar Islam.

aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dual halo pertama sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai yang menyangkut intern pemerintahan maupun yang menyangkut masyarakat umum kedua pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumber daya sebagai pelaksana kebijakan membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan menu senyum menyusun rencana detil kegiatan pengorganisasian pelaksanaan dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan.¹⁵

¹⁵ Aa'ad Muzamil "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan dari orde lama sampai orde baru (suatu tinjauan historis) dalam Potensial. jurnal Kependidikan Islam vol. 2 desember 2016, h. 185-186.

Disamping itu aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan juga mencakup dua hal pertama pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan dan siapa saja yang memetik pemanfaatan dari kebijakan kedua hasil program atau kebijakan dalam arti apa dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian.¹⁶

kemudian apabila term kebijakan dikaitkan dengan pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (*educational policy*). pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Imron dari carter V Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atau sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga dapat tercapai.¹⁷

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi politik pertahanan agama dan sebagainya dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan dalam pendidikan merupakan sumpit sistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan.

C. Aturan Perundang-Undangan Merger di Fakultas

Secara eksplisit aturan Merger tersirat dalam:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang

¹⁶ *Ibid.*, h. 186.

¹⁷ Ali Imron, *Kebijaksanaan*, h. 18.

Pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan tinggi swasta, Pada BAB V tentang Pembukaan Dan Penutupan Program Studi.

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA-RI) Nomor 394 tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Menteri Agama Republik Indonesia, Pada BAB V tentang peralihan terdapat pada:
 - a. Pasal 6 yang berbunyi, "Perubahan, penggabungan dan pemekaran Fakultas pada perguruan tinggi agama negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menangani bidang pendayagunaan aparatur Negara"
 - b. Pasal 7 yang berbunyi, "Perubahan, penggabungan dan pemekaran Fakultas pada Perguruan Tinggi Agama Swasta diterepkan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Swasta sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Menteri".

Fakultas atau juga program Studi seharusnya di bubarkan atau digabungkan (*merger*) kalau tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikkti No 50 tahun 2015 Bab V pasal 23 tentang Syarat pembukaan program Studi

- (1) Pembukaan Program Studi pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis PTN/PTS yang bersangkutan;
 - b. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi:
 1. pada program diploma dan program sarjana dengan kualifikasi:
 1. Paling rendah berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
 2. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
 3. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
 4. Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
 5. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN/PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa;

6. Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

D. Analisis kritis Kebijakan Penggabungan (*merger*) Fakultas di PTKIN

Perguruan Tinggi Islam menghadapi tantangan yang sangat besar pada era kontemporer ini. Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah:

- a. Perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global),
- b. Perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan),
- c. Perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.¹⁸

UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa: Empat pilar pendidikan:

¹⁸Machasin, dkk., Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis *Balanced Scorecard*, dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 2, November 2011, h. 484.

1. Learning to know
2. *Learning to do* yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan, dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal
3. *Learning to live together (with others)*, dan
4. *Learning to be*, serta; belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*).

Perubahan-perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai:

1. Lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan,
2. Pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja
3. Lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan
4. Pelaku, sarana dan wahana kerjasama Internasional.

Namun di sisi lain, sebuah realitas yang sulit dipungkiri bahwa hampir di setiap Perguruan Tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, fakultas atau jurusan contoh Ushuluddin selalu merupakan fakultas atau jurusan yang memiliki jumlah mahasiswa terkecil dibandingkan fakultas atau jurusan yang lainnya. Terkecil dari segi kuantitasnya, walau dalam beberapa kasus tidak mesti terkecil dari segi kualitasnya. Kualitas sebuah fakultas atau program studi tidak bisa dilepaskan dari kualitas alumninya dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang penataan kelembagaan perguruan tinggi, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengikuti norma dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai institusi regulator di bidang pendidikan tinggi islam yang tercantum dalam keputusan menteri agama republik indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang rencana strategis kementerian agama tahun 2015 -2019

Tiga prinsip utama dalam keputusan menteri agama diatas:

1. *Nation Competitiveness* (daya saing bangsa),
2. *Autonomy* (otonomi), dan
3. *Organization Health* (kesehatan organisasi),

Ketiga perinsip tersebut harus menjadi dasar pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, termasuk pengembangan yang mendasari penggabungan (*merger*) Fakultas hampir di sebagian besar PTKIN, sudah dilakukan.

Daya Saing Bangsa (*nation competitiveness*) Kualitas dan relevansi merupakan dua aspek pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung pada peningkatan daya saing bangsa dalam bidang SDM.¹⁹

Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi merupakan pekerjaan yang kompleks, karena menyangkut banyak faktor seperti kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas sarana dan fasilitas pendidikan, sistem pengelolaan pendanaan dan suasana akademik yang tercipta di dalam perguruan tinggi masing-masing. Untuk mempercepat

¹⁹ Mohammad Hudaeri: *Revitalisasi dan Pemberdayaan Fakultas Uhsuluddin 100* | Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.1, Juni 2014.

peningkatan kedua aspek tersebut, perguruan tinggi dapat mengupayakan adanya *cooperation*, *benchmarking*, *networking* dan berbagai usaha lain, sehingga dapat memanfaatkan *lesson learned* dan *best practices* dari perguruan tinggi lain.

Dalam konteks pengembangannya setelah merger fakultas kalau disini adalah fakultas Ushuluddin dan dakwah (FUAD) harus terus mengusahakan peningkatan kualitas dan relevansinya, meski ke arah itu cukup berat. Bicara peningkatan kualitas, banyak hal mesti menjadi perhatian;

1. Daya saing mulai dari dosen, mahasiswa, manajemen pengelolaan, kurikulum, sarana prasarana dan lainnya. Sebagai contoh, karena fakultas ushuluddin dan dakwah hampir sebagian besar pendaftarannya bukan raw input yang berkualitas utama, maka untuk menghasilkan output yang berkualitas tidak ada pilihan lain kecuali dengan memperkuat proses pembelajaran.
2. Otonomi (*autonomy*) Sistem pengelolaan di perguruan tinggi selama ini pada umumnya mengikuti peraturan yang secara seragam berlaku untuk seluruh jajaran unit pelayanan pemerintah. Pengelolaan terpusat seperti ini mengakibatkan tumbuhnya budaya birokrasi yang kuat di perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi merasa bahwa akuntabilitas mereka hanya kepada atasannya (*single accountability*) di pemerintah pusat, dan bukan kepada stakeholders secara keseluruhan yaitu masyarakat perguruan tinggi (dosen, pegawai, dan mahasiswa), orang tua mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat lainnya (penyedia kerja, alumni, industri, dan masyarakat umum lainnya). Cara pengelolaan perguruan tinggi berbeda dengan organisasi pemerintah, bisnis, atau

industri. Secara universal diakui bahwa pendidikan tinggi mempunyai keunikan dalam keputusan menteri agama republik indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang rencana strategis kementerian agama tahun 2015 -2019.

3. Kesehatan organisasi (*Organization Health*)

Yakni mengembangkan sistem nilai dan norma mendasar seperti pencarian kebenaran, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Untuk menjadi suatu organisasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap stakeholders-nya, maka perguruan tinggi perlu dikelola secara otonomi sebenarnya untuk menghindari intervensi yang tidak diinginkan yang mengganggu dari tujuan pendidikan itu sendiri. Kesehatan organisasi (*organizationhealth*) Perguruan tinggi yang sehat juga memiliki aset terpisah dari aset para penyelenggaranya. Aset tersebut dapat berupa sarana prasarana, hak dan kekayaan intelektual dan sumberdaya manusia yang dimanfaatkan untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Untuk mencapai kualitas penyelenggaraan pendidikan yang sehat, maka perguruan tinggi wajib memenuhi persyaratan aset minimal, seperti diatur dalam perundang-undangan. Pengelolaan aset di suatu perguruan tinggi yang baik hendaknya mengikuti aset *management system*, sehingga pemanfaatan, pemeliharaan, penyusutan, penghapusan aset atau pengadaan aset baru dapat dikendalikan secara efektif dan efisien. Selain itu, karena perguruan tinggi adalah tempat untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka sumber daya informasi yang dimiliki dosen, per-

pustaka dan yang diperoleh melalui penggunaan teknologi informasi, dapat juga dikategorikan sebagai aset perguruan tinggi. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu:

- (1) Masukan;
- (2) Proses;
- (3) Luaran; dan
- (4) Hasil ikutan (*outcome*).

Yang termasuk dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang masuk dalam kategori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS lainnya, sedang yang termasuk dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungan.⁷

Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain:

- (1) arah organisasi yang sehat;
- (2) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel;
- (3) Ketersediaan Rencana Pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja;
- (4) Kemampuan dan Keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non akademik yang handal dan profesional;

Kebijakan Penggabungan (*merger*) Fakultas pada PTKIN

- (5) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif;
- (6) Pendanaan yang cukup; dan
- (7) mahasiswa yang memiliki kompetensi yang baik. Dengan didukung ketujuh unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional.

Daftar Pustaka

- Aa'ad Muzamil. *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama sampai Orde Baru* (suatu tinjauan historis) dalam POTENSIAL jurnal: Kependidikan Islam vol. 2 desember 2016.
- Agus Zaenul Firti. *organisasi Pembelajaran: Strategi memberdayakan dan mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk Dan Masa Depan*nya Ed.1, Cet II. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Cheppy Hari Cahyono Dan Suparlan Al Hakim. *Ensiklopedi Politika*. Surabaya: Usaha Nasional 1982.
- Keputusan Menteri Agama Republik (KMA-RI) Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2015 -2019.
- M.Shabir. *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Pada Pendidikan Islam* dalam jurnal Lentera Pendidikan, Vol.16 No.2 Desember 2013.

- Machasin, dkk., Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis *Balanced Scorecard*, dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 2, November 2011. Mohammad Hudaeri: *Revitalisasi dan Pemberdayaan Fakultas Uhsuluddin 100* | Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.1, Juni 2014.
- Oxford University. *Pocket Dictionary* edisi II Cet.V. Oxford University Press 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga cetakan 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Richard I. Hofferbert. *The Study of Public Policy*. Indianapolis, 1974.
- Thomas Dye. *Understanding Public Policy*. New Jersey, 1978.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas 2008.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus Media 2006.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penjelasannya. Surabaya: Karya Utama, 2010.

4

PERGURUAN TINGGI BERBASIS PESANTREN

Muhammad Arif Syihabuddin

A. Pendahuluan

Pemikiran bagaimana menempatkan pendidikan tinggi sebagai ujung tombak perubahan bangsa sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Berulang kali para pembuat kebijakan pendidikan tinggi dihadapkan pada pilihan-pilihan antara pemerataan pendidikan atau pengembangan pusat keunggulan (*centers of excellence*). Peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa mengarungi era persaingan global sudah sangat urgen. Pada umumnya pendidikan tinggi di negara ini telah tertinggal, bahkan terasing dari kebutuhan dan realitas sosial, ekonomi, serta budaya masyarakatnya. Perguruan tinggi memerlukan otonomi dan independensi untuk dapat memulihkan perannya itu keluar dari menara gading dan terlibat secara langsung sebagai agent of change dalam perubahan masyarakat.

Perguruan tinggi merupakan Lembaga Pendidikan yang jenjang studinya ditempuh setelah seseorang tuntas masa studi pada Lembaga Pendidikan dasar dan menengah. Bentuk

penyelenggaraannya ada Lembaga Pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian ristek dikti, ada juga yang berada di bawah naungan kementerian agama. Lembaga Pendidikan tinggi islam adalah Lembaga Pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian agama, meskipun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa sisi yang masih belum bisa terlepas dari kementerian ristek dikti, yang kemudian istilahnya disebut perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI/PTKIN).

Pengembangan untuk Lembaga Pendidikan pada saat ini telah banyak dilakukan, tidak terkecuali pengembangan pada Lembaga Pendidikan tinggi Islam. Bentuk pengembangannya sangat bermacam-macam, salah satunya adalah transformasi secara kelembagaan. Banyak sekalai Lembaga Pendidikan tinggi islam yang dulunya merupakan sekolah tinggi atau institut dan berada dibawah naungan kementerian agama, sekarang bertransformasi menjadi universitas, yang secara otomatis kelembagaannya berubah status menjadi Lembaga Pendidikan tinggi yang berada dibawah naungan kementerian ristek dikti.

Keberadaan pondok pesantren di Indonesia, dalam perkembangannya sangat berpengaruh terhadap sumber daya masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa dari sejak awal berdirinya pesantren disiapkan untuk mendi-dik dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pengajian, baik de-ngan sistem tradisional maupun modern.¹

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 97.

Pesantren yang menjadi salah satu Lembaga penyelenggara Pendidikan, pada saat ini juga telah mengalami berbagai perkembangan, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Pendidikan tinggi. Sebut saja pesantren yang ada di provinsi Jawa Timur. Sangat banyak dijumpai pondok pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi, ada pondok pesantren Mambaus Sholihin di Kabupaten Gresik dengan INKAFA sebagai Lembaga Pendidikan tingginya, di pondok pesantren Tebuireng Jombang ada UNHASY, di pondok pesantren Bahrul Ulum Jombang ada UNWAHA, di pondok pesantren Darus Salam Gontor ada Universitas Darussalam Gontor, bahkan pemerintah (Kementerian Agama) juga membuat program perguruan tinggi berbasis pesantren yang kemudian disebut dengan Ma'had 'Aly.²

B. Pondok Pesantren

Perkataan pesantren berasal dari kata "santri", dengan awalan "pe" dan akhiran "an" yang mempunyai arti asrama tempat santri atau tempat murid belajar mengaji.³ Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh.⁴ Pesantren secara terminologi didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan mene-

² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3221119/menag-resmikan-13-perguruan-tinggi-berbasis-pesantren-di-indonesia>, diakses pada 01 November 2018.

³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 762.

⁴ *Ibid.*, h. 878.

kankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁵

Pondok Pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam berbeda dengan yang lainya. Baik dari segi aspek pendidikan ataupun dari aspek system pendidikannya. Perbedaan dari segi system pendidikan terlihat dari proses belajar mengajarnya. Yang cenderung sederhana dan tradisional walaupun di masa sekarang ini telah ada pesantren yang memadukan pendidikan dengan system modern. Ada beberapa ciri atau karakter yang harus dimiliki oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam pengembangan masyarakat.

1. Masjid

Masjid pada hakekatnya merupakan central kegiatan kaum muslimin, fungsi masjid di pondok pesantren sangat central karean sebelum berdirinya pondokan tempat mukim nya para santri, juga masjid sebagai tempat belajar pertama. Sejarah pun telah mencatat perkembangan pesantren dari masa ke masa tidak bisa dipisahkan karena keberadaan masjid sebagai ruang konsultasi ukhrowi dan duniawi.

2. Pondok

Kata Pondok tidak bisa dipisahkan dengan pesantren, sehingga lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren yang merupakan tempat mukim, pendidikan dan pembinaan para santri.

⁵Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), h. 55.

3. Kyai

Kyai adalah figur central yang dijadikan panutan, dengan kekayaan ilmu, sikap yang bijaksana, kharismatik, leadership dan bertanggungjawab penuh terhadap keberadaan pesantren.

4. Santri

Istilah santri hanya terdapat pada Pesantren, sebagai bentuk istilah dari seorang yang belajar ilmu di pondok pesantren, keberadaan santri sebagai obyek sama halnya dengan siswa di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Karena keberadaan santri adalah untuk mengikuti proses belajar dipondok pesantren.

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama di pedesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Awal kehadiran pondok pesantren bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Munculnya pesantren di Indonesia diperkirakan sejak 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir di seluruh lapisan masyarakat muslim. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut.⁶

Pesantren, jika dilihat dari sejarah, sosiologis dan antropologis, lembaga ini seharusnya dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif di Indonesia, namun pemerintah ter-

⁶ Imam Syafe'i, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentu Karakter, dalam Jurnal *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Mei 2017, h. 85-103.

kesan melihat sebelah mata dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Di satu sisi pemerintah mengakui produk-produk atau kualitas lulusan pesantren akan tetapi disisi lain pesantren tetap pesantren yang tidak secara utuh diakui sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari lembaga pendidikan pada umumnya. Ciri khas yang disandang itu menjadikan tidak akan mungkin pesantren diberlakukan peraturan yang sama dengan sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren salaf pada umumnya dengan menggunakan metode sorogan, bandongan dan wetonan. Sedangkan pesantren khalaf menejemen pesantren dan kurikulum pesantren semuanya adalah sisten modern. Kyai tidak lagi mengurus keuangan pesantren, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada bendahara pesantren. Demikian juga kurikulum yang ada dengan pola kurikulum modern dengan sistem pembelajaran klasikal.⁷

Melihat tipe-tipe pesantren tersebut diatas, agaknya fungsi pesantren tidak semata-mata hanya sebagai lembaga Pendidikan *tafaqquh fi al-dienan-sich*, tetapi multi kompleks yang menjadi tugas pesantren. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktifitas transfer ilmu saja, melainkan pesantren juga sebagai kaderisasi ulama' dan sebagai pemelihara budaya Islam.

Mengacu kepada UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akade-

⁷ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 224-225.

mik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Maka, pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concerns di bidang keagamaan. Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajarannya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.⁸ Era reformasi dan lahirnya UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut, tampaknya membawa angin segar bagi pesantren. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pesantren semakin jelas. Dengan demikian, maka pengembangan pesantren kedepan secara yuridis formal tidak lagi mengalami kesulitan sebagaimana awal munculnya pesantren sampai pada masa penindasan penjajah dan belenggu pada masa orde lama dan orde baru.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki lima elemen dasar tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik, dan kiai.⁹ Pendapat lain meny-

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas, 2003.

⁹ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam Asia Tenggara* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990), h. 10.

takan bahwa dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren selalu terdapat unsur kiai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kiai, masjid serta pondok tempat tinggal para santri.¹⁰ Pada perkembangannya pondok pesantren mulai menulis berbagai program Pendidikan dengan membuat Lembaga Pendidikan di berbagai jenjang, mulai Pendidikan dasar samapai Pendidikan tinggi, khususnya pondok pesantren khalaf atau modern.

C. Perguruan tinggi berbasis pesantren

Pola pendidikan di pondok pesantren erat kaitanya dengan tipologi pondok pesantren yang dapat diketahui dari karakteris pondok pesantren. Pendidikan dan pengajaran Islam yang pada umumnya diberikan dengan cara non klasikal (system wetonan, bandongan dan sorogan) dimana seorang kiai mengajar mahasantri-mahasantrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama' besar sejak abad pertengahan, sedangkan para mahasantri biasanya tinggal di dalam pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.¹¹ Metode Sorogan, memiliki arti seorang Kiai mengajar santrinya yang masih berjumlah sedikit secara bergilir santri per santri. Sistem sorogan, para santri maju satu per satu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru atau Kiai. Pada gilirannya urid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata sepersis mungkin seperti apa yang diungkapkan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian

¹⁰ Imam Bawani, *Tradisional dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 89.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Darma Bakti, 1994), h. 10.

rupa agar santri mudah mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam rangkaian kalimat Arab. Sistem tersebut, santri diwajibkan menguasai cara pembacaan dan terjemahan secara tepat, dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran bila telah berulang-ulang mendalami pelajaran sebelumnya. Sistem sorogan inilah yang dianggap fase tersulit dari sistem keseluruhan pengajaran di pesantren karena di sana menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari santri itu sendiri.¹²

Metode bandungan adalah sistem pembelajaran yang dilakukan oleh kiyai kepada santrinya. Seorang santri tidak harus mengatakan bahwa ia mengerti atau tidak tapi santri menyimak apa yang dibaca oleh kiyai dan Kiyai akan membaca yang mudah dengan penjelasan yang sederhana. Ketiga metode sederhana inilah yang merupakan sistem pembelajaran pada dunia pesantren yang tidak terlepas oleh kiyai, karena yang menyangkut, materi, waktu dan tempat pengajaran (kurikulum) tereletak pada kiyai. Sebab otoritas kiyai lebih dominan dalam pembelajaran di dunia pondok pesantren. Model ini bersifat dialogis sehingga umumnya hanya diikuti oleh santri senior. Namun demikian, tiap pesantren tidak mengajarkan kitab yang sama, melainkan kombinasi kitab yang berbeda-beda sehingga banyak Kiai terkenal dengan spesialisasi kitab tertentu. Hal ini karena kurikulum pesantren tidak distandarisasi. Dari perkembangan seperti itulah bahwa pesantren merupakan lembaga khusus dengan pengajaran kitab-kitab

¹²M. Nur Hasan, Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Pondok Pesantren Raoudhotut Tholibin Rembang Jawa Tengah, dalam Jurnal *Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2016, h. 93-110.

kuning sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam dengan sistem pengajaran yang dilakukan langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karya ulama besar.¹³

Metode wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya sesudah mengerjakan shalat fardlu, dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti para santri. Kemudian Kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan, sekaligus mengulas kitab-kitab salaf yang menjadi acuan. Termasuk dalam pengertian weton adalah *halaqah*.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia.¹⁴ Pada perkembangan zaman berikutnya, peran pondok pesantren yang mulanya berfungsi sebagai lembaga yang menghasilkan para tokoh ilmuwan dan kader pewaris risalah para Nabi.¹⁵ mengalami pergeseran yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh perkembangan yang berasal dari luar (eksteren) dan perkembangan yang berasal dari dalam (interen) pesantren itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan dari luar dalam tulisan ini adalah perkembangan dunia pendidikan, baik itu pendidikan umum atau pada pendidikan agama antara lain dengan beru-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mahmud, Model-Model Kegiatan di Pesantren (Tangerang: Media Nusantara, 2006), h. 1.

¹⁵ Ishom El-Saha, *The Power of Mahasantri Civilization: Melejitkan Daya Tawar Pesantren* (Jakarta Pustaka Mutiara, 2008), h. 1.

bahnya kurikulum dan perkembangan dunia usaha dan ekonomi kenegaraan, yaitu yang mengukur keberhasilan melalui profesionalisme (kemampuan seseorang dalam bidang pekerjaan sesuai dengan keahliannya yang diakui oleh lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikasinya). Sedangkan faktor yang berasal dari dalam pesantren itu sendiri yaitu keharusannya menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sehingga sering mengganti kurikulum dan pola pembelajarannya sesuai dengan permintaan keadaan dan kondisi, walaupun kadang perkembangan tersebut sedikit berbeda dengan nilai-nilai keislaman dalam pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

Pesantren dengan Lembaga Pendidikan tingginya diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai program yang telah ditawarkan oleh pemerintah maupun pihak pengelola pesantren merupakan alternative penyelenggaraan program Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan kementerian agama dalam inovasi program Pendidikan tinggi adalah meresmikan perguruan tinggi berbasis pesantren.¹⁶

Menurut menteri agama Ma'had 'Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan

¹⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3221119/menag-resmikan-13-perguruan-tinggi-berbasis-pesantren-di-indonesia>, diakses pada 01 November 2018.

oleh pondok pesantren.¹⁷ Kitab kuning yang dimaksud adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Adapun tujuan Mahad Aly adalah menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*), dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. Untuk membangun keunggulan dengan integritas akademik yang tinggi, Menteri agama memastikan setiap Ma'had 'Aly hanya diberikan izin penyelenggaraan untuk satu Program Studi. Lebih dari itu, program studi dimaksud juga akan dikembangkan menjadi pusat kajian keilmuan ke-Islaman dan ke-pesantrenan secara sekaligus.

Selain Ma'had 'Aly, terdapat banyak pondok pesantren yang telah jauh sebelumnya memiliki program Pendidikan di jenjang Pendidikan tinggi. Mambaus sholihin misalnya, pondok pesantren ini berada di kabupaten Gresik. Sejak tahun 2004, mambaus sholihin telah mendirikan INKAFA (Institut Keislaman Abdullah faqih) sebagai Lembaga Pendidikan tingginya di jenjang formal strata satu (S1). Dan pada tahun 2017 INKAFA telah resmi menyelenggarakan program pascasarjana dibidang keilmuan Pendidikan agama islam moderat. Secara kelembagaan INKAFA berada di bawah naungan kementerian agama. Sistem pembelajaran yang ada tidak terlepas dari kurikulum pesantren, maka ada beberapa mata kuliah yang disebut kepesantrenan, seperti program penguatan hafalan al-qur'an dan baca kitab kuning.

Selain Mambaus Sholihin, terdapat pesantren lain yang mempunyai Lembaga Pendidikan tinggi. Universitas Hasyim Asy'ari, sebelumnya perguruan tinggi ini bernama Institut

¹⁷Peraturan Menteri Agama No 71 Tahun 2015 tentang Ma'had 'Aly.

Keislaman KH. Hasyim Asy'ari, Perguruan tinggi ini terletak di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Unhasy juga mempunyai program pascasarjana. Universitas Pesantren Tinggi darul Ulum, adalah satu-satunya perguruan tinggi yang berlabel pesantren, UNIPDU terletak di Pondok Pesantren Jombang. UNWAHA terletak didekat pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Unwaha memiliki beberapa fakultas, dan kebanyakan mahasiswa adalah santri. STAI Al Anwar, terletak didalam pondok pesantren Al Anwar, Sarang-Rembang, yang didirikan oleh KH. Maimun Zubair, Mayoritas Mahasiswa disini adalah santri pon-pes sekitaran rembang. IAIT Kediri, adalah perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Al-Mahrusiyah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, banyak santri Lirboyo yang mondok sambil kuliah di Perguruan Tinggi ini baik jenjang S1 maupun S2. Selain lembaga Pendidikan tinggi di atas, masih banyak lagi lembaga Pendidikan tinggi di Indonesia yang berbasis pesantren. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pembelajaran yang diselenggarakan pada lembaga Pendidikan tinggi tersebut adalah berbasis pesantren dan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai keislaman yang ada pada pondok pesantren.

D. Penutup

Pesantren merupakan salah satu lembaga Pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas. Saat ini banyak pesantren di Indonesia yang melakukan pengembangan pada bidang kelembagaan pendidikannya, transformasi tersebut merupakan langkah yang dianggap mempercepat peningkatan kualitas Pendidikan di pesantren. Saat ini banyak dijumpai pesantren yang memiliki lembaga Pendi-

dikan formal mulai jenjang dasar sampai tinggi. Lembaga Pendidikan tinggi berbasis pesantren yang telah diresmikan oleh kementerian agama adalah dalam bentuk atau penamaan ma'had 'aly. Namun jauh sebelum itu, sudah banyak pesantren yang telah memiliki lembaga Pendidikan tinggi sebagai bentuk fasilitas yang disiapkan untuk para santri yang ingin melanjutkan studi formal pada jenjang yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Bawani. Imam. *Tradisional dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas, 2003.

El-Saha. Ishom. *The Power of Mahasantri Civilization: Melejitkan Daya Tawar Pesantren*. Jakarta: Mutiara, 2008.

Hasan. M. Nur. Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Pondok Pesantren Raoudhotut Tholibin Rembang Jawa Tengah, dalam Jurnal *Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2016.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3221119/menag-resmikan-13-perguruan-tinggi-berbasis-pesantren-di-indonesia>,

Mahmud. *Model-Model Kegiatan di Pesantren*. Tangerang: Media Nusantara, 2006.

Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.

- Peraturan Menteri Agama No 71 Tahun 2015 tentang Ma'had 'Aly.
- Shihab. M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Syafe'i. Imam. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentu Karakter, dalam *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Mei 2017.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Wahid. Abdurrahman. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Darma Bakti, 1994.
- Zarkasyi. Abdullah Syukri. *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Zarkasyi. Abdullah Syukri. *Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam Asia Tenggara*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 1990.

5

PESANTREN BERBASIS PERGURUAN TINGGI

Didin Sirojudin

A. Pendahuluan

Sistem Pendidikan Pesantren yang dalam hal ini dikelola oleh Pondok Pesantren merupakan representasi dari sistem pendidikan tradisional yang memiliki visi utama untuk mengintrodusir nilai-nilai ajaran Islam dan moralitas. Sedangkan Sistem Pendidikan Tinggi yang dalam hal ini dikelola oleh Perguruan Tinggi merupakan representasi dari sistem pendidikan modern di Indonesia yang memiliki visi utama untuk mengintrodusir Sain, Teknologi, dan Seni kepada para mahasiswanya. Kedua institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun berjalan secara berseberangan dan belum pernah menemukan titik temu. Baru dua dekade terakhir ini keduanya mencoba untuk bertemu dengan mencoba memadukan diri secara sinergik setelah menyadari betapa keduanya sesungguhnya sama-sama memiliki kelemahan dalam sistem pendidikannya. Pendidikan tinggi kurang pada aspek religi dan moral sedangkan pendidikan pesantren kurang pada aspek sains dan teknologi.

Guna saling memperbaiki kelemahan masing-masing, akhirnya keduanya mengikhtikari ditemukannya suatu formulasi

integrasi antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Walhasil, bermunculanlah model-model perpaduan antara keduanya yang secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) model yaitu: pertama, model integrasi pendidikan tinggi ke dalam sistem pendidikan pesantren dengan pendirian perguruan tinggi oleh pesantren, kedua, model integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan tinggi dengan bermunculannya pendirian ma'had oleh perguruan tinggi, dan ketiga, model pesantren mahasiswa yaitu pesantren khusus menampung mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang berbeda-beda.

Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa pesantrenlah yang merupakan model pendidikan asli (indigenous) Indonesia, meskipun kalau ditelisik lebih jauh ternyata asal-usul sistem pendidikan pesantren itu sendiri masih *debatable*. Sebagian ahli mengatakan bahwa ia berasal dari sistem pendidikan agama Hindu yang datang dari negeri India, sebagian lainnya mengatakan bahwa ia berasal dari sistem pendidikan halaqah yang dibawa para ulama dari negeri Arab.¹

Tapi dibandingkan dengan sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan tinggi yang diamini oleh banyak pihak telah diintrodusir oleh Kolonial Belanda pada masa lalu, tentu sistem pendidikan pesantren lebih memiliki akar sejarah di Indonesia. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada masa paska kemerdekaan dan era ORBA, pesantren justru terpinggirkan dan tidak diakui oleh sistem pendidikan nasional karena faktor kurikulum dan tradisionalitasnya, meskipun sejak era Reformasi akhir 90-an eksistensi tersebut kem-

¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, Cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1998), h. 3-5.

bali terakui setelah pesantren banyak melakukan modernisasi.

Sistem sekolah yang merupakan warisan penjajah yang diadopsi sebagai sistem pendidikan nasional bangsa Indonesia yang kemudian sistem tersebut berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi yakni pendidikan tinggi, pada hakikatnya memiliki jati diri yang sama yaitu condong sekuler dan tidak memiliki akar keindonesiaan. Yang menjadi kelemahan sistem pendidikan semacam itu adalah bahwa mereka kurang respek pada nilai-nilai moral dan keislaman dan hanya respek pada kemajuan IPTEK dan nilai-nilai modern yang berumber dari Barat. Akibatnya ketika krisis moral merajalela di mana-mana termasuk di pusaran para pemimpin bangsa dan intelektual, maka para cendekiawan muslim mulai memikirkan ulang tentang formulasi sistem pendidikan nasional khususnya sistem pendidikan tinggi yang sekiranya bisa mengintegrasikan nilai-nilai pesantren yang tipikal Islam-Indonesia tersebut dengan pendidikan tinggi yang tipikal Modern-Asing. sebagaimana yang telah diterapkan oleh PTKIN dengan mendirikan ma'had seperti UIN Malang, UIN Jakarta dan lain sebagainya.

Maka fokus dalam tulisan ini adalah 1) integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan tinggi 2) model integrasi Pendidikan pesantren Diperguruan Tinggi 3) analisis terhadap integrasi pesantren terhadap sistem pendidikan tinggi.

B. Integrasi Pesantren Ke dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi dan pesantren adalah dua lembaga pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan tinggi mempunyai keunggulan dari sisi rasionalitas dan eksperimentasi. Sedangkan pesantren menurut Azyumardi

Azra adalah dunia tradisional Islam yaitu dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam.²

Fungsi pendidikan tinggi menurut PP No. 17 Tahun 2010 pasal 84 yaitu; Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a. Dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebar-luaskan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- b. Dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- c. Dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Integrasi atau perpaduan antara sistem pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan pesantren tampaknya akan menjadi trend baru yang akan terus mengedepan dari pola pengembangan kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Beberapa perguruan tinggi mulai memadukan sistem pendidikan pesantren ke dalam penyelenggaraan pendidikan tingginya dengan mendirikan ma'had di dalam kampus seperti halnya yang sudah dilakukan oleh UIN Malang, IAIN TulungAgung, UIN Jakarta. Begitu pula sebaliknya banyak pondok pesantren yang juga telah memadukan sistem pendidikan tinggi ke dalam

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

penyelenggaraan pendidikan pesantrennya dengan mendirikan berbagai jenis dan jenjang perguruan tinggi mulai dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut sampai tingkat universitas bahkan sampai jenjang Pascasarjana. Hal ini menarik karena pesantren yang selama ini dikenal memiliki karakter tradisional dan konservatif ternyata cukup dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat atas keterpaduan pendidikan tersebut. Pesantren menurut Syafe'I merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut.³ Begitupun sebaliknya perguruan tinggi yang selama ini cenderung sangat akademistik dan modern ternyata juga merindukan suasana baru khas pesantren.

M. Zainuddin menjelaskan betapa kebutuhan atas keterpaduan antara pendidikan Islam, dalam konteks ini direpresentasikan oleh pesantren, dengan pendidikan umum yang direpresentasikan oleh sekolah maupun perguruan tinggi, sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan urgen.⁴ Bahkan menurut A. Malik Fajar, kalau integrasi atau sintesa antara keduanya berhasil menemukan formulasinya yang tepat, maka ia akan menjadi pendidikan alternatif masa depan bagi bangsa Indonesia.⁵

³ Imam Syafe'i, Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter, dalam *Jurnal, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8 Mei 2017, h. 85-103.

⁴ H. M. Zainuddin, *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi Ulul Albab*, Cet. 3 (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 7.

⁵ A. Malik Fajar, "Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", <http://pcinumesir-tripod.com/>, diakses tanggal 12 Nov 2018.

Hal tersebut dipandang sebagai salah satu upaya yang dapat menjawab kerisauan masyarakat terhadap dikotomi pendidikan yang selama ini ada di Indonesia yaitu dikotomi antara pendidikan umum dalam hal ini sekolah dan perguruan tinggi di satu sisi, dengan pendidikan agama dalam hal ini pesantren dan madrasah di sisi yang lain. Lebih ironisnya lagi dikotomi antara keduanya juga terjadi pada tingkat penyelenggaraan kelembagaannya di tingkat pemerintahan. Dalam hal ini pesantren, madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah kewenangan Kementerian Agama sedangkan sekolah dan Perguruan Tinggi Umum di bawah kewenangan Kementerian yang berbeda pula yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang sekarang sudah berubah lagi berada dibawah kementerian Ristekdikti.

Berkaitan dengan penelusurannya terhadap asal-usul mulai terjadinya dikotomi pendidikan Islam di Indonesia, M. Zainuddin lebih lanjut mengatakan.⁶

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim bahkan terbesar di dunia, sejak awal abad ke-20 M telah memiliki sistem pendidikan yang dikotomis yaitu: pertama, pendidikan pada pondok pesantren dan madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja yang diselenggarakan oleh muslim pribumi, kedua, pendidikan pada sekolah-sekolah umum yang sekuler tak mengenal ajaran agama, yang didirikan oleh kolonial Belanda.

Dualisme sistem pendidikan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga melanda seluruh negara muslim atau mayoritas masyarakat muslim. Sehingga hal ini berdampak

⁶ Zainuddin, *Paradigma Pendidikan*, h. 6.

luas dalam kehidupan, baik gaya hidup, pola pikir dan aktivitas sosial yang membahayakan dan merugikan umat Islam sendiri. Di sinilah perlunya pengembangan pendidikan Islam yang mampu mewujudkan integrasi antara ilmu dan agama (integralisme dan desekularisme pendidikan).

C. Model Integrasi Pesantren Ke dalam Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi

Pengembangan perguruan tinggi Islam pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara sistematis dan terarah;
2. untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islamiyah, dan
3. Untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun swasta, serta lembaga lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari kacamata historis ini, pesantren merupakan suatu yang urgen untuk mewujudkan kaderisasi ulama di perguruan tinggi Islam. Malik Fajar menggambarkan adanya perbedaan antara tradisi pendidikan di pesantren dan perguruan tinggi, ia mengatakan bahwa pesantren mempunyai keunggulan dari segi moralitas tetapi minus tradisi rasionalitas, meskipun mampu melahirkan pribadi yang tangguh secara moral, tetapi lemah secara intelektual. Sebaliknya, perguruan tinggi mempunyai keunggulan dari sisi rasionalitas dan ditambah pengayaan di bidang skill, tetapi

minus pengayaan moral. Dalam kenyataannya pendidikan tinggi hanya menghasilkan manusia yang cerdas tetapi kurang mempunyai kepekaan etika dan moral.

Dengan memperhatikan implikasi dari tradisi pendidikan tersebut, maka sudah saatnya dicarikan usaha untuk mengintegrasikan antara pesantren dan perguruan tinggi sehingga tercipta satu kesatuan antara moralitas-rasionalitas. Jika perguruan tinggi dan pesantren dapat diintegrasikan dalam konteks yang integral, maka model atau sistem pendidikannya akan menjadi alternatif pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari pesantren, kemudian dibumikan dalam tradisi pendidikan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, lembaga pesantren difungsikan untuk membangun tradisi yang kokoh. Tradisi yang dimaksudkan disini adalah kebiasaan dan adat istiadat yang bernuansa Islam. Misalnya, kebiasaan melakukan salat berjama'ah, tadarrus al-Qur'an, salat malam, menghargai waktu, menghormati sesama kolega, menghargai ilmu sampai pada karakter atau watak dalam melakukan pilihanpilihan teknologi dan manajemen modern sebagai produk ilmu pengetahuan.

Sebagaimana contoh yang telah diintegrasikan oleh UIN Malang yaitu:

a. Integrasi Lembaga

Integrasi lembaga yang dikembangkan UIN Maliki Malang, menguatkan teori Bilgrami tentang konsep Universitas Islam, dia mengatakan bahwa tujuan universitas Islam bukan sekedar menyelenggarakan "pendidikan tinggi", tetapi universitas Islam harus mencetak sarjana-sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman dan bersedia menyebarkan ilmu tersebut ke dalam ilmu pengetahuan modern. Di samping itu,

juga mencetak orang-orang yang mendalami ilmunya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu teknik, sosial dan budaya, serta sains. M. Natsir juga mengatakan bahwa pendidikan Islam yang integral tidak mengenal pemisahan antara sains dan agama. Karena penyatuan antara sistem sistem pendidikan Islam adalah tuntutan aqidah Islam. Sistem pendidikan Islam yang integral kata Kuntowijoyo juga sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan keharusan adanya keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Integrasi pesantren tersebut juga mendukung pendapat Abd A'la bahwa pesantren adalah laboratorium yang berbasis *cultural*. Pendidikan Islam sangat memerlukan kekuatan kultural. Sebab menurut pandangan Islam, ilmu harus diamalkan. Tidak ada gunanya ilmu tanpa membuahkan amal.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus dilengkapi dengan sarana yang cukup untuk menumbuhkan kembangkan kecintaan pada bidang ilmunya melalui pembiasaan maupun keteladanan. Wahana, iklim dan suasana lembaga pendidikan yang mampu menumbuhkan penghayatan, rasa cinta terhadap ilmu yang dikembangkan itu disebut sebagai kulturalnya. Secara konkret, apa yang telah dikembangkan di UIN Maliki Malang yang dilengkapi dengan masjid dan ma'had. Kedua fasilitas ini keberadaannya sangat penting untuk membiasakan para mahasiswa dalam mengembangkan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Tidaklah mungkin, belajar Islam sekedar membaca diperpustakaan dan penelitian di laboratorium. Kegiatan itu harus disempurnakan, kegiatan nyata di masjid maupun di ma'had.

Menurut Bilgrami sebagai upaya mendirikan universitas Islam paling tidak ada tiga rekonstruksi yang harus dilakukan

yaitu; pertama, rekonstruksi tentang konsep ilmu yang integrative antara ilmu-ilmu naqliyah dan ilmu-ilmu aqliyah. Kedua, rekonstruksi kelembagaan yaitu menjadikan lembaga pengembangan studi ilmu-ilmu naqliyah sebagai bagian dari universitas. Ketiga, pengembangan kepribadian individual, mulai dari dosen sampai ke alumninya.⁷

Berkaitan dengan hal ini, UIN Maliki Malang melakukan,

1. menyusun keilmuan integratif antara ilmu-ilmu *naqliyyah* dan ilmu-ilmu *aqliyyah* dengan metafora pohon ilmu, dan mengintegrasikan program Ma'had Sunan Ampel Al-Aly dengan kurikulum UIN Maliki Malang.
2. UIN Maliki Malang membentuk beberapa lembaga studi *naqliyyah* sebagai bagian dari proses pendidikan UIN Maliki Malang, seperti LKQS, HTQ, Tarbiyah Ulul Albab, Kajian Zakat dan Wakaf. Ketiga, untuk mengembangkan kultur Islami di kalangan civitas akademik, UIN Maliki Malang mengintegrasikan tradisi Ma'had Sunan Ampel Al-Aly seperti khatm al-Qur'an, salat berjamaah, puasa Senin dan Kamis, menghormati dosen, dll. Dengan demikian, pengintegrasian sistem pendidikan pesantren, yang mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti dengan baik, dapat membantu Perguruan Tinggi Islam mencapai etos keilmuan yang mampu melihat hubungan organik tersebut. Untuk memperkuat sistem kelembagaan tersebut, UIN Maliki Malang membentuk sembilan Arkan al-Jami'ah sebagai pilar pengembangan, yaitu:

⁷ Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, *Konsep Universitas Islam*. terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 15-20.

- a). SDM yang unggul,
- b). Masjid,
- c). Ma'had sebagai pengembangan spiritual, intelektual, dan jiwa profesional, d). Perpustakaan,
- e). Laboratorium sebagai wahana penelitian,
- f). Tempat-tempat pertemuan ilmiah,
- g). Perkantoran sebagai pusat pelayanan akademik,
- h). Pusat-pusat pengembangan seni dan olahraga, dan
- i). Sumber pendanaan yang luas dan kuat.

b. Integrasi Kurikulum

UIN Maliki Malang memanifestasikan konsep ulul albab dalam bentuk program pendidikan. A.M. Saefuddin menjelaskan bahwa ulul albab adalah pemikir yang memiliki ketajaman analisis terhadap gejala dan proses alamiah dengan metode ilmiah induktif dan deduktif, serta intelektual yang membangun kepribadiannya dengan dhikir dalam keadaan dan situasi apapun, sehingga mampu memanfaatkan gejala, proses, dan sarana alamiah ini untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.⁸ Tujuan pendidikan ulul albab, adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki beberapa karakteristik tersebut. Menurut UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (2), bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Dalam pasal 38 ayat (3) dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan

⁸ A.M Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi* (Bandung: Mizan, 1998), h. 34.

mengacu pada standart nasional pendidikan untuk setiap program studi. Berdasarkan UU tersebut menjadikan konsep ulul albab sebagai asumsi dasar dalam pengembangan pendidikan di UIN Maliki Malang merupakan perwujudan dari prinsip diversifikasi, sehingga dapat dibenarkan selama tetap memperhatikan standard nasional pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, diperlukan struktur keilmuan yang jelas, Sebagaimana integrasi yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsep Integrasi Ilmu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Jaring Laba- Laba, UIN Bandug dengan konsep Wahyu Memandu Ilmu.⁹

Untuk merealisasikan struktur keilmuan dengan metafora pohon ilmu, kurikulum UIN Maliki Malang diintegrasikan dengan program Ma had Sunan Ampel Al-Aly. Berdasarkan struktur keilmuan tersebut, UIN Maliki Malang mewajibkan seluruh mahasiswa tanpa melihat jurusan atau program studi apa, untuk menguasai pondasi atau akar keilmuan lebih dahulu terdiri dari; 1) Bahasa Arab dan Inggris, 2) Filsafat, 3) Ilmu Kealaman, 4) Ilmu Sosial, dan 5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebelum mengkaji ajaran Islam (pada pohon ilmu digambarkan sebagai sebuah batang), meliputi: 1) al-Qur an dan al-Sunnah, 2) Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam, 3) Pemikiran Islam terdiri atas; Teologi, Fiqih, dan Tasawuf, 4) Pemahaman terhadap masyarakat Islam. Selanjutnya mengkaji keilmuan sesuai dengan pilihan dan jurusan serta *Pendidikan Islam Tradisi dan* program studi masing-masing (yang digambarkan sebagai sebuah dahan dan ranting).

⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 35.

Struktur kurikulum tersebut bila dikaitkan dengan realitas sejarah pengembangan perguruan tinggi Islam didorong oleh beberapa tujuan, yaitu: 1) untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah; 2) untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam; dan 3) untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan sebagainya.¹⁰ Maka pemahaman akan tujuan yang pertama berimplikasi pada tujuan kedua dan ketiga tersebut di atas.

Tujuan kedua adalah untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. Makna dakwah Islam bukan lagi tereduksi menjadi dakwah dalam arti mengkomunikasikan *al-'ulum al-naqliyyah* (*perennial knowledge*) saja, yang mencakup: studi al-Qur'an, studi Hadis, sirah nabawiyah, tauhid, ushul fiqh dan fiqh, bahasa arab al-Qur'an, serta bidang-bidang studi tambahan yang meliputi: metafisika Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam. Tetapi menurut Bilgrami juga bagaimana *al-'ulum al-naqliyyah* (*perennial knowledge*) memberi spirit dan landasan, serta ancangan bagi pengembangan *al-'ulum al-aqliyyah* (*acquired knowledge*), yang mencakup: 1) Arts (ilmu-ilmu imajinatif), seperti, kesenian dan arsitektur Islam, bahasa-bahasa, kesusasteraan; 2) ilmu-ilmu intelektual, yang meliputi: ilmu-ilmu sosial, filsafat, pendidikan, ekonomi, ilmu politik, sejarah, peradaban Islam, geografi, sosiologi, linguistik, psikologi, antropologi; 3) ilmu-ilmu kealaman, yang meliputi: filsafat ilmu pengetahuan, mate-

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, 170.

matika, statistika, fisika, kimia, biologi, astronomi, ilmu-ilmu angkasa luar dan sebagainya; 4) ilmu-ilmu terapan, yang meliputi teknik dan teknologi, kedokteran, pertanian dan kehutanan; 5) ilmu-ilmu praktis, meliputi: perdagangan, ilmu-ilmu administrasi, ilmu-ilmu perpustakaan, ilmu-ilmu ke rumah tangga, ilmu komunikasi dan sebagainya.¹¹

Sedangkan tujuan ketiga adalah untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama. Pemahaman tentang ulama bukan lagi terbatas pada mereka yang menguasai *al-'ulum al-naqliyyah* (*perennial knowledge*), tetapi juga mereka yang menguasai *al-'ulum al-aqliyyah* (*acquired knowledge*), serta menjadikan *al-'ulum al-naqliyyah* (*perennial knowledge*) sebagai landasan, spirit serta ancangan bagi pengembangan *al-'ulum al-aqliyyah* (*acquired knowledge*) tersebut. Dilihat dari sudut pandang tersebut, menurut Muhaimin studi keislaman akan mengalami pemekaran makna, yaitu: Pertama, studi Islam sebagai sumber ajaran yang merupakan wahyu Ilahi yang terhimpun dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam bidang yang pertama ini, studi Islam bertumpu pada studi kewahyuan yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah seperti studi al-Qur'an, studi Hadis dan lain-lainnya. Kedua, studi Islam sebagai bagian dari pemikiran atau bagian dari fiqh dalam arti luas. Dalam sejarah pemikiran Islam setidaknya-tidaknya ada lima bidang pemikiran Islam yang menonjol, yaitu: Akidah-teologi (ilmu kalam), hukum dalam arti luas (*shari'ah*), filsafat, Akhlak-sufisme (*tashawuf*), ilmu pengetahuan teknologi seni (*al-'ulum al-dunyawiyah*), yang mencakup bidang-bidang yang mencakup luas mulai

¹¹ Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Ashraf, *Konsep Universitas Islam*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 14-20.

dari IPA, matematika hingga teknik arsitektur, informatika dan astronomi. Ketiga, studi Islam sebagaimana yang dialami, diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan.

Sedangkan untuk metode pembelajaran di Ma had /UIN Malang memadukan antara metode dialog dan metode *bandongan*, misalnya pada pembelajaran *Ta'lim al-Afkar al-Islamiyah* kelas *takhassus*, bagi mahasiswa yang mampu membaca kitab kuning dengan lancar langsung dibimbing oleh Kyai ma had dengan sistem dialog. Sementara bagi mahasiswa yang belum mampu membaca kitab kuning dengan lancar menggunakan sistem *bandongan* dan dipandu oleh seorang mushrif sampai dia mampu membaca kitab kuning dengan lancar. Pada pembelajaran *Ta'lim al-Qur'an* kelas tarjamah dan tafsir, pada kelas ini bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membaca dan mengkaji al-Qur'an dengan baik akan dibimbing langsung oleh pengasuh masing-masing unit. Sedangkan bagi mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap al-Qur'an dimasukkan pada kelas *taswit* dan dibimbing oleh mushrif dan murabbi.

D. Analisis Kritis terhadap Konsep Pesantren pada Sistem Perguruan Tinggi

Sejauh ini upaya pengintegrasian pada jenjang perguruan tinggi tampaknya masih harus melakukan pembenahan dan perbaikan agar menunjukkan hasil yang diharapkan seperti halnya yang telah dilakukan oleh UIN Malang, UIN Jakarta atau IAIN Tulungagung. Setidaknya masih ditemukan bahwa proses integrasi sistem pesantren ke dalam sistem pendidikan tinggi di perguruan tinggi diatas belum berjalan seutuhnya terutama pada taraf implementasinya. Salah satu

aspek yang dipandang belum maksimal adalah belum diberlakukannya sistem pesantren secara penuh selama masa studi mahasiswa. Sistem ma'had hanya diberlakukan secara terbatas pada periode tertentu saja sedangkan pada sisa periode berikutnya mahasiswa tidak lagi studi dalam sistem ma'had.

Selanjutnya Ada beberapa kendala yang muncul saat perguruan tinggi berusaha memasukkan sistem ma'had di dalamnya, yang pertama persoalan sulitnya menemukan figur *mudir al-ma'had* atau pengasuh pesantren atau yang populer disebut Kiai. Kiai bagi pesantren merupakan unsur pertama dan yang paling utama, karena dalam faktanya hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia didirikan oleh kiai. Kiailah yang melahirkan pesantren bukan pesantren yang melahirkan kiai. Pesantren memang pada akhirnya akan mencetak kiai tapi setelah berhasil mencetak santri terlebih dahulu. Nah kasus pendirian ma'had di perguruan tinggi telah masuk pada persoalan kesulitan menemukan figur kiai.

Orang alim yang memahami Islam dengan baik barangkali cukup banyak jumlahnya, bahkan sekarang sudah banyak alumni pesantren yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan berhasil menjadi dosen di sana, tapi yang memenuhi kriteria kiai agaknya masih sangat langka. Begitu pula alumni Timur Tengah yang pandai kitab kuning juga banyak jumlahnya, tapi yang memenuhi kriteria kiai juga masih sangat langka. Yang unik dari eksistensi kiai adalah bahwa mereka diyakini memiliki kekuatan spiritualitas yang tinggi.

Kiai dalam keyakinan masyarakat adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan sang khalik Allah SWT. Tidak sekedar paham agama tapi para kiai pada umumnya juga

menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan semua problematika umat.

Kesulitan kedua bagi perguruan tinggi yang memasukkan ma'had di dalam institusinya adalah bahwa gelar kiai itu bukan gelar akademik atau gelar yang dikeluarkan oleh pesantren tertentu. Kiai adalah gelar sosial yang muncul secara alamiah dan itu diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, kampus tidak bisa mengkiaiikan seseorang begitu saja tanpa sebelumnya mengetahui betul tingkat spiritualitasnya.

Problem kedua adalah problem *ikhtilat* atau berbaurnya laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dalam satu majelis ilmu. Umumnya pesantren sangat hati-hati dalam soal yang satu ini dimana antara santri putra dengan santri putri dipisahkan secara tegas baik dalam ruang kelas belajar maupun dalam kamar asramanya. Sehingga jarang terjadi kasus asusila akibat pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan lingkungan perguruan tinggi yang selama ini ada masih mentolerir itu. Jadi tantangan bagi kampus yang ingin mengintegrasikan sistem pesantren ke dalam sistem pendidikan tingginya yaitu bahwa mereka harus memisahkan antara mahasiswa dengan mahasiswinya baik dalam ruang kuliahnya maupun yang lainnya. Tanpa itu atmosfer pesantren akan sulit hadir di kampus. Tentu masih banyak hal lain yang perlu menjadi perhatian para pengelola perguruan tinggi yang menyelenggarakan sistem ma'had di dalamnya.

E. Penutup

Pada akhirnya dapat disederhanakan di sini bahwa pencarian terhadap formulasi atau rumusan Pendidikan Tinggi yang ideal di Indonesia masih terus berlangsung.

Sebagian pengelola perguruan tinggi ternyata masih meyakini bahwa arah pengembangan lembaganya tidak lain dan tidak bukan tetap mengarah ke integrasi antara pendidikan tinggi dengan pesantren. Oleh karena itu eksistensi sistem pendidikan pesantren diharapkan akan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang selama ini berjalan dengan pincang dimana nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai religiusitas relatif terabaikan. Pendekatan akademik pendidikan tinggi manakala didampingi dengan pendekatan moral-agama akan semakin menyempurnakan sistem pendidikan pada kedua belah pihak.

Hanya saja ada satu hal yang harus digarisbawahi dalam konteks ini yaitu bahwa integrasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren jangan sampai saling melemahkan. Sebab kedua-duanya juga sama-sama memiliki titik lemah, kelemahan pesantren adalah budaya disiplin yang rendah kondisi lingkungan yang kotor, manajemen yang kacau, dan beberapa hal yang lain yang manakala kesemua kelemahan tersebut masuk ke ranah perguruan tinggi, maka integrasi antara keduanya bukannya akan memperkuat tapi justru akan memperlemah perguruan tinggi. Begitu pula budaya pergaulan bebas, gaya hidup mewah dan sikap arogansi civitas akademika juga tidak boleh merambah masuk ke dalam sistem pesantren sebab hal itu justru akan melemahkan sendi-sendi pesantren. Jadi integrasi harus bermakna positif yaitu memadukan antar kultur yang baik di antara keduanya.

Daftar Pustaka

- A. Malik Fajar. "Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", <http://pcinu-mesir-tripod.com/>, diakses tanggal 12 Nov 2018
- A.M Saefuddin. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, t.th.
- Abuddin, dkk., *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- H. M. Zainuddin. *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi Ulul Albab*, Cet. 3. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Ashraf. *Konsep Universitas Islam*, ter. Machnun Husein. Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999.
- Imam Syafe'i. Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter, dalam *Jurnal, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8 Mei 2017.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Nurcholish Madjid. *Bilik-bilik Pesantren*, Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1998.
- M. Zainuddin. *Paradigma Pendidikan Terpadu Menyiapkan Generasi Ulul Albab*, Cet. 3. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

6

PERGURUAN TINGGI BERBASIS RISET

Muhamad Fatih Rusydi Syadzili

A. Pendahuluan

Pemerintah akan bekerja dengan baik guna memperbaiki mutu Perguruan Tinggi. Banyak Perguruan Tinggi yang sudah tidak memenuhi syarat pendirian direkomendasikan untuk ditutup. Guna mencapai tujuan pemerintah tersebut, sudah banyak insentif dan hibah disediakan oleh pemerintah, termasuk pembiayaan sarana dan prasarana agar mereka dapat memenuhi standar mutu.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk *World Class University*. The Times Higher Education Supplement (London) mensyaratkan empat hal, yakni kualitas riset dengan bobot 60%, kesiapan kerja lulusan (10%), pandangan internasional (*international outlook*) (10%), dan kualitas pengajaran (20%).

Academic Ranking of World Universities mematok lima syarat untuk *World Class University*, yaitu jumlah alumni/staf yang mendapat penghargaan internasional, jumlah peneliti (dosen) yang risetnya banyak dikutip peneliti lain, jumlah

artikel yang diindeks oleh jurnal yang telah ditentukan, persentase artikel yang dipublikasikan jurnal internasional, dan jumlah biaya riset Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dari beragam syarat itu, terdapat tiga syarat inti yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

1. Pertama, bagaimana perguruan tinggi merancang kegiatan riset yang dapat menghasilkan invensi dan inovasi kualitas dunia.
2. Kedua, bagaimana agar tulisan peneliti atau dosen dapat dipublikasikan oleh jurnal akademik internasional dan dapat menjadi referensi oleh peneliti dan dosen Perguruan Tinggi. Dan ketiga, bagaimana staf atau alumni suatu Perguruan Tinggi dapat meraih penghargaan-penghargaan bertaraf internasional.
3. Ketiga syarat inti tersebut, tampak bahwa unsur riset merupakan syarat terpenting dalam World Class University. Artinya, tanpa reputasi riset, sebuah Perguruan Tinggi tidak mungkin masuk peringkat dunia. Riset sudah menjadi kewajiban di dunia akademik, yang mana tradisi ini memang sudah ada sejak dulu kala.

Di Indonesia, tradisi riset masih perlu mendapat perhatian serius. Pada umumnya, Perguruan Tinggi kita masih dominan terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sementara kontribusinya terhadap kegiatan riset masih samar-samar.

Kiprah riset disini masih diposisikan sebagai '*academic exercises*', belum fokus pada usaha untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Padahal dalam konsep terkini, Perguruan Tinggi

sudah diposisikan menjadi pusat riset (*centre of excellent*), yang umumnya bekerja sama dengan industri.

B. Karakteristik Riset

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini diharapkan mampu menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam akan suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari kata bahasa Inggris *research* yang diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah “menyelidiki secara tuntas”

Perguruan tinggi, memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang berkaitan dengan pelaksanaan riset atau penelitian yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional.

Riset yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi, akan mampu menghasilkan berbagai inovasi yang menunjang daya saing antar industri baik skala nasional maupun internasional. Inovasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi akan mampu mengefektifkan proses produksi serta meningkatkan produktivitas bahkan penurunan biaya produksi, yang akhirnya akan memberikan efek berupa peningkatan daya saing produk industri.

Perguruan tinggi riset harus tetap melaksanakan dharma pendidikan dan pengajarannya, karena perguruan tinggi bertujuan mencetak sarjana, magister, atau doktor yang diproses melalui pendidikan dan pengajaran. Sarjana harus memiliki keterampilan dan keahlian yang menuntut proses pembelajaran yang komprehensif dalam memadukan unsur teori, teknologi, bahkan etika pengembangan profesi.

Upaya menciptakan keterkaitan dan kepadanan tersebut mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Tridharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan perekonomian dan pembangunan.¹

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dr. Muhammad Dimiyati, M.Sc., dalam Forum Komunikasi Pimpinan PTS Kopertis V (2015) menyatakan masih lemahnya bidang riset di perguruan tinggi. Kunci sukses bangsa terpendam dalam benak pengelola perguruan tinggi. Namun amatlah disayangkan, riset yang menjadi dasar dihasilkannya inovasi belum dapat terlaksana dengan baik. Hanya sedikit orang yang mau terjun untuk serius menggeluti dunia riset.² Hal

¹ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2007), h. 29.

² Kopertis V.. *Pengembangan PTS Yogyakarta Menghadapi Tantangan Global*. In *Warta Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015), h. 39.

tersebut menggambarkan begitu mendesaknya untuk segera melakukan transformasi dari perguruan tinggi pembelajaran menuju perguruan tinggi riset.

Proses mensinergikan dharma riset dalam pendidikan dan pengajaran menuju perguruan tinggi riset menjadi gagasan dasar dalam penyusunan artikel ini. Pembelajaran berbasis riset adalah model dalam integrasi riset dalam pembelajaran. Model ini dikembangkan dari filosofi dasar konstruktivisme pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa melalui empat aspek dasar yaitu memformulasi permasalahan, menyelesaikan permasalahan, analisis hasil permasalahan, dan mengkomunikasikannya.³ Tujuan penulisan artikel ini adalah merumuskan bagaimana model pembelajaran berbasis riset dalam implementasi perkuliahan di perguruan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tersebut, lulusan program sarjana dituntut memiliki ketrampilan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan dideskripsikan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Artinya, setiap perguruan tinggi tetap harus melaksanakan proses pembelajaran yang mampu mencetak lulusan dengan kualifikasi penguasaan keterampilan dan keahlian.

Efisiensi proses riset dan perkuliahan di perguruan tinggi riset harus benar-benar diperhatikan. Artinya, bagaimana fokus dharma riset yang dijalankan perguruan tinggi mampu bersinergi dalam menunjang proses pembelajaran. Ketika

³Widayati, D. T. et al., *Pedoman Umum Pembelajaran Berbasis Riset (PUPBR)* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), h. 35.

dharma riset serta pendidikan dan pengajaran mampu bersinergi. Hasil temuan riset atau tinjauan-tinjauan pustaka yang dilakukan dosen menjadi bahan dalam proses pembelajaran.

Mengutip kritik B.F. Skinner, seorang Psikolog Amerika, terhadap behaviorisme, Cesar Delgado mengatakan, bahwa behaviorisme memandang pembelajar sebagai kotak kosong untuk diisi oleh pengetahuan tanpa mempertimbangkan sama sekali pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Model pembelajaran semacam ini, kemudian akan menghasilkan pemahaman yang kecil-kecil, parsial⁴ dan tidak saling menyapa satu sama lain. Padahal belajar merupakan proses membangun pemahaman terhadap pengetahuan baru secara utuh, komprehensif dan holistik. Dengan demikian, posisi pengetahuan yang sudah mereka kuasai sebelumnya sangat penting untuk dikoneksikan dengan pengetahuan baru yang mereka pelajari.

Perguruan tinggi riset harus mampu mengelola hubungan antara dosen dan mahasiswa sehingga membentuk kelompok peneliti yang saling bersinergi. Proses pembelajaran menjadi salah satu forum komunikasi resmi antara keduanya. Ketika pembelajaran sudah berbasis riset, maka muatan komunikasi dalam forum tersebut berkaitan seputar riset yang meliputi permasalahan aktual, teori dan metodologi.

Proses pembelajaran dapat menjadi langkah awal terbentuknya kelompok peneliti antara dosen dan mahasiswa. Gagasan-gagasan selama proses pembelajaran dapat dikem-

⁴ Cesar Degaldo, *Development of a Research-Based Learning Progression for Middle School Through Undergraduate Students Conceptual Understanding of Size and Scale* (The USA: University of Michigan, 2009), h. 15.

bangkan menjadi topik-topik riset bagi keduanya. Mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan kompetensi riset melalui kompetisi hibah pada level masing-masing dan mampu bekerjasama dengan baik dalam proses skripsi, tesis, maupun disertasi. Kondisi tersebut mampu meningkatkan produktivitas perguruan tinggi dalam bidang riset sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.

Fokus riset adalah langkah yang harus segera dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Langkah tersebut diambil bukan semata-mata menjalankan dharmanya, tetapi dalam upaya meningkatkan level kompetensi lulusan. Perguruan tinggi yang berorientasi pada bidang riset akan menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang tangguh dan berkualitas, serta tidak semata-mata hanya sebagai pencetak ijazah dan lulusan dengan kualitas rendah. Di masa yang akan datang memasuki era industrialisasi dan modernisasi maka perguruan tinggi akan berperan serta sebagai pusat riset dan pengembangan IPTEK.⁵

Perguruan Tinggi, keberadaannya merupakan perwujudan eksplorasi berbagai gagasan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa yang terpampang di depan mata. Di antaranya adalah *Trans-Pacific Partnership (TPP)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *ASEAN Economic Community (AEC)*. Inovasi yang dilahirkan anak bangsa melalui riset yang dilakukan Perguruan Tinggi tidak akan dengan mudah ditiru dan disalahgunakan. Inovasi yang dilahirkan akan semakin unggul dalam skala nasional dan akhirnya mampu berkompetisi di pasar global.

⁵ Sarwono, O. J., *Bentuk Perguruan Tinggi Swasta di Masa Depan* (Jakarta: Universitas Komputer Indonesia, 2009), h. 75.

C. Elemen Kunci Kinerja Riset

Kinerja penelitian ditunjang oleh keberadaan pusat studi di lingkup perguruan tinggi. Sebagian besar pusat studi ditujukan untuk menghasilkan suatu kebijakan atau advokasi terkait bidang kajian tertentu. Sehingga luaran dari penelitian bersifat rekomendasi kebijakan yang sifat dasarnya berbeda dengan artikel ilmiah dalam jurnal.

Banyak peneliti mengkaji kaitan antara kinerja riset perguruan tinggi dan reputasi perguruan tinggi. Keunggulan dalam penelitian (*research excellence*) adalah sumber keunggulan kompetitif, yang membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasi, dan dengan demikian mampu menarik dana dan mahasiswa, serta karyawan berbakat.⁶ Keunggulan penelitian, sebagai bagian dari *tacit organizational knowledge*, ikut mendukung reputasi universitas.

Deduksi para ilmuwan terhadap realitas sudah selayaknya dihadapkan dengan kebenaran lain (kebenaran teologis, kebenaran antropologis, dan sebagainya), sehingga antar ilmu terjadi verifikasi, saling melengkapi, saling mengoreksi. Hanya dengan cara inilah manusia mampu memiliki visi luas tentang kenyataan yang terbentang di hadapannya. Inilah yang menjadi ciri kerja sebuah universitas.

Itulah sebabnya setiap perguruan tinggi dengan sendirinya akan berkembang menjadi perguruan tinggi riset. Perguruan tinggi riset memerlukan sosok yang mau berkonsentrasi sepenuhnya pada pengembangan ilmu. Perguruan tinggi riset selalu ditunjang oleh periset-periset ulung yang

⁶Li, X., Roberts, J., Yan, Y. dan Tan, H., Knowledge Sharing in China-UK Higher Education Alliances, *International Business Review*, Volume 23, Issue 2, April 2014, h. 343-355.

mendedikasikan dirinya pada eksplorasi dan kedalaman ilmu. Perguruan tinggi riset mesti didukung oleh periset-periset yang memperoleh kesenangan dalam memecahkan teka-teki kenyataan (*mystery of reality*). Ini semua mesti diawali dengan pembangunan kultur akademik atmosfer keilmuan di lingkungan universitas itu sendiri.

Riset terhadap suatu realitas melalui berbagai disiplin ilmu akan memperluas cakrawala pandang seseorang. Karena itu, tujuan pendidikan di universitas tak lain adalah memperluas wawasan pemikiran (*the enlargement of mind*) mengolah kemampuan berpikir (*cultivation of mind*) melalui suatu kebiasaan berpikir secara filosofis (*a philosophical habit of mind*).

Penelitian menjadi lebih fokus kepada kegiatan meneliti daripada administrasi. Pengelolaan kegiatan penelitian dapat secara nyata meningkat hasil keluarannya, karena pertanggungjawaban kegiatan penelitian akan lebih sederhana. Pelaksanaan anggaran berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Perguruan tinggi selaku pelaksana dalam kinerja riset universitas, pola pengembangan organisasinya masih sangat strukturalis, birokratis, kaku dan sentralistik.⁷ Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang ada diterapkan mulai dari aturan-aturan yang disatu sisi bisa dijadikan acuan oleh semua perguruan tinggi, namun disisi lain justru menghambat laju dan percepatan organisasi.

⁷ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2007), h. 177.

Linton, Tierney, dan Walsh menemukan adanya hubungan antara produktivitas riset dan peringkat reputasi universitas. Semakin banyak riset yang dihasilkan oleh peneliti universitas terbukti mampu mendorong perbaikan peringkat reputasi universitas tersebut. Menurut mereka, publikasi hasil riset di berbagai jurnal ilmiah internasional menyebabkan reputasi peneliti meningkat.⁸ Hal ini karena setiap publikasi ilmiah juga memasukkan nama institusi peneliti, sehingga reputasi institusi universitas pun akan ikut terangkat. Apalagi, berbagai lembaga pemeringkat universitas banyak yang menjadikan produktivitas ilmiah sebagai salah satu tolak ukur peringkat.

Dalam situasi tertentu, aliansi strategis (*strategic alliances*) juga kendaraan yang berguna yang dapat meningkatkan status dan reputasi di masyarakat akademik melalui penelitian kolaboratif,⁹ terutama ketika sekolah bisnis lokal menemukan mitra bergengsi global untuk kolaborasi. Aliansi global dalam riset ilmiah mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas riset ilmiah ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, universitas harus memastikan bahwa mitra aliansi memiliki reputasi riset yang bagus di tingkat internasional.

Dukungan yang bertujuan untuk sebuah orientasi internasional, dan reputasi internasional dari pengajar dan kualitas penelitian dan pendidikan merupakan bagian penting

⁸ Linton, J.D., Tierney, R., dan Walsh, S.T., What are Research Expectations? A Comparative Study of Different Academic Disciplines, *Serials Review*, Volume 38, Issue 4, December 2012, pp. 228-234.

⁹ Baden-Fuller, C. dan Hwee, A.S. (2001), "Building reputations: the role of alliances in the European business school scene", *Long Range Planning*, Vol. 34 No. 6, pp. 741-55.

dari strategi untuk membangun reputasi akademik internasional.¹⁰ Mengingat semakin tipisnya sekat dengan universitas di luar negeri akibat perkembangan teknologi internet, maka universitas mau tidak mau harus menjadi sebuah *global university*. Demikian pula, reputasi riset harus mengarah dan terkait dengan riset dan peneliti terkemuka di level global.

Terkait reputasi akademik,¹¹ menemukan bahwa riset kualitatif dan telaah literatur teridentifikasi mempengaruhi baik reputasi level program maupun reputasi level institusi. Kinerja riset yang baik juga berdampak besar dan signifikan pada pendanaan bisnis untuk universitas.¹² Oleh sebab itu, seorang peneliti harus memiliki perilaku yang bertanggung jawab melalui kontribusinya untuk karya ilmiah. Konsekuensi dari perilaku seperti ini menentukan peringkat tahunan yang mempengaruhi salary untuk produktivitas ilmiah dan secara umum reputasi universitas.¹³

D. Kekuatan Perguruan Tinggi Riset

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melakukan penyederhanaan skema riset di

¹⁰ Jurse, M. dan Mulej, M. (2011), "The complexities of business school alignment with the emerging globalisation of business education", *Kybernetes*, Vol. 40 No. 9/10, pp. 1440-1458.

¹¹ Finch, D.J., Hamilton, L.K., Baldwin, R. dan Zehner, M. (2013), "An exploratory study of factors affecting undergraduate employability", *Education + Training*, Vol. 55 No. 7, pp. 681-704.

¹² Muscio, A., Quaglione, D., dan Vallanti, G. (2013), "Does government funding complement or substitute private research funding to universities?", *Research Policy*, 42 (2013) pp. 63-75.

¹³ Urbanovic, J. dan Tauginiene, L. (2013), "Institutional Responsibility vs Individual Responsibility", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 81 (2013) pp. 72-78.

perguruan tinggi, hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas penelitian para peneliti di lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Perubahan tersebut meliputi jumlah skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi lebih sedikit, pengelompokan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tahapan seleksi, karakteristik skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rancangan pengaturan untuk luaran wajib dan luaran tambahan, dan lain-lain. Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tiga kategori, yaitu Kompetitif Nasional, Desentralisasi, dan Penugasan.¹⁴ Perubahan juga terjadi pada tahapan seleksi proposal penelitian. Tahapan pembahasan proposal dan kunjungan lapangan hanya dilakukan untuk skema penelitian pengembangan, adapun untuk skema lain tahapan seleksi yang dilaksanakan hanya evaluasi dokumen.

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - DRPM) untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan.

Perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang mengklaim memberi pengajaran pengetahuan universal. Tujuan perguruan tinggi adalah pencarian kebenaran. Kebenaran merupakan obyek pengetahuan. Kebenaran yang dimaksud adalah fakta-fakta dan berbagai macam hubungan yang berdiri satu sama lain secara harmoni sebagai subyek dan predi-

¹⁴ Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII*, 2018, IV.

kat dalam kaitan logis. perguruan tinggi meningkatkan kapasitas manusia dalam kerangka mencari kebenaran, baik kebenaran yang terpantul dalam keteraturan alam maupun yang mengatasi alam, yaitu kebenaran tentang sang Pencipta.

Perguruan tinggi akan kehilangan *raison d'être*-nya jika melepaskan diri dari tujuan asasi, pencarian kebenaran. Perguruan tinggi akan kehilangan esensinya jika hanya mengeruk keuntungan dari bidang-bidang ilmu yang mendatangkan uang dan kekuasaan. Terpinggirkannya cabang-cabang ilmu yang dinilai tidak produktif (baca, tak menghasilkan uang) seperti, filsafat, sejarah, antropologi, teologi atau ilmu-ilmu agama, merupakan *contradictio in terminis* sebuah perguruan tinggi yang mengklaim diri sebagai lembaga yang memberi pengajaran pengetahuan universal.

Transmisi kebudayaan merupakan peran penting sebuah universitas. Karena itu, ketika universitas mulai meninggalkan tugasnya sebagai agen transmisi kebudayaan dan melemparkan dirinya pada kepentingan praktis profesional pendidikan dan penelitian maka yang akan muncul adalah barbarisme.

Dunia dapat diselamatkan dari barbarisme peradaban hanya jika universitas dapat mempertahankan perannya sebagai garda depan penjaga kebudayaan. Melalui kebudayaan, manusia dapat memenuhi kebutuhan dirinya yang otentik dengan mengembangkan nilai-nilai dan karunia-karunia alamiah yang dimilikinya. Berdasar LSF Josephus yang menyatakan bahwa *education is not a matter of transferring knowledge, it is an ongoing formation in an ongoing process*.¹⁵

¹⁵LSF Josephus, "Redefining education as inherent to human growth", dalam The Jakarta Post, December 20, 2003.

Dalam perjalanannya perguruan tinggi selalu mengemban amanat kemanusiaan melalui proyek historis kebudayaan yang pernah menjadi fondasinya. Oleh karena itu berubahnya status dari institut menjadi universitas dan terintegrasikannya cabang-cabang keilmuan dalam UIN (Universitas Islam Negeri) hendaknya tidak menjadikan UIN mengikuti arus atau fenomena kapitalisasi universitas, pragmatisme pendidikan universitas yang sekarang sedang menggejala. Perguruan tinggi akan mengalami krisis, jika perguruan tinggi semakin jauh dari pengabdian pada masyarakat, dan jika semangat atau roh penelitiannya macet.

Skema riset hadir sebagai pendorong perguruan tinggi untuk terus bernovasi dan berinovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian skema riset itu merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian indikator riset yakni publikasi, kekayaan intelektual, dan proto-type industri.

Publikasi internasional Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia berada di posisi keempat ASEAN di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tahun 2016, publikasi internasional Indonesia mencapai 9.989, dan pada 2017 harus lebih tinggi. Pada 2019, publikasi internasional Indonesia harus bisa menjadi juara ASEAN.

Kemristekditi juga mendorong peningkatan capaian kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, dan perlindungan varietas tanaman.

E. Penutup

Dalam Riset yang dijalankan oleh perguruan tinggi telah menghasilkan berbagai inovasi yang menunjang daya saing antar industri baik skala nasional maupun internasional. Inovasi yang akhirnya akan memberikan efek berupa peningkatan daya saing produk industri.

Sehingga persaingan antar perguruan tinggi semakin keras dalam menarik mahasiswa baru. Melalui studi literatur ini, kami menemukan adanya pengaruh kinerja riset perguruan tinggi terhadap reputasi akademik perguruan tinggi. Demikian pula, reputasi akademik perguruan tinggi ditemukan memiliki efek terhadap pilihan universitas. Ada beberapa variabel pembentuk kinerja riset yaitu: keunggulan riset, kemampuan riset ilmiah, produktivitas riset, aliansi strategis melalui riset kolaboratif, kualitas riset, perilaku ilmiah yang bertanggung jawab, dan upah untuk produktivitas ilmiah. Selain itu, reputasi akademik bisa dibagi menjadi dua variabel yang membentuknya, yaitu: reputasi tingkat program, reputasi tingkat institusi, dan kinerja akademik.

Perguruan tinggi keberadaannya sangat menentukan buat para peneliti dalam menjalankan penelitiannya, ada sejumlah skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi lebih sedikit, pengelompokan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tahapan seleksi, karakteristik skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rancangan pengaturan untuk luaran wajib dan luaran tambahan, dan lain-lain.

Daftar Rujukan

- Agus Zaenul Fitri. *Organisasi Pembelajaran: Strategi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian Visi Lembaga Pendidikan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2007.
- Baden-Fuller, C. dan Hwee, A.S. "Building reputations: the role of alliances in the European business school scene", *Long Range Planning*, Vol. 34 No. 6, 2001.
- Cesar Degaldo. *Development of a Research-Based Learning Progression for Middle School Through Undergraduate Students Conceptual Understanding of Size and Scale*. The USA: University of Michigan, 2009.
- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. *Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi XII, 2018.
- Finch, D.J., Hamilton, L.K., Baldwin, R. dan Zehner, M. "An exploratory study of factors affecting undergraduate employability", *Education + Training*, Vol. 55 No. 7, 2013.
- Jurse, M. dan Mulej, M. (2011), "The complexities of business school alignment with the emerging globalisation of business education", *Kybernetes*, Vol. 40 No. 9/10.
- Kopertis V. *Pengembangan PTS Yogyakarta Menghadapi Tantangan Global*. In *Warta Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015.
- Li, X., Roberts, J., Yan, Y. dan Tan, H., Knowledge Sharing in China-UK Higher Education Alliances, *International Business Review*, Volume 23, Issue 2, April 2014.

- Linton, J.D., Tierney, R., dan Walsh, S.T. What are Research Expectations? A Comparative Study of Different Academic Disciplines, *Serials Review*, Volume 38, Issue 4, December 2012.
- LSF Josephus. "Redefining education as inherent to human growth", dalam *The Jakarta Post*, December 20, 2003.
- Muscio, A., Quaglione, D., dan Vallanti, G. "Does government funding complement or substitute private research funding to universities?", *Research Policy*, 42, 2013.
- Sarwono, O. J. *Bentuk Perguruan Tinggi Swasta di Masa Depan*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia, 2009.
- Tim Riset Mitra Knowledge Sector Initiative. *Studi Diagnostik Hambatan Riset pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Studi Kasus di Empat Universitas)*. Australia: Australian Aid, 2016.
- Urbanovic, J. dan Tauginiene, L. "Institutional Responsibility vs Individual Responsibility: Ethical Issues in the Management of Research Performance", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 81, 2013.
- Widayati, D. T. et al. *Pedoman Umum Pembelajaran Berbasis Riset (PUPBR)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010.

BAB IV

KEBIJAKAN STRATEGIS
PENDIDIKAN TINGGI
ISLAM

1

HUBUNGAN PERGURUAN TINGGI DENGAN MARKET DAN BISNIS

Siti Marfu'ah

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan dapat membawa perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis.

Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi pada masa revolusi global dewasa ini antara lain) antara lain adalah: (a) *High quality of human resources* yang diperlukan untuk mendorong pendidikan menjawab berbagai tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, (b) *High capacity of management* yang intinya profesionalisme yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajemen untuk bersaing di pasar global, (c) Internasionalisasi sebagai akibat terbukanya perguruan tinggi dan sebagai akibat *networking* yang dibangun oleh perguruan tinggi, dan (d) Daya saing global yang masuk

ke dunia pendidikan tinggi, maka untuk dapat memposisikan lembaga pendidikan tinggi sejajar dengan perguruan tinggi dunia, maka diperlukan berbagai perubahan dan strategi dan dalam meningkatkan profesionalisme dalam manajemen.¹

Dunia pendidikan telah mengalami evolusi secara kontinyu, salah satu faktor pemicunya adalah kompetisi antar perguruan tinggi yang semakin ketat. Maka di sini pemasaran menjadi unsur yang strategis dalam menjaga keberadaan perguruan tinggi agar tetap bisa bertahan hidup dengan layak (*survive*) di tangan-tengah permintaan jasa pendidikan tinggi yang semakin meningkat saat ini.

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia yang siap pakai dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan dunia bisnis (dunia usaha dan dunia industri). Maka program dan produk perguruan tinggi harus dipasarkan secara luas agar dikenal oleh penggunanya. Program studi yang ada di perguruan tinggi juga harus menyesuaikan dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat pengguna.

B. Hubungan Perguruan Tinggi dan Market

Masih rendahnya kemampuan perguruan tinggi Indonesia dalam menghasilkan keluaran sumber daya manusia berkualitas berawal pada kondisi PT yang tidak memiliki kemampuan dalam memformulasi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi untuk

¹ Moh. Fakry Gaffar, *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia* (Bandung: UPI PRESS, 2004), h. 28.

terciptanya *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia usaha belum sepenuhnya dijalankan. Pengangguran jumlah sarjana dari tahun ke tahun jumlahnya senantiasa melonjak drastic, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kualifikasi yang dibutuhkan sektor industry dan jasa di masyarakat, akibatnya timbul masalah ketika lulusan perguruan tinggi tersebut ingin mencari pekerjaan.

Market atau pasar dalam pengertian dasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Pada masa lampau pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain. Sehingga sekarang ini pasar diartikan sebagai salah satu dari berbagai system, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Di pasar inilah terjadi proses pemasaran.

Dalam pendidikan, pemasaran dapat dilihat dari adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari para penyelenggara pendidikan untuk menggali keunikan dan keunggulan dari perguruan tinggi atau sekolah agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh para pengguna jasa pendidikan. Untuk menarik calon peserta didik diperlukan strategi pemasaran yang bukan saja menjual jasa pendidikan secara apa adanya melainkan bagaimana mendekati pendekatan sesuai dengan keinginan dan kepuasan konsumen. Sebuah lembaga yang ingin sukses

untuk masa depan dalam menghadapi persaingan, harus mempraktekkan pemasaran secara terus menerus.²

Ikhtiar mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.³

Implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan social kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional muslim.

² Imam Faizin, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah. *Jurnal Madaniyah*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017, h. 261-287.

³ TimPenyusun. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti. Ditjen Pendis Kemenag RI: 2018. h. 1.

Lulusan PTKI juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Untuk itu, PTAI dituntut melakukan perubahan orientasi dengan mangantisipasi perubahan pasar tenaga kerja, sekaligus juga perubahan akan produk-produknya. Upaya untuk mencetak sarjana “siap pakai” dan mandiri akan menjadi tuntutan dan harapan pada PTAI. Di sini PTAI harus lebih bersifat akomodatif. Namun demikian, sebagai lembaga ilmiah, pada waktunya nanti, PTAI dituntut bersifat aktif dan kreatif untuk dapat berusaha mempengaruhi pasar dan arah perubahan sosial.⁴

Konsep *link and match* sebenarnya bukan barang baru dalam dunia pendidikan. Sejak awal abad ke-20, dalam teori belajar ada terminologi yang bersumber dari aliran belajar behavioral yang pada hakekatnya juga merupakan refleksi konsep *link and match*. Terminologi itu kemudian dikenal dengan *learning by doing*. Terminologi ini menghendaki agar proses belajar berjalan sambil melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Dengan cara seperti itu orang yang sedang belajar memiliki pengalaman aktual, empirik dan nyata dalam proses belajarnya. Jika sambil belajar kita dapat memperoleh pengalaman nyata dan aktual, pada hakekatnya proses itu juga mencerminkan keadaan *link and match*.

Hendaknya pendidikan, terutama perguruan tinggi, direncanakan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali merencanakan jenis pendidikan di tingkat manapun yang tidak terkait dengan

⁴ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran: Strategi memberdayakan dan mempercepat pencapaian visi lembaga pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 200.

kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Jika suatu lembaga pendidikan menyelenggarakan suatu program akademik yang tidak berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja di masyarakat, maka lembaga tersebut berarti akan mencetak pengangguran. Kalau hal itu terjadi, jelas Perguruan Tinggi itu tidak mampu mencapai tingkat relevansi pendidikan yang tinggi, dan dengan demikian telah masuk dalam kondisi yang *misslink and mismatch*.

Di kalangan PTKI sekarang ini, ada beberapa prodi yang kalau dihubungkan dengan kebutuhan di pasar atau di masyarakat pengguna masih perlu dipertanyakan spesialisasi keahliannya dan kekhususannya di dunia kerja, seperti prodi HKI (hukum Keluarga Islam yang dulu bernama *Akhwalus Syakhsiiyyah*), KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam), dsb.

Harapannya yang ideal, implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkibrah dalam kehidupan social kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional muslim. Lulusan PTKI juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.⁵

Program dan produk perguruan tinggi harus dipasarkan secara luas agar dikenal oleh penggunanya. Hal ini penting karena bagaimanapun baiknya program dan produk yang

⁵ Tim Penyusun, *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti*. Ditjen Pendis Kemenag RI: 2018. h. 2.

ada, kalau tidak dikenal masyarakat luas sebagai buyers, maka program dan produk tersebut lambat dikenal. Dampaknya, perguruan tinggi tidak atau kurang mendapatkan peminat dan produknya kurang dapat dipasarkan. Berbagai cara dapat ditempuh untuk memperluas pasar dari program yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan, antara lain:

- Banyak publikasi ilmiah yang dimuat di Jurnal, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional Banyak dosen yang membawakan makalah ilmiah yang disampaikan di berbagai forum ilmiah, apakah itu seminar, pelatihan, kuliah tamu atau lainnya di tingkatan nasional maupun internasional.
- Banyak buku-buku dan karya ilmiah lain yang ditulis oleh dosen.
- media, baik elektronik maupun media cetak.
- Banyak dosen yang ditugaskan di berbagai lembaga lain sebagai *seconded employees* (tenaga pinjaman).
- Banyak memproduksi buku, jurnal ilmiah, atau informasi yang lain. Memperkuat website perguruan tinggi yang bersangkutan dengan selalu memperbarui isinya, dan seterusnya.

Pada dasarnya, tujuan pemasaran perguruan tinggi bukanlah untuk sekedar memuaskan pelanggan saja, tetapi juga untuk kepentingan institusi itu sendiri. Pemasaran juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan mahasiswa dalam perkuliahan, misalnya diajar oleh dosen yang profesional, sarana dan prasarana memadai, kurikulum yang kompetitif, strategi pembelajaran yang efektif, dan lain-lain. Sebaliknya pemasaran juga bertujuan untuk menjaga kepentingan

institusi seperti menjamin kesejahteraan dosen dan karyawan, meningkatkan citra institusi dan mempercepat pengembangan perguruan tinggi.

Menurut Faizin,⁶ pemasaran dalam dunia pendidikan sudah merupakan suatu keharusan. Dalam dunia pendidikan, pemasaran dapat diadopsi sebagai suatu proses kegiatan kependidikan untuk menempatkan lembaga pendidikan sebagai komoditas yang menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat. Terdapat dua elemen penting dalam upaya memasarkan lembaga pendidikan, pertama adalah baiknya kualitas komunikasi dan promosi sebuah lembaga pendidikan. Kedua, kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan.

C. Hubungan Perguruan Tinggi dan Bisnis

Kata bisnis secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan secara terminology bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang/jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.⁷

⁶ Imam Faizin, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah, *Jurnal Madaniyah*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017, h. 261-287.

⁷<https://www.maxmanroe.com/vid>. Pengertian Bisnis: Tujuan fungsi, dan Macam-macam Bisnis. Diakses pada 18-11-2018 jam 16.45

Tujuan utama dari semua bisnis adalah untuk mendapatkan laba (profit) dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa tujuan bisnis adalah sebagai berikut:

- untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis
- untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- untuk mencapai kesejahteraan pemilik factor produksi dan masyarakat
- menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
- untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang
- untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum
- untuk menunjukkan prestise dan prestasi.

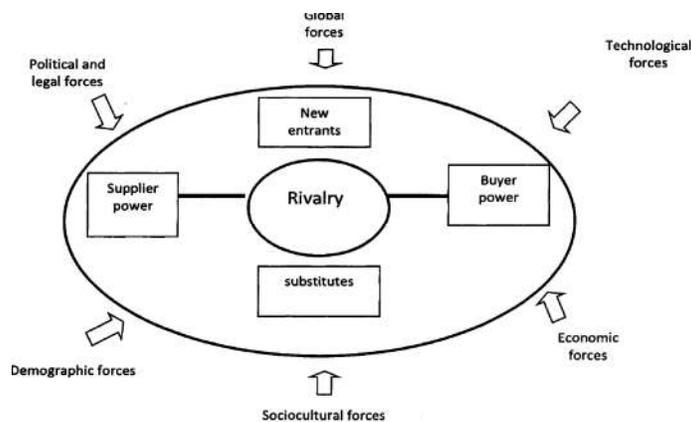
Dalam persaingan global, di mana perubahan lingkungan bisnis yang terjadi berlangsung dengan cepat dan dinamis. Para pelaku bisnis dihadapkan pada pilihan untuk menciptakan keunggulan produk, pengembangan pasar, inovasi yang memuaskan pelanggan dan perkembangan suatu bisnis.⁸ Demikian pula dalam perguruan tinggi, dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Sebagai lembaga penjual jasa (*service industry*), Perguruan Tinggi Islam harus mengetahui trend pasar ketika harus memasarkan jasa atau layanannya. Hal ini agar jasa yang dijual

⁸ Budiono, dan Sri Lasmi Pardanawati. Strategi dan Persaingan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 15 no 01, Juli 2014, h. 70-80.

atau dipasarkan dapat diterima oleh pembeli atau konsumen. Indikator bahwa jasa yang dijual laku adalah ketika jasa yang ditawarkan banyak diminati oleh masyarakat pengguna jasa.⁹

Dalam dunia bisnis dan industri, kompetisi itu melekat dengan gerak langkah bisnis dan industri. Untuk menganalisis kekuatan kompetitif dalam sebuah lingkungan industri agar perusahaan dapat mengenali kesempatan dan ancaman yang sedang dihadapi. Peter¹⁰ mengembangkan lima kekuatan yang membentuk kompetisi dalam sebuah industri: (1) ancaman para pesaing baru; (2) tingkat persaingan diantara perusahaan - perusahaan yang didirikan dalam sebuah industri; (3) kekuatan penawaran dari para pembeli; (4) kekuatan penawaran dari para supplier; dan (5) ancaman produk - produk pengganti. Kelima dorongan/ atau kekuatan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



⁹ Fauzi. Revitalisasi Sistem Pemasaran Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, *Jurnal Insania*. Vol. 14|No. 1|Jan-Apr 2009, h. 1-15.

¹⁰ Hill, Charles W.L. Jones, Gareth R. & Galvin, Peter. *Strategic Management : an Integrated Approach* (Australia: Houghton Mifflin, 2002), h. 83.

1. Ancaman para pesaing baru

Sebagaimana diindikasikan bahwa tingkat apresiasi terhadap perguruan tinggi akan semakin tinggi, maka pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam berbagai bentuknya (universitas, institut, sekolah tinggi atau politeknik) akan semakin terbuka, bahkan para pelaku bisnis membuka lembaga-lembaga pendidikan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka dan memanfaatkan sendiri lulusannya untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri. Maka kondisi ini memicu perguruan tinggi untuk berlomba untuk menawarkan yang terbaik yang dapat diterima oleh umum. Lulusan yang dihasilkan, produk ilmu pengetahuan yang diciptakan, dan berbagai hal lainnya yang merupakan produk yang diperlukan dan ditawarkan kepada umum, perguruan tinggi harus berkompetisi dengan rekan perguruan tinggi lainnya. Kompetitor, seperti perguruan tinggi lain, berbagai lembaga pendidikan yang bertaburan di masyarakat, social and political organizations, dan seluruh kekuatan yang ada di pasar, perlu dikaji dan pasar bebas perlu diketahui dengan jelas sehingga tidak salah dalam menetapkan strategi untuk memasuki pasar.

2. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang berdiri

Dalam melaksanakan misi dan fungsi pokoknya, perguruan tinggi memerlukan *resources*, baik yang sifatnya tangible maupun intangible yang juga diperlukan oleh perguruan tinggi lain. Demikian pula dalam memasarkan program, lulusan, produk ilmu pengetahuan dan berbagai hal lainnya, perguruan tinggi berkompetisi dengan rekan perguruan tinggi lainnya. Dalam upaya untuk memperoleh

revenue yang lebih besar, setiap perguruan tinggi juga harus bersaing untuk mendapat dana sebanyak mungkin. Artinya perguruan tinggi sulit melepaskan diri untuk tidak ber-kompetisi selama perjalanan hidupnya.

3. Kekuatan penawaran dari para supplier

Para supplier dapat dipandang sebagai ancaman ketika mereka mampu untuk mendorong harga yang perusahaan harus bayar atas input atau mampu untuk mengurangi kualitas input yang mereka Suplai, karena itu menekan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, jika supplier lemah, maka perusahaan mempunyai kesempatan untuk mendorong harga dan permintaan lebih tinggi kualitas input. Perguruan tinggi dapat di analogikan seperti perusahaan, dimana perguruan tinggi memerlukan hubungan dengan para pemasok. Para pemasok baik dalam bidang jasa ataupun barang sebagai input dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bila para pemasok ini tidak ada, maka seperti halnya proses industri, aktivitas perguruan tinggi pun akan berhenti.

4. Kekuatan Penawaran para pembeli

Kita ketahui bahwa produk-produk perguruan tinggi mencakup ilmu pengetahuan, penelitian, layanan-layanan jasa konsultasi, lulusan, program-program, itu semua diperlukan pembeli-pembeli untuk produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Para pembeli dapat dipandang sebagai ancaman kompetitif ketika mereka berada pada posisi meminta harga lebih rendah dari perguruan tinggi atau ketika meminta pelayanan yang lebih baik (yang dapat meningkatkan biaya operasi). Di sisi lain, ketika para pembeli lemah, sebuah

perguruan tinggi dapat meningkatkan harga dan mendapatkan profit yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjual produk-produk perguruan tinggi tersebut, agar dapat mempengaruhi pembeli, misalnya melalui sosialisasi, *marketing* dan lain-lain.

5. Produk - produk pengganti

Kekuatan akhir dalam model Porter adalah ancaman produk - produk pengganti. Produk - produk pengganti dan pelayanan memenuhi fungsi yang sama dan dapat membentuk alternatif realistik pada produk atau pelayanan dihasilkan oleh sebuah industri. Ketika pengganti secara realistis ada, mereka menciptakan sebuah batas paling atas pada harga dimana industri dapat terserang, karena harga di bawah poin tertentu akan mengarahkan pengalihan konsumen pada pengganti.

Substitutes yang dimaksud dalam dunia pendidikan misalnya, dulu kompetitor bagi perguruan tinggi adalah perguruan-perguruan tinggi yang ada dengan berbagai bentuknya (universitas, politeknik, sekolah tinggi). Sekarang muncul kompetitor baru dalam bentuk bukan perguruan tinggi, tetapi lembaga-lembaga pelatihan yang menawarkan program pendidikan dan latihan yang singkat, dan lulusan dapat segera memperoleh pekerjaan karena mereka punya link yang lebih tertata.

Di samping kelima kekuatan yang terus menerus menekan setiap langkah dari keberadaan perguruan tinggi, dalam prakteknya perguruan tinggi ditempatkan pada makro lingkungan yang lebih luas; ekonomi yang lebih luas, teknologi, demografi sosial, politik dan lingkungan resmi (seperti

pada gambar di atas). Perubahan dalam makro lingkungan dapat mempunyai dampak langsung pada salah satu dari kekuatan dalam model Porter, karena itu merubah kekuatan relatif dan dengannya, kemenarikan dalam sebuah industri.

Pemahaman seluruh lingkungan dimana sebuah perguruan tinggi berjalan melibatkan scanning (membaca sekilas), monitoring, meramalkan dan menilai kekuatan yang memungkinkan untuk bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi perguruan tinggi. Sebuah perguruan tinggi harus teratur scan (melihat sekilas) makro lingkungan untuk signal perubahan lingkungan atau tren umum yang terjadi. Dalam mengamati sebuah trend yang mengarah pada perubahan lingkungan yang relevan, perguruan tinggi perlu untuk memonitor perubahan sehingga mempunyai pemahaman lebih baik dari sifat tetap atas perubahan dan apakah diterapkan pada organisasi. Jika proses monitoring menyarankan bahwa perubahan adalah relevan, maka perguruan tinggi perlu meramalkan bagaimana perubahan akan mempengaruhi kerja di masa depan.

D. Penutup

Pendidikan tinggi dituntut mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja (pasar/market). Oleh karena itu, Implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI, sehingga PTKI mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai di masyarakat, dan kemudian harus dipasarkan secara luas agar dikenal oleh penggunanya.

Beberapa Prodi PTKI sekarang ini, kalau dihubungkan dengan kebutuhan di pasar atau di masyarakat pengguna ada yang masih perlu dikaji ulang keberadaannya. Lulusan PTKI pada suatu prodi tertentu mestinya harus mempunyai pangsa pasar yang jelas dan memang dibutuhkan di masyarakat. Karena kalau hal ini dibiarkan terus menerus, pada akhirnya hanya akan memperbanyak jumlah pengangguran di masyarakat. Hendaknya perguruan tinggi menyusun program kegiatan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyusun rencana yang tidak terkait dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat.

Dalam hubungannya dengan bisnis, perguruan tinggi dituntut untuk menciptakan keunggulan produk berupa mutu lulusan yang unggul, pengembangan pasar, inovasi yang memuaskan pelanggan dan perkembangan suatu bisnis. Selanjutnya, terdapat lima kekuatan yang membentuk kompetisi dalam sebuah industri: (1) ancaman para pesaing baru; (2) tingkat persaingan di antara perusahaan - perusahaan yang didirikan dalam sebuah industri; (3) kekuatan penawaran dari para pembeli; (4) kekuatan penawaran dari para supplier; dan (5) ancaman produk - produk pengganti, tentunya dengan tetap mempertimbangkan lingkungan makro di mana perguruan tinggi berada.

Daftar Pustaka

Budiono, dan Sri Lasmi Pardanawati. Strategi dan Persaingan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Vol. 15 no 01, Juli 2014). ISSN: 1412-6029X.

- Faizin, Imam. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikandalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah. *Jurnal Madaniyah*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017. ISSN (online): 2548-6993 .
- Fauzi. Revitalisasi Sistem Pemasaran Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi. *Jurnal Insania*. Vol. 14 | No. 1 | Jan-Apr 2009 | 111-131.
- Fitri, Agus Zaenul. *Organisasi Pembelajar: Strategi memberdayakan dan mempercepat pencapaian visi lembaga pendidikan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press. 2017.
- Gaffar, Moh. Fakry. *Membangun Pendidikan Nasional Untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia*. Bandung: UPI PRESS. 2004.
- Hill, Charles W.L. Jones, Gareth R. & Galvin, Peter. *Strategic Management: an Integrated Approach*. Australia: Houghton Mifflin. 2002.
- <https://www.maxmanroe.com/vid>. *Pengertian Bisnis: Tujuan fungsi, dan Macam-macam Bisnis*. Diakses pada 18-11-2018 jam 16.45.
- Tim Penyusun. *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti*. Ditjen Pendis Kemenag RI: 2018.

2

PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Muhammad Fadhli

A. Pendahuluan

Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang disibukkan dengan persiapan menuju revolusi industri atau yang biasa dikenal dengan revolusi industri (*industrial revolution*) 4.0 (4IR), era disrupsi (*disruption era*) atau revolusi digital (*digital Revolution*). Karena merupakan revolusi industri yang terbaru, 4IR menjadi salah satu topik yang paling banyak di diskusikan, diseminarkan dan dikaji di kalangan industri dan akademisi di seluruh dunia. 4IR memiliki peran dan fokus dalam upaya digitalisasi semua tahap produksi dan sistem layanan pada organisasi. Hal ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi sumberdaya, peningkatan produktifitas baik secara kualitas dan kuantitas serta upaya peningkatan daya saing organisasi.

Sejarah singkat terjadinya revolusi industri sebelum 4IR tentunya dimulai dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0, baru kemudian hingga industri 4.0. Setiap bergantinya revolusi industri dari yang pertama sampai keempat tentunya ditandai adanya perubahan-perubahan yang nyata. Industri 1.0 ditandai

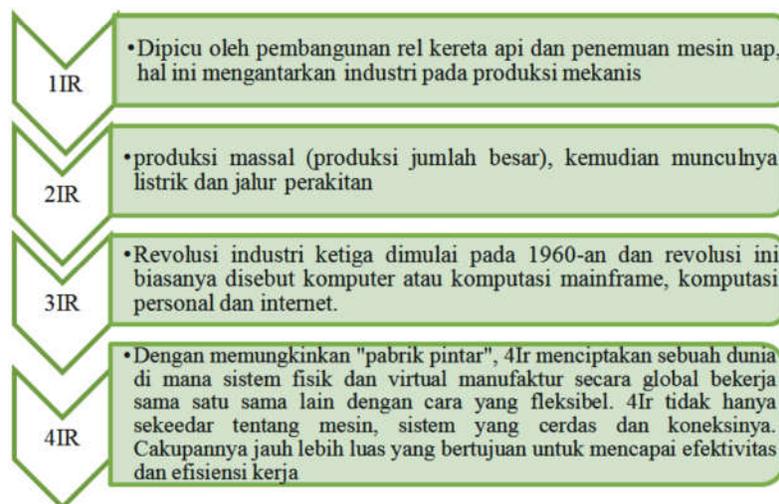
dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. selanjutnya Industri 4.0 hadir yang ditandai dengan *cyber* fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur.¹

Lebih rinci Schwab menguraikan revolusi industri pertama terjadi sekitar 1760 hingga sekitar 1840. Dipicu oleh pembangunan rel kereta api dan penemuan mesin uap, hal ini mengantarkan industri pada produksi mekanis. Revolusi industri kedua, yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20, yang ditandai dengan dimungkinkannya produksi massal (produksi jumlah besar), kemudian munculnya listrik dan jalur perakitan. Revolusi industri ketiga dimulai pada 1960-an dan revolusi ini biasanya disebut komputer atau komputasi mainframe (1960-an), komputasi personal (1970-an dan 80-an) dan internet (1990-an). Selanjutnya 4IR diawali di Jerman pada saat ada diskusi tentang “Industri 4.0”, istilah ini diciptakan pada sebuah pameran di Hannover pada tahun 2011 untuk menggambarkan bagaimana merevolusi serangkaian kerja organisasi. Dengan memungkinkan “pabrik pintar”, 4IR menciptakan sebuah dunia di mana sistem fisik dan virtual manufaktur secara global bekerja sama

¹ Muhammad Yahya, Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Professor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar*. Tanggal 14 Maret 2018.

satu sama lain dengan cara yang fleksibel. 4IR tidak hanya sekeedar tentang mesin, sistem yang cerdas dan koneksinya. Cakupannya jauh lebih luas yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja.²

Untuk lebih jelasnya tahapan revolusi industri dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahpan Revolusi Industri

Walaupun 4IR merupakan topik utama dan menjadi prioritas di berbagai perusahaan, menjadi pusat kajian para praktisi dan akademisi, dan prioritas perguruan tinggi untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia kerja serta menjadi fokus organisasi publik lainnya, namun tidak ada defenisi secara istilah yang dapat digunakan dan diterima secara umum. Hermann, Pentek, dan Otto memberikan defenisi "*industrie*

² Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution-The Fourth Industrial Revolution* (Switzerland: World Economic Forum, 2016), pp. 11-12.

4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization.³ Defenisi ini menjelaskan bahwa 4IR adalah sebuah istilah yang kolektif untuk teknologi dan merupakan rangkaian konsep nilai organisasi.

4IR diwujudkan dengan kombinasi berbagai teknologi fisik dan digital. Schwab mengidentifikasi komponen-komponen dalam 4IR yaitu: *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), robotik, internet of things (IoT), autonomous vehicles (transporstasi mandiri/tanpa awak), pencetakan 3D, nanoteknologi, bioteknologi, *materials science*, penyimpanan energi dan *quantum computing*⁴. Selanjutnya Ustundag dan Cevikkan mengatakan 4Ir ditandain dengan teknologi fisik dan digital seperti kecerdasan buatan, *cloud computing*, penggunaa robot, *augmented reality*, manufaktur aditif, dan *Internet of Things* (IoT).⁵

Disamping faktor-faktor menjadikan yang ditawarkan oleh 4IR sebenarnya ada masalah besar yang akan ditimbulkan jika tidak diantisipasi dengan benar, cepat, dan efektif oleh pembuat kebijakan. *The Mckinsey Global Institute* merilis laporan 2017, yang melakukan penelitian tentang pemanfaatan otomatisasi pekerjaan di masa depan, data menunjukkan bahwa 50% atau setara dengan 328,9 juta karyawan pada bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, dapat di-

³ Mario Hermann, Tobias Pentek dan Boris Otto. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No. 01/2015. Technise universitat of dortmund. (https://www.thiagobranquinho.com/wp-content/uploads/2016/11/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf) di ases 17 November 2018.

⁴ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution-The Fourth Industrial Revolution* (Switzerland: World Economic Forum, 2016), pp. 7.

⁵ Alp Ustundag dan Emre Cevikkan, *Industry 4.0: Managing The Digital Transformation* (Switzerland: Springer, 2018), pp. v.

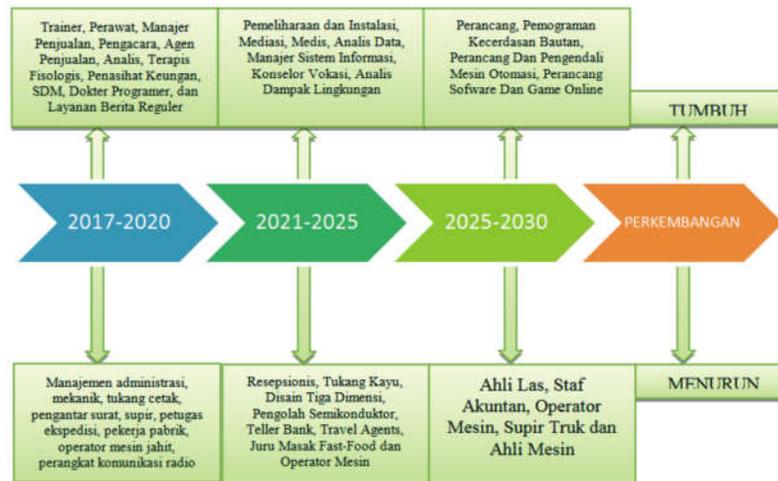
otomatisasi. Hal yang sama terjadi pada industri manufaktur atau pabrik 64% (237,4 juta orang), perdagangan ritel, 54% (187,4 juta orang) dapat di otomatisasi oleh alat.⁶ Data lainnya menunjukkan bahwa jenis pekerjaan manajer administrasi, sopir, tukang cetak, pengantar surat, resepsionis, agen perjalanan, operator mesin, operator bank, juru masak makanan cepat saji, dan ahli las juga akan menerima dampak dari perkembangan industri pada era 4IR ini.⁷ Walaupun tidak semua pekerjaan yang dapat di lakukan secara otomatisasi/digital tetapi semuanya akan berubah. Data ini sebenarnya dapat menjadi tolak ukur kebijakan semua pihak yang berkepentingan. Karena jika tidak diantisipasi hal ini akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat tradisional.

Namun kompensasi dari hilangnya pekerjaan “tradisional” tersebut akan di gantikan oleh jenis dan tipe pekerjaan lainnya. Pekerjaan baru ini tentunya memiliki karakteristik dan kompetensi yang berbeda. Lebih jelasnya jenis pekerjaan yang akan tumbuh dan menurut dapat dilihat pada gambar berikut:

⁶ Nancy W. Gleason. Introduction. Dalam Nancy W. Gleason (Ed). Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. (Singapore: Springer, 2018), 1-12. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0>.

⁷ Ridwan Aji Pitoko. 57 Persen Pekerjaan Sekarang akan Tergerus Revolusi Industri 4.0. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/210000326/57-persen-pekerjaan-sekarang-akan-tergerus-revolusi-industri-4.0>) di akses 17 Novemer 2018.

Transformasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam



Gambar 2. Jenis Pekerjaan 2017-2030 (Barengbang, Kemenaker)

Revolusi industri 4.0 merupakan tuntutan arus globalisasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan sesuai tuntutan 4IR. Memang saat ini belum begitu terasa, namun revolusi ini pasti terjadi seperti yang terjadi pada revolusi industri sebelumnya, dampaknya akan muncul di tahun-tahun mendatang. Gleason meyakini saat ini sebagian besar negara-negara di dunia telah bersiap untuk perubahan yang akan datang, dan pendidikan merupakan pemain kunci dalam upaya menghadapi perubahan tersebut.⁸ Pernyataan Gleason ini sangat wajar karena perguruan tinggi memang menjadi harapan ujung tombak dalam menghasilkan tenaga kerja

⁸ Nancy W. Gleason. Introduction. Dalam Nancy W. Gleason (Ed). Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. (Singapore: Springer, 2018) 1-12. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0>

yang terampil dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi jika pendidikan tinggi tidak menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing maka Indonesia akan tertinggal.

Indonesia sendiri telah berupaya mengikuti perkembangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sudah dan akan terjadi. Salah satu bukti yang dapat dilihat tentang pentingnya perhatian Indonesia yaitu Presiden meresmikan *Making Indonesia 4.0* sebagai peta jalan (*roadmap*) Industri 4.0. Hal ini dilakukan sebagai bentuk agar Indonesia mampu bersaing secara global. Berdasarkan pernyataan Gleason di atas, maka untuk menjadikan Indonesia berhasil menyesuaikan diri dengan 4IR maka pemerintah dan perguruan tinggi harus melakukan kolaborasi terutama dalam penyiapan SDM.

Pertanyaan besarnya adalah apakah perguruan tinggi Indonesia sudah siap atau disiapkan untuk menghadapi 4IR? Pertanyaan ini mungkin belum dapat dijawab saat ini. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat pendidikan tinggi dunia seperti: *Times Higher Education* (THE) dan *webometrics* perguruan tinggi Indonesia tidak ada yang berada di level 100 besar dunia bahkan Asia. Universitas Indonesia hanya mampu menempati peringkat 800an dan UI merupakan perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Dapat dibayangkan level perguruan tinggi lainnya yang berada di luar pulau Jawa termasuk PTKI.

Perguruan tinggi harus mempersiapkan dan dipersiapkan secara maksimal untuk menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0. beberapa hal yang harus disesuaikan adalah: kompetensi Dosen yang sesuai, kurikulum dan model pembelajaran yang efektif sehingga lulusan/outcome relevan dengan per-

mintaan dunia/lapangan kerja. Selain itu penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dapat bermanfaat dan diakui oleh dunia.

B. Kompetensi Dosen di Era Industri 4.0

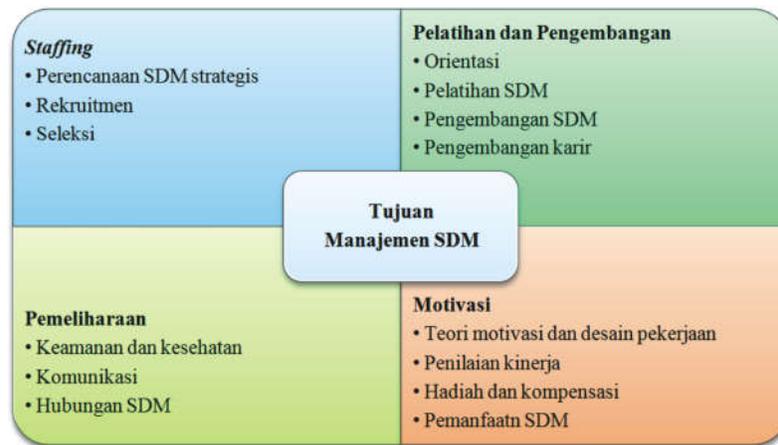
Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jadi dosen memiliki jabatan tertinggi sebagai profesor.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu menjawab tuntutan 4IR, dosen merupakan salah satu komponen penting. Bahkan dapat dikatakan kualitas perguruan tinggi bergantung pada kualitas dosennya. Karena jika dosen tidak berkualitas, maka proses pembelajaran tidak akan baik, penelitian yang dihasilkan tidak akan mencapai kualitas yang diakui dunia. Untuk itu pengelolaan dosen sebagai SDM utama dalam pendidikan tinggi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip Manajemen SDM.

Dessler menjelaskan Manajemen SDM adalah "*the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relations, health and safety, and fairness concerns*".⁹ Defenisi ini sebenarnya menegaskan bahwa

⁹ Gary Dessler. *Human Resource Management* (USA: Pearson, 2017), h. 3.

dalam pengelolaan SDM harus dilakukan dengan komprehensif mulai dari proses awal penerimaan sampai pembinaannya. DeCenzo, Robbins dan Verhulst menggambarkan untuk mencapai tujuan Manajemen SDM terhimpun bagian dari empat fungsi, yaitu, melalui *Staffing*, pelatihan dan pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan,¹⁰ seperti dalam gambar berikut:



Gambar. 3 Kegiatan Utama Manajemen SDM

Dalam upaya pencapaian tujuan Manajemen SDM selain faktor internal di atas ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen SDM, yaitu: hubungan kerja (organisasi profesi), praktik manajemen, peraturan pemerintah, dan globalisasi.

Namun pada kenyataannya sistem manajemen SDM pendidikan tinggi di Indonesia belum sesuai dengan prinsip-

¹⁰David A. DeCenzo, Stephen P. Robbins, dan Susan L. Verhulst. *Fundamentals of Human Resource Management* (New Jersey: Wiley, 2013), h. 34.

prinsip manajemen SDM yang baik. Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Gardiner dkk adalah sebagai berikut:

Dalam perekrutan dosen PTN misalnya, sistemnya masih disamakan dengan ASN lainnya yang tidak berdasarkan kompetensi atau potensi yang dimilikinya. Kemudian masalah lainnya sistem remunerasi karena pada umumnya pemberian *reward* (penghargaan) masih berdasarkan senioritas tanpa mempertimbangkan penilaian kinerja. Yang lebih menyedihkan lagi, di era reformasi birokrasi yang sedang bergulir saat ini, sistem remunerasi pun dihubungkan dengan presensi, atau yang lebih dikenal dengan sistem *finger print* dan diberlakukan kepada semua instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Dosen pun “dipaksa” mengikuti sistem *finger print*, yang mewajibkan dosen datang pagi hari dan pulang sore hari. Tidak berbeda dengan sistem perekrutan dan sistem remunerasi, sistem pengembangan sumber daya manusia pada perguruan tinggi pun masih berada di tingkat administratif saja. Pelatihan-pelatihan yang disediakan bagi dosen lebih untuk memperoleh angka kredit, dan bukan pelatihan yang dapat menunjang kompetensi dosen untuk melakukan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan strategis perguruan tinggi tersebut.¹¹

Masalah yang sama disampaikan oleh Makin yang menyatakan bahwa banyak aturan-aturan yang menyibukkan dosen-dosen, seperti: *finger print*, BKD (Beban Kerja Dosen), Lakip, laporan remunerasi, surat izin, surat tugas, penilaian kinerja akhir tahun, kenaikan pangkat, SK, dan seterusnya.

¹¹ Mayling Oey-Gardiner dkk. *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia* (Jakarta: AIPI, 2017), h. 187-189.

Dari semua administrasi itu kurang mengarah pada peningkatan produktifitas penulisan karya ilmiah atau publikasi.¹²

Permasalahan-permasalahan diatas tentunya sangat mengganggu upaya pendidikan tinggi untuk mampu bersaing pada era 4IR ini. Bahkan beberapa problematika sangat bertentangan dengan 4IR seperti *finger print* dimana orang dapat berhubungan dalam jarak yang sangat jauh dengan pemanfaatan teknologi. Penyamaan dosen dengan ASN lainnya tentunya bertentangan dengan UU no 14 tahun 2005 yang menjamin kebebasan dosen.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatakan dalam 4IR profesi dosen semakin kompetitif. Dosen pada era ini paling tidak harus memiliki lima kompetensi, yaitu:

- 1) *educational competence*, kompetensi berbasis Internet of Thing sebagai basic skill di era ini;
- 2) *competence in research*, kompetensi membangun jaringan untuk menumbuhkan ilmu, arah riset, dan terampil mendapatkan grant internasional;
- 3) *competence for technological commercialization*, kompetensi membawa grup dan mahasiswa pada komersialisasi dengan teknologi atas hasil inovasi dan penelitian;
- 4) *competence in globalization*, kompetensi untuk memahami saat ini dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi *hybrid*, yaitu *global competence* dan keunggulan memecahkan problem nasional;

¹² Al Makin. Bisakah Menjadi Ilmuwan Di Indonesia? Keilmuan, Birokrasi dan Globalisasi. (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 8 November 2018), h. 28.

- 5) *competence in future strategies*, pada era di mana dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga dosen harus punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara *joint-lecture, joint-research, joint-publication, joint-lab, staff mobility* dan rotasi, paham arah SDG's dan industri, dan lain sebagainya.¹³

Adanya manajemen SDM yang relevan akan menjadikan kompetensi dosen lebih berkualitas. Terkhusus dalam menghadapi era 4IR ini pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada dosen harus sesuai dengan tuntutan 4IR. Beberapa aspek yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dosen misalnya: *Academic writing, Short course, ARFI, PIES, Postdoctoral Fellowship (POSFI), ISFI, Program beasiswa, Penelitian Kolaboratif Internasional Dan Penelitian Sabbatical Leave*. Perubahan regulasi yang dapat menghambat kinerja dosen juga harus segera di evaluasi.

C. Kurikulum dan Model Pembelajaran di Era Industri 4.0

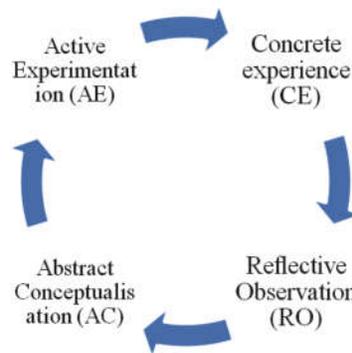
Dalam panduan penyusunan kurikulum untuk pendidikan tinggi dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Sementara itu pembelajaran

¹³ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Era Revolusi Industri 4.0, Saatnya Generasi Millennial Menjadi Dosen Masa Depan. (<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/>) di akses 11 November 2018.

adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.¹⁴

Untuk mampu menghadapi era 4IR, maka perguruan tinggi harus melakukan perubahan-perubahan dalam bidang kurikulum dan model pembelajarannya. Kurikulum dan pembelajarannya harus relevan dengan tuntutan dunia kerja. Pada era 4IR dunia usaha, masyarakat bahkan pemerintah atau lapangan kerja lainnya membutuhkan orang yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang tidak ada sebelumnya. Selain itu kurikulum dan model pembelajarannya juga harus sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang sudah berubah atau biasa disebut dengan generasi milenial.

Kolb memperkenalkan sebuah model pembelajaran pada perguruan tinggi yang disebut "*Kolb Learning Cycle*". Model pembelajaran ini membutuhkan empat jenis kemampuan/ kegiatan untuk berhasil (Gambar 3) dibawah ini.



Gambar 2.1 Siklus Belajar Pendidikan Tinggi

¹⁴Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), h. 3-4.

Teori siklus belajar yang diperkenalkan Kolb menggambarkan tahap-tahap pembelajaran dari pengalaman konkret melalui refleksi dan generalisasi untuk bereksperimen terhadap pengalaman baru.

- 1) *Concrete experience (CE)*, mahasiswa memaparkan materi perkuliahan di luar ruangan kelas seperti pada tempat latihan kerja atau laboratorium. Kemudian mengadakan tuding banding ke tempat yang sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian mahasiswa berdiskusi dengan orang-orang sukses pada bidang ilmu mereka. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk menjelaskan komparasi antara teori dengan praktik di lapangan. (misalnya untuk mahasiswa manajemen pendidikan dapat mengunjungi sekolah/madrasah/ perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian mahasiswa berdiskusi dengan kepala sekolah/ rektor dan lainnya sehingga mahasiswa mendapatkan praktik yang baik untuk dianalisis secara teoritis).
- 2) *Reúective Observation (RO)*, yang mengharuskan mahasiswa untuk terus belajar dan yang merefleksikan setiap sesi perkuliahan. Mahasiswa melakukan audit secara teori tentang setiap praktik yang dilihat.
- 3) *Abstract Conceptualisation (AC)*, menggunakan ceramah tradisional yang meliputi konsep dan teori dengan buku teks, jurnal, hasil penelitian dan bacaan lainnya secara terbimbing.
- 4) *Active Experimentation (AE)*, melalui penilaian yang mengharuskan siswa untuk mewawancarai seorang. (misalnya mahasiswa manajemen pendidikan diminta untuk mewawancarai seorang/beberapa orang pemimpin pendi-

dikan dan menganalisis datanya menggunakan teori kepemimpinan yang ada saat ini).¹⁵

Trilling dan Fadel menjelaskan pembelajaran pada abad 21 bercirikan empat kekuatan besar (seperti dalam Gambar 5) dalam upaya menuju cara-cara belajar baru untuk kehidupan di era ini, yaitu: *knowledge work*, *thinking tools*, *digital lifestyles*, dan *learning research*.¹⁶



Gambar 5. Pembelajaran Abad 21

Keempat kekuatan ini secara simultan menciptakan kebutuhan akan bentuk-bentuk pembelajaran baru di abad 21. Diperlukan alat, lingkungan, dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mendukung praktik pembelajaran abad 21.

¹⁵ Ursula Lucas and Peter Milford. Key Aspects of Teaching and Learning in Accounting, Business and Management. Dalam Heather Fry, Steve Ketteridge dan Stephanie Marshall (Ed.). A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice (New York: Routledge, 2009), pp. 382-404.

¹⁶ Bernie Trilling and Charles Fadel: 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), pp. 23.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan acuan dalam menyusun kurikulum pendidikan tinggi seperti dalam gambar berikut:



Gambar 6. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi¹⁷

Secara umum acuan ini menjadi pedoman setiap lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun kurikulumnya. Namun, setiap lembaga pendidikan harus mampu mengembangkannya sesuai dengan potensi lembaga masing-masing dan

¹⁷Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), h. 3.

sasaran masa depan lembaga. Terutama dalam mempersiapkan menghadapi 4IR.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki beberapa kebijakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju 4IR. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memaparkan bahwa dalam menghadapi era 4IR kebijakan kurikulum yang akan dibangun adalah:

- 1) Reorientasi Kurikulum, yang meliputi: a) Literasi baru (data, teknologi, humanities) dikembangkan dan diajarkan, b) Kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan, c) *Entrepreneurship* dan internship agar diwajibkan.
- 2) *Hybrid/Blended Learning*, Online yaitu: menerapkan sistem pengajaran *Hybrid/Blended Learning* melalui SPADA-IdREN.
- 3) Unit Khusus Life-long Learning, yaitu: perguruan tinggi disarankan mempunyai unit yang secara khusus memberikan layanan life-longlearning.
- 4) Hibah dan Bimtek dari Belmawa untuk reorientasi kurikulum (GEN-RI 4.0) untuk 400 PT.¹⁸

Pendidikan tinggi perlu melakukan reorientasi kurikulum. kurikulum yang ada diperguruan tinggi perlu mengacu pada tuntutan 4IR, misalnya: kecerdasan buatan, *cloud computing*, penggunaa robot, *augmented reality*, manufaktur aditif, dan *Internet of Things*. Hal ini dilakuakn untuk menye-

¹⁸ Mohamad Nasir. Policy for Curriculum and Competencies in the 4th Industrial Revolution (4-IR). Di persentasikan pada Education World Forum 2018 London.

suaikan dengan permintaan dunia usaha, pengguna lulusan maupun masyarakat lainnya.

D. Kompetensi Lulusan di Era Industri 4.0

Karena jenis-jenis dan tipe pekerjaan yang akan berubah di era 4IR ini, maka lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi harus menyesuaikan atau disesuaikan dengan perkembangan/permintaan di era ini. Trilling dan Fadel menguraikan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja pada abad 21 adalah:

- 1) *Learning and innovation skills*, yang meliputi: a) pemikiran kritis dan pemecahan masalah, b) komunikasi dan kolaborasi, c) kreativitas dan inovasi.
- 2) *Digital literacy skills*, yang meliputi: a) literasi informasi, b) melek media, c) literasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
- 3) *Career and life skills*: a) fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, b) Inisiatif dan pengarahan diri sendiri, c) Interaksi sosial dan lintas budaya, c) produktivitas dan akuntabilitas, d) kepemimpinan dan tanggung jawab.¹⁹

Dalam *World Economic Forum (WEF)* yang bertemakan *Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*, memproyeksikan bahwa ada sepuluh keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja pada tahun 2020, yaitu: 1) *Complex Problem Solving*, 2) *Critical Thinking*, 3) *Creativity*, 4) *People Management*, 5) *Coordinating with Others*,

¹⁹Bernie Trilling and Charles Fadel: *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times* (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), pp. xxiv.

6) *Emotional Intelligence*, 7) *Judgment and Decision Making*, 8) *Service Orientation*, 9) *Negotiation*, 10) *Cognitive Flexibility*.²⁰ Sepuluh keterampilan ini diurutkan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan era 4IR.

Sementara itu dalam konteks ke-Indonesiaan, Gardiner dkk mengungkapkan pada era yang terus berubah seperti saat ini, mahasiswa baik S1, S2 dan S3 harus mau terbuka pada segala perubahan. Pada era ini mahasiswa harus memiliki berbagai macam keahlian, yaitu:

- 1) Kemampuan Berpikir Kreatif, Kritis, dan Inovatif, dan Sensitivitas Interdisipliner. dan Multidisipliner.
- 2) Penguasaan Teknologi Komunikasi dan Kemampuan Riset Dunia Maya
- 3) *Receptive Mind* dan Multikulturalisme
- 4) Pentingnya Kerja Sama Tim, Negosiasi, dan Mobilitas Geografis
- 5) Kemampuan Komunikasi yang Efektif
- 6) *Think Globally, Act Locally*, dan *Collaborate Internationally*
- 7) Keterampilan *Science of Data*
- 8) Pemahaman terhadap Indonesia, Kebangsaan, dan Kebinekaan.²¹

Pada era 4 IR ini dunia kerja memiliki tuntutan yang semakin kompleks, sebagai dampak dari perubahan dan arus

²⁰ Chris Wilson, Peter Lennox, Michael Brown dan Gareth Hughes. How to Develop Creative Capacity for The Fourth Industrial Revolution: Creativity and Employability In Higher Education. Dalam Reisman, F. (Ed). *Creativity, Innovation and Wellbeing* (London: KIE Conference Publications, 2017).

²¹ Mayling Oey-Gardiner dkk. *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia* (Jakarta: AIPI, 2017), h. 187-189.

globalisasi yang semakin cepat. Artinya dunia kerja membutuhkan orang-orang yang terampil tidak hanya pada satu aspek namun memiliki berbagai keahlian dan kompetensi pada satu bidang pekerjaan. Hal ini harus direspon secara cepat oleh pendidikan tinggi agar tidak menghasilkan pengangguran terdidik.

Dalam islam, Rasulullah pernah bersabda “*Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian*”.

Berdasarkan hadis diatas, rasulullah memeberikan perintah tidak hanya kepada orang tua namun kepada semua pendidik, bahwasannya manusia dewasa memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan anak-anak (peserta didik) untuk masa depan. Hal ini juga bermakna bahwa pendidik harus memiliki cara pandang jauh kedepan untuk memprediksi kebutuhan masa depan dan mempersiapkan anak-anak (peserta didik) mampu bersaing di zamannya kelak.

E. Penutup

Pendidikan tinggi merupakan kunci utama dalam upaya menyiapkan SDM yang berkualitas yang siap untuk menghadapi tuntutan pada era 4IR. Untuk itu pendidikan tinggi tidak dapat berjalan sendiri, artinya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak mislanya pemerintah melalui kebijakan kebijakan yang membantu pendidikan tinggi mencapai kemampuan maksimal. Pemerintah harus mampu memangkas birokrasi-birokrasi yang justru menghambat pengembangan perguruan tinggi seperti *finger print*, BKD (Beban

Kerja Dosen), Lakip, laporan remunerasi, surat izin, surat tugas, penilain kinerja akhir tahun, kenaikan pangkat, SK, dan lains ebagainya.

Pengembangan pendidikan tinggi harus linier dengan pengembangan dosen. Dosen harus menjadi bahan utama kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu membuat dosen lebih maju dan kreatif. Selain kesejarteraan yang perlu ditingkatkan pengembangan lainnya misalnya pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan sistematis harus dilakukan.

Selanjutnya perguruan tinggi harus mampu berkolaborasi baik dengan perguruan tinggi lainnya, pemerintah dan masyarakat. Perguruan tinggi tidak boleh bersifat eksklusif yang seolah-olah paling tahu. Sebagai contoh adalah perkembangan teknologi dalam hal ini teknologi komunikasi, yang menyebabkan masyarakat kian gampang mendapatkan dan bertukar informasi. Konsekuensi perkembangan ini adalah pada saatnya nanti mereka yang ingin mendapatkan ilmu bisa memperolehnya tanpa kehadiran secara fisik di ruang kelas.

Daftar Pustaka

- DeCenzo, D. A, Robbins, S. P dan Verhulst, S. L. (2013). *Fundamentals of Human Resource Management*. New Jersey: Wiley.
- Dessler, G. (2017). *Human Resource Management*. USA: Pearson.
- Gardiner, M. O. dkk. (2017). *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: AIPI.
- Gleason, N. W. (2018) Introduction. Dalam Nancy W. Gleason (Ed). *Higher Education in the Era of the Fourth*

- Industrial Revolution*. Singapore: Springer. Hal. 1-12. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0>
- Hermann, M., Pentek, T. dan Otto, B. (2015). *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review*. Working Paper No. 01/2015. Technische universitat of dortmund. (<https://www.thiagobranquinho.com/wp-content/uploads/2016/11/Design-Principles-for-Industrie-4-0-Scenarios.pdf>) di akses 17 November 2018.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2016). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2018). *Era Revolusi Industri 4.0, Saatnya Generasi Millennial Menjadi Dosen Masa Depan*. (<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/>) di akses 11 November 2018
- Lucas, U. and Milford, P. (2009). Key Aspects of Teaching and Learning in Accounting, Business and Management. Dalam Heather Fry, Steve Ketteridge dan Stephanie Marshall (Ed.). *A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice*. (New York: Routledge.
- Makin, A. (2018) *Bisakah Menjadi Ilmuan Di Indonesia? Keilmuan, Birokrasi dan Globalisasi*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 8 November 2018)

- Nasir, M. (2018). *Policy for Curriculum and Competencies in the 4th Industrial Revolution (4-IR)*. Di persentasikan di London pada Education World Forum 2018.
- Pitoko, R. A. (2018). *57 Persen Pekerjaan Sekarang akan Tergerus Revolusi Industri 4.0*. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/-210000326/57-persen-pekerjaan-sekarang-akan-tergerus-revolusi-industri-4.0>) di akses 17 Novemer 2018.
- Schwab, S. (2016). *The Fourth Industrial Revolution-The Fourth Industrial Revolution*. Switzerland: World Economic Forum.
- Trilling, B. and Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Ustundag, A. dan Cevikcan, E. (2018). *Industry 4.0: Managing The Digital Transformation*. Switzerland: Springer
- Wilson, C., Lennox, P.P., Hughes, G dan Brown, M. (2017). How to develop creative capacity for the fourth industrial revolution: creativity and employability in higher education. Dalam Reisman, F. (Ed). *Creativity, Innovation and Wellbeing*. London: KIE Conference Publications.
- Yahya, M. (2018). *Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Professor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.

3

INTERNASIONALISASI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Bakhtiar

A. Pendahuluan

Internasionalisasi pendidikan dalam era globalisasi adalah merupakan suatu percepatan dunia di bidang pendidikan. Satu sisi, internasionalisasi mampu menawarkan beribu wajah impian akan kesuksesan, tetapi disisi lain juga tak kalah mengerikannya, menggulung siapapun dalam jurang kehancuran. Internasionalisasi, menyediakan peluang sekaligus ancaman untuk meraih kemajuan sekaligus keterpurukan. internasionalisasi yang menggunakan dasar pasar bebas, akan menjadi suatu keniscayaan yang tidak menutup kemungkinan internasionalisasi pendidikan tinggi yang pada dasarnya merupakan embrio dari arus internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berjalan tanpa batas.

Menurut Mujamil Qomar “Pendidikan Islam telah tertinggal oleh pendidikan Barat sekuler yang telah mempengaruhi hampir semua bentuk pendidikan di dunia ini. Kalaupun terdapat fenomena-fenomena kebangkitan pendidikan Islam, itu baru bersifat kasuistik dan parsial, dan belum menjadi kecenderungan mayoritas.”¹

¹ Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 1.

Sejalan dengan hal tersebut Agus Zaenul Fitri mengemukakan bahwa “Keinginan dunia Islam untuk memiliki lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan konsep ilmu dan Islam, pertama kalinya digagas pada tahun 1970-an dalam konferensi pendidikan Islam internasional, yang sejak saat itu hingga sekarang sudah diselenggarakan sebanyak lima kali konferensi.² Mungkin ini juga nantinya yang menjadi dasar dari pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

Melihat pengalaman negara-negara lain yang lebih maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Malaysia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas berkorelasi secara signifikan dengan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya membentuk kompetensi yang tinggi dalam persaingan global. Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya memajukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa.³

Mewujudkan pendidikan tinggi yang berstandar internasional dalam konteks internasionalisasi pendidikan di era globalisasi saat ini, PTKI di Indonesia harus memiliki strategi pengembangan pendidikan tingginya. Hal ini dimaksudkan agar PTKI di Indonesia mampu berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional. Pandangan ini merupakan

² Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajar: Strategi Memberdayakan dan mempercepat pencapaian visi lembaga pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 4.

³ Retno Sunu Astuti, Pengembangan Kapasitas: Strategi Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia, dalam *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, (Vol 2, Nomor 1, Maret 2016), h. 1.

sesuatu hal yang wajar mengingat internasionalisasi pendidikan tinggi di era globalisasi atau liberalisasi bermediasi melalui jalur pasar bebas yang sangat mungkin tidak hanya memberikan harapan untuk semakin survive, tetapi juga ancaman untuk semakin menghancurkan roda pendidikan tinggi suatu negara, apalagi perangkat infrastruktur PTKI di Indonesia, terutama swasta masih jauh dari harapan. Alih-alih bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi justru nasib harus “gulung tikar” tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi manakala tidak diimbangi dengan kesiapan internal PTKI serta dukungan kebijakan pendidikan tinggi Islam yang antisipatif dalam merancang kebijakan sektor pendidikannya.

Agus Zaenul Fitri sebagaimana mengikuti pendapat Li Lanqing, bahwa menjelaskan bagaimana konsepnya tentang universitas kelas dunia. Sebuah universitas kelas dunia lahir dengan pengembangan diri dan upaya tanpa pamrih untuk memenuhi standar universal.⁴

Knight sebagaimana dikemukakan oleh Retno Sunu Astuti mengatakan bahwa Pelaksanaan internasionalisasi pendidikan tinggi bagi negara-negara berkembang lebih berorientasi pada tujuan budaya dan akademik yaitu memperbaiki kualitas dan memecahkan masalah yang terkait dengan belum terpenuhinya tuntutan akan pendidikan yang bermutu.⁵

Lebih lanjut Agus Zaenul Fitri, mengemukakan bahwa Karena itu, tidak masuk akal menargetkan setiap perguruan tinggi menjadi kelas dunia. Apalagi, tidak semua universitas

⁴ Agus Zaenul Fitri, Masa Depan Perguruan Tinggi Islam Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional, dalam *Jurnal Epistémé*, (Vol. 8, No. 2, Desember 2013), h. 240.

⁵ *Ibid.*, h. 3.

atau perguruan tinggi mempunyai potensi untuk menjadi institusi kelas dunia. Dalam pengamatan Li Lanqing terdapat sejumlah karakteristik antara lain menyangkut kualitas dosennya dan kemampuan perguruan tinggi tersebut dalam merekrut dan mendidik banyak orang terkenal, sebagian di antara lulusannya menjadi orang yang berhasil dalam karirnya dan mengharumkan nama almamaternya.⁶

Perkembangan perguruan tinggi pada era globalisasi sebagai dampak globalisasi menuntut perguruan tinggi melakukan internasionalisasi, serta menuntut adanya pengelolaan perguruan tinggi yang didasarkan pada pengelolaan yang sarat dengan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan, orientasi global, serta lulusan dan hasil karya penelitian yang dapat diadopsi oleh masyarakat secara internasional.

B. Persaingan di Era Globalisasi

Memasuki era global, maka ada semacam tuntutan bagi semua komponen yang ada di dunia ini untuk menyesuaikan dengan globalisasi. Tak terkecuali adalah dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi (PT). Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa isu penting yang mesti dicermati oleh PT adalah internasionalisasi PT.

Pengaruh perubahan secara global, ikut berdampak pada keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Globalisasi yang melanda masyarakat dunia saat ini selain membuka peluang-peluang besar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan potensinya juga merupakan tantangan bagaimana perguruan tinggi yang didalam termasuk PTKIN bisa eksis ditengah arus perubahan dunia.⁷

⁶ Agus Zaenul Fitri, *Masa Depan Perguruan Tinggi*, h. 240.

⁷ Agus Zaenul Fitri, *Organisasi Pembelajaran*, h. 9.

Akbar S. Ahmad dan Hasting Donnan, mengemukakan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat didalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal-hal yang bisa dijangkau dengan mudah.⁸

Sedangkan oleh Ulrich Beck, yaitu seorang pemikir filsafat sosial Jerman, menyebutkan bahwa dalam globalisasi ada tiga pengertian kunci yaitu:

1. Deteritorialisasi yang berarti batas-batas geografi ditiadakan atau tidak lagi berperan dan tidak lagi menentukan dalam perdagangan antarnegara.
2. Transnasionalisme ialah mentiadakan batas-batas geografis seperti blokblok.
3. Mutilokal dan translokal, dimana globalisasi memberikan kesempatan bagi manusia di berbagai belahan dunia membuka horison hidupnya seluas dunia, tanpa kehilangan kelokalannya.⁹

Menurut Prof.Dr.der Soz Gumilar R. Sumantri dalam Ghafur, saat ini PT dihadapkan pada adanya tuntutan internasionalisasi dari era globalisasi. Tuntutan itu berkaitan dengan:

- Sifat keuniversalan ilmu pengetahuan (IP) yang tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat ruang dan waktu. Ilmu

⁸ M. Hidayat Ginanjar, Tantangan Dan Peluang Lembaga Pendidikan Islam Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), dalam *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 04, Juli 2015), h. 1016.

⁹ *Ibid.*

Pengetahuan adalah bahasa universal serta penghubung antarbudaya, antarbangsa, antar generasi dan antar zaman.

- Internasionalisasi sekaligus mendorong dan “memaksa” PT Indonesia untuk membangun mutu diri sendiri sesuai standar pendidikan dunia yang diukur oleh berbagai badan penjaminan mutu internasional dan akreditasi lintas batas negara.
- Internasionalisasi juga merangsang kalangan ilmuwan Indonesia untuk lebih extovert dengan membuka diri secara lebih luas ke komunitas dunia dengan mengumumkan karyakaryanya, terutama hasil penelitian, melalui jurnal-jurnal internasional.
- Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa PT Indonesia tidak sekedar “jago kandang”, melainkan mampu bersaing dengan berbagai PT lainnya di manca negara.
- Untuk turut mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermutu dan terpercaya.
- Untuk turut mendorong adanya pengakuan dunia terhadap kualitas tenaga kerja lulusan PT Indonesia di pasar kerja internasional.¹⁰

The Global Goals merupakan hasil kesepakatan 193 pemimpin dunia pada 25 September 2015, tentang 17 Sasaran Global (*The Global Goals*) yang diharapkan dapat tercapai

¹⁰ Umi Zulfa, Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University, dalam *Jurnal Literasi*, (Volume. III, No. 1: Juni 2012), h. 112.

pada tahun 2030, yaitu (www.globalgoals.org dan satu-indonesia.com):¹¹

- a. Tanpa kemiskinan (*no poverty*): hilangkan kemiskinan dalam bentuk apa pun di seluruh penjuru dunia;
- b. Tanpa kelaparan (*zero hunger*): hilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well-being*): menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- d. Pendidikan berkualitas (*quality education*): menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
- e. Kesetaraan gender (*gender equality*): mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- f. Air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*): menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- g. Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*): menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
- h. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*): mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;

¹¹ Rosidin, Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Maqashid Syariah, dalam *Jurnal Ulul Albab* (Volume 17, No.1 Tahun 2016), h. 92.

- i. Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation and infrastructure*): membangun infrastruktur yang berkualitas mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan (*reduced inequalities*): mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia;
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable cities and communities*): membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan;
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (*responsible consumption and production*): menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- m. aksi terhadap iklim (*climate action*): bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Kehidupan bawah laut (*life below water*): melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
- o. Kehidupan di darat (*life on land*): melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah;
- p. Institusi perdamaian dan peradilan yang kuat (*peace and justice strong institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan;
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*): Memperkuat implementasi dan menghidupkan

kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk dapat mencapai posisi kelas dunia maka perguruan tinggi harus melakukan *reforming* agar dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki daya saing global (*global competitiveness report*), proses pendidikan yang dilaksanakan berkualitas, serta dalam mencapai perguruan tinggi kelas dunia tetap memiliki independensi dalam mempertahankan eksistensi budaya lokalnya (nilai-nilai ke Indonesiaan) kedalam kancah pendidikan tingkat dunia (*global education*).

Sejalan dengan lahirnya budaya global ialah kemungkinan lunturnya identitas suatu bangsa. Kita lihat saja misalnya bahaya yang dapat muncul terhadap kesadaran akan wawasan nusantara atau eksistensi budaya etnik. Masyarakat era modern sebagai masyarakat ilmu pengetahuan menuntut setiap individu menguasai atau setidaknya mempunyai pengertian tentang pengaruh ilmu pengetahuan di dalam kehidupan. Namun demikian bagi umat islam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan itu bukan berarti membebaskan manusia dari nilai-nilai agama.¹²

Proses globalisasi yang begitu cepat dan ditopang oleh perkembangan industri yang menuntut penemuan dan inovasi-inovasi baru bagi produk industry, kehadiran laboratorium-laboratorium bagi penelitian hasil-hasil temuan teknologi untuk dipasarkan, tuntutan kehadiran para ilmuwan

¹² Ishomuddin, *Restorasi PTAIN di Era Globalisasi: Dinamika UIN Malang di Tangan Pemimpin Inovatif dan kreatif*. Editor: Ahmad Barizi dan Mujtahid, *Membangun Pendidikan dalam Bingkai Islam Lintas Batas* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 151.

yang mempunyai kemampuan berpikir analitik dan saintifik serta kemampuan riset dari yang sederhana ke yang kompleks dan kemampuan untuk terus berinovasi jelas memerlukan jawaban konkret lembaga pendidikan tinggi.¹³

Kualitas pendidikan di Indonesia harus mampu bersaing dengan dunia internasional, mempunyai pendidikan yang berstandar internasional, sehingga Indonesia tidak akan jauh tertinggal dalam era global ini. Masa sekarang ini yang sudah menuju era revolusi industri 4.0 sangat dibutuhkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas tinggi.

C. Internasionalisasi Perguruan Tinggi

Internasionalisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penginternasionalan. Sedangkan kata internasional diartikan dengan menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; atau antarbangsa.¹⁴

Elliot dalam Ghofur mendefinisikan internasionalisasi PT sebagai sebuah upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menjadikan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan tinggi lebih responsif terhadap tantangan globalisasi ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya Knight mendefinisikan internasionalisasi PT sebagai proses pengintegrasian dimensi internasional dan interkultural ke dalam fungsi pengajaran, penelitian dan pelayanan dari sebuah institusi.¹⁵

¹³ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 38.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*.

¹⁵ Zulfa, *Transformasi Internasionalisasi*, h. 114.

Menurut Knight, sebagaimana yang dikutip oleh Ghafur bahwa untuk melakukan internasionalisasi PT, ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan PT di dunia dalam melaksanakan internasionalisasi PT. Jelasnya sebagaimana dilihat dalam tabel berikut.¹⁶

Tabel 4.1 Pendekatan Internasionalisasi PT

Tipe Pendekatan	Fokus Kegiatan
Pendekatan aktivitas	Pengembangan kurikulum internasional, Pertukaran mahasiswa, Bantuan teknis, Penjaringan mahasiswa asing.
Pendekatan kompetensi	Peningkatan keterampilan, sikap dan nilai yang mendukung program internasionalisasi pada mahasiswa, pengajar dan staf.
Pendekatan etos	Menekankan pada penciptaan kultur dan iklim kampus yang mendukung dan mempromosikan inisiatif internasional atau interkultural.
Pendekatan proses	Integrasi atau pemaduan dimensi internasional dan interkultural ke dalam pengajaran, penelitian dan pelayanan melalui kebijakan prosedur dan kegiatan yang tepat.

Sumber: Umi Zulfa: Transformasi Internasionalisasi Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University.

¹⁶ *Ibid.*, h. 115.

Selanjutnya Knight, menyebutkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan internasionalisasi PT, yang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Strategi program, mencakup hal-hal yang terkait antara lain dengan kegiatan akademik, penelitian, hubungan eksternal dan pelayanan publik. Pada program akademik biasanya dilakukan program-program seperti pertukaran mahasiswa, pengajaran bahasa asing, internasionalisasi kurikulum, penjarangan mahasiswa asing dan peningkatan kesempatan belajar di luar negeri bagi mahasiswa/staf pengajar. Selain program tersebut, program ini juga dilakukan dengan pembukaan kajian kewilayahan, program *join/double degree*, mengirim dan atau mengundang dosen tamu dari luar negeri. Disamping itu, internasionalisasi dan kerjasama internasional juga bisa dilakukan melalui program kerja kolaboratif, seminar dan konferensi internasional, penerbitan artikel di jurnal-jurnal internasional, perjanjian penelitian internasional, serta pertukaran peneliti dan mahasiswa pascasarjana. Dalam konteks pelayanan publik dan hubungan eksternal, internasionalisasi PT tampil dalam berbagai program seperti kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta untuk menjalankan program-program layanan masyarakat, partisipasi dalam jaringan internasional, penyediaan layanan masyarakat dalam proyek-proyek lintas batas negara, lintas kultural, dan pendataan serta jaringan alumni di mancanegara.
2. Strategi organisasi dalam mengembangkan program internasionalisasi harus menyentuh aspek-aspek mana-

¹⁷ *Ibid.*, h. 116.

jemen dan tata kelola, perangkat operasional, pengembangan sumber daya manusia dan layanan pendukung. Strategi program harus menjamin bahwa dimensi internasional terlembagakan dengan baik melalui sumber daya manusia, kebijakan dan sistem administrasi. Untuk itu perlu pengintegrasian visi dan misi internasionalisasi ke dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pengkajian mutu perguruan tinggi. Struktur organisasi yang tepat serta sistem komunikasi yang mendukung dan alokasi sumber daya yang memadai juga penting. Layanan pendukung bagi mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi tersebut seperti layanan asrama, pelatihan bahasa, program orientasi dan sebagainya harus tersedia dengan baik dan tidak bisa diabaikan. Terakhir pula, tersedia sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat dilakukan melalui program-program penghargaan kepada staf, dukungan pada kegiatan-kegiatan staf di level internasional serta adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih terbuka dan tepat sehingga mampu menjaring orang-orang yang mempunyai keahlian istimewa dengan reputasi internasional dan wawasan internasional.

Sedangkan menurut Jusuf Amir Faisal sebagaimana dikemukakan oleh Abudin Nata, bahwa dalam era globalisasi industrialisasi, peran pendidikan tidak terfokus pada penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai, mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja sangat cepat berubah dalam era ini. Sebaliknya pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menerima serta

menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghafur tahun 2009, PT di Indonesia, khususnya yang BHMN yang sudah melaksanakan internasionalisasi PT, biasanya mengambil bentuk kegiatannya sebagai berikut: *Pertama*. Kegiatan yang berbasis pada struktur yang sudah ada, dengan memberi dimensi internasionalisasi dari dalam (*internationalization within*) terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan sebagainya. Bentuk kegiatan ini adalah internasionalisasi berperangkat struktur lunak (*soft structure activities*). *Kedua*. Kegiatan kongkrit berbasis hubungan kerjasama antara struktur internal dengan pihak ekseternal/asing. Kegiatan ini disebut *hard structure activities*, yang bentuk kegiatannya antara lain:

- a) Pengiriman dosen untuk studi lanjut ke luar negeri dan kehadiran dosen dan peneliti asing di PT setempat.
- b) Pengiriman mahasiswa untuk kunjungan keluar negeri.
- c) Mobilitas internasional staf pengajar, peneliti dan pimpinan PT, baik yang akademik maupun yang non akademik.
- d) Keanggotaan dalam berbagai forum kerjasama dan asosiasi internasional seperti *ASEAN University Network (AUN)*, *Association of Pasific Rim Universities (APRU)*, *Association of Southeast Asia Institution of Higher Learning (ASAIHL)*, *ASEAN-Europeon Academic University Network (ASEAN-Uninet)*, *Southeast Asian Minister of The Islamic World (FUIW)* dan sebagainya.

¹⁸ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Bogor: Kencana, 2003), h. 82.

- e) Peluang dan pemanfaatan dana internasional, seperti Asia link, Marie Curie *International fellowship*, FP-6, *tematic Priorities of research*, *International Cooperation Action* (INCO), *United States Institute of Peace* (USIP), *Toyota Foundation*, *Japan Foundation Research Fund* (JFRF), *Tokyo Foundation Research Grant* dan lain-lain.
- f) Perjanjian internasional dengan lembaga, organisasi atau PT luar negeri,. Baik akademik maupun non akademik dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan ditindak lanjuti dengan *Letter of implementation* (LoI).
- g) Publikasi Makalah di berbagai jurnal internasional atau kerjasama penerbitan dengan lembaga-lembaga internasional.¹⁹

Scott sebagaimana dikutip oleh Shelly Andari, dkk, mengemukakan bahwa beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh universitas menuju WCU, antara lain: (a) program mahasiswa internasional; (b) layanan dukungan mahasiswa internasional; (c) penyelenggaraan pendidikan internasional jarak jauh; (d) internasionalisasi pengajar, kurikulum, dan pengalaman; (e) internasionalisasi bantuan teknis dan pelatihan; serta (f) internasionalisasi riset. Tak hanya itu Hawawini juga mengungkapkan bahwa sasaran internasionalisasi lebih dari pengajaran, penelitian, dan pelayanan pendidikan, namun aspek lain yang juga menjadi sasaran adalah struktur, regulasi, dan pola pikir (*mindset*) perguruan tinggi itu sendiri.²⁰

¹⁹ Zulfa, *Transformasi Internasionalisasi*, h. 123-124.

²⁰ Shelly Andari, Manajemen Program Internasionalisasi di International Office dalam Mewujudkan World Class University, dalam *Jurnal Pendidikan Humaniora* (Vol. 4 No. 4, Desember 2016), h. 206.

Salwi sebagaimana di kutip oleh Shelly Andari, dkk, mengemukakan internasionalisasi pendidikan tinggi untuk menuju WCU yakni dengan memaksimalkan abundant resources, concentration of talent, dan favorable governance. Program internasionalisasi mengarah lebih banyak kepada abundant resources dan concentration of talent yakni pada peningkatan potensi sumber daya manusia dan non manusia, yakni yang menjadi sasaran adalah mahasiswa, dosen, dan peningkatan publikasi ilmiah internasional.²¹

Internasionalisasi pendidikan dapat menunjukkan sejumlah pengertian: Pertama, dengan terjadinya globalisasi, maka pendidikan menjadi bukan lagi menjadi (semata-mata) urusan lokal atau nasional, melainkan menjadi suatu yang bersifat internasional/global. Dalam perspektif global, baik buruknya kinerja pendidikan suatu negara tidak lagi hanya diukur pada tataran nasional, melainkan dibandingkan dengan negara-negara lain sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi internasional yang banyak dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir. Kedua, Internasionalisasi pendidikan berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama, pembukaan cabang lembaga yang berbasis di suatu negara lain, atau pembukaan akses siswa/mahasiswa domestik ke lembaga pendidikan internasional. Hal ini bukan hanya terjadi secara konvensional dalam bentuk berdirinya suatu lembaga pendidikan, melainkan juga secara virtual melalui jaringan internet.

Dengan demikian, pendidikan tinggi yang didalam termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI) sedang menghadapi tiga skala tuntutan, yaitu skala global, nasional dan tun-

²¹ *Ibid.*, h. 206.

tutan dalam lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Tuntutan skala global diantaranya berupa tuntutan kualitas, relevansi, dan internasionalisasi pendidikan tinggi.²²

Internasionalisasi pendidikan tinggi keagamaan islam akan melahirkan pendidikan tinggi (universitas) yang berstandar internasional. Universitas-universitas inilah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkelas dunia. Li Lanqing menjelaskan bagaimana konsep universitas berkelas dunia. Sebuah universitas yang lahir dengan pengembangan diri dan upaya tanpa pamrih untuk memenuhi standar universal.²³

Jadi internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh universitas untuk memenuhi kriteria atau standar sebagai universitas internasional dalam era global.

D. Internasionalisasi PTKIN dengan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Problem utama dalam konstek internasionalisasi PTKIN adalah kemampuan SDM dosen dan karyawan untuk melakukan riset, penulisan jurnal internasional, keterlibatan dalam forum internasional, kerjasama dengan perguruan tinggi Negara maju lainnya, sub kajian keilmuan yang harus berbeda dan unggul.²⁴

Pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan akan adanya internasionalisasi PTKIN yang memenuhi standar

²²Muhammad In'am Esha, *Institutional Transformation: Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 29.

²³Fitri, *Organisasi Pembelajaran*, h. 239.

²⁴*Ibid.*, h. 167.

internasional, telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, pasal 1 ayat 2 menyebutkan UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keislaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.²⁵

UIII didirikan dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia, perlu menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, serta inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demokratis, dan berkeadilan.²⁶

Menteri Agama menyampaikan alasan lain pendirian UIII “Merujuk dari apa yang sering dikemukakan Bapak Presiden, bahwa UIII ini memang dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan tinggi Islam domestik, melainkan juga juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global sekaligus meneguhkan kepemimpinan Indonesia di dunia Islam internasional”.²⁷

Lebih lanjut menteri Agama dalam menyampaikan bahwa UIII “berbeda dengan kampus-kampus Islam yang

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sumber <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/13323291/sudah-banyak-universitas-islam-mengapa-jokowi-tetap-bangun-uiii>, tanggal 05/06/2018, diakses pada tanggal 19-11-2018.

sudah ada, tugas dan fungsi UIII tidak hanya sebagai penyelenggara proses belajar mengajar, riset, dan pengabdian ke masyarakat semata. Lebih dari itu, kampus ini dimaksudkan sebagai upaya kita membangun peradaban Islam Indonesia sekaligus mengontribusikannya bagi peradaban global melalui jalur pendidikan”²⁸

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abuddin Nata, bahwa dalam situasi pendidikan di era global, pendidikan Islam harus memainkan peran dan fungsi kultural, yaitu supaya melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan cita-cita masyarakat yang didukungnya. Dalam fungsi ideal ini pula, pendidikan islam juga bertugas untuk mengontrol dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Inilah arah dan tujuan yang harus di perjuangkan oleh pendidikan islam dewasa ini.²⁹

Mengenai fasilitas sarana prasarana UIII, oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menjelaskan “Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di bagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 terdiri dari Gedung Rektorat, Masjid, Perpustakaan, Gedung Fakultas, Infrastruktur Kawasan, Lansekap dan Ruang Terbuka Hijau, Echo Sanctuary Park. Zona 2 merupakan Kawasan Mahasiswa (pusat kegiatan kemahasiswaan, toko buku, university mall, sarana olahraga), kampus residen (guru besar and dosen, staf, keluarga mahasiswa, dan apartemen mahasiswa), serta bangunan MEP (rehabilitasi bangunan lama). Zona 3 terdiri dari kawasan fakultas dan pusat kajian (pusat kajian, scholar center, pusat pelatihan), Kawasan Peradaban (museum,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nata, *Manajemen Pendidikan*, h. 83.

pertunjukan seni dan budaya Islam, dan gedung serba guna/convention center).³⁰

UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keislaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dengan status sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.³¹

Status perguruan tinggi negeri badan hukum menjadi yang pertama di bawah kementerian Agama. Sebelumnya belum ada perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah kementerian agama yang berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Perguruan tinggi keagamaan negeri sekarang baru mencapai pada tingkat model perguruan tinggi negeri badan layanan umum.

Pendirian UIII sebagai universitas yang berstandar internasional mempunyai tugas utama menyelenggarakan program magister dan doktor bidang studi ilmu agama Islam, bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Jadi berdasarkan peraturan presiden tersebut, bahwa UIII hanya menyelenggarakan pendidikan pada level magister (S-2) dan doktor (S-3). Maka ini mengindikasikan bahwa pendidikan pada level sarjana (S-1) menjadi fokus Universitas, Institut atau Sekolah Tinggi yang sudah ada sebelumnya,

³⁰ Sumber <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3551280/tengok-indahnya-desain-kampus-iii-iii-yang-futuristik>. Tanggal, tanggal 06 Jun 2018, diakses pada tanggal 19-11-2018.

³¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 dan 3.

³² *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

terutama untuk fokus menjadi pendidikan level sarjana yang berstandar interenasional.

E. Penutup

Persaingan perguruan tinggi di era globalisasi sebagai persaingan secara mendunia berdasarkan pada pasar bebas dengan standar-standar internasional perguruan tinggi yang di sepakati. Sehingga universitas harus mampu bersaing sesamanya dari seluruh kawasan dunia. Era global keterkaitan diantara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.

Internasionalisasi perguruan tinggi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah untuk melakukan transformasi kelembagaan dan juga prosesnya untuk dapat memenuhi standar-standar internasional perguruan tinggi baik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang didirikan dengan standar internasional berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum, yang diharapkan menjadi perguruan tinggi rujukan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan peradaban islam indonesia dan dunia.

Daftar Pustaka

Andari, Shelly, Hendyat Soetopo, dan Mustiningsih. Manajemen Program Internasionalisasi di International Office (IO) dalam Mewujudkan World Class

- University, dalam *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Vol. 4 No. 4, Desember 2016.
- Astuti, Retno Sunu. Pengembangan Kapasitas: Strategi Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia, dalam *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Vol 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring.
- Esha, Muhammad In'am. *Institusional Transformation: Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Fitri, Agus Zaenul. *Organisasi Pembelajar: Strategi Memberdayakan dan mempercepat pencapaian visi lembaga pendidikan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Fitri, Agus Zaenul. Masa Depan Perguruan Tinggi Islam Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional, dalam *Jurnal Epistemé*, (Vol. 8, No. 2, Desember 2013).
- Ginanjar, M. Hidayat. Tantangan Dan Peluang Lembaga Pendidikan Islam Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), dalam *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 04, Juli 2015.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/13323291/sudah-banyak-universitas-islam-mengapa-jokowi-tetap-bangun-uuuu>, tanggal 05/06/2018, diakses pada tanggal 19-11-2018.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3551280/tengok-indahnyadesain-kampus-uuuu-yang-futuristik>.

Tanggal, tanggal 06 Jun 2018, diakses pada tanggal 19-11-2018

Ishomuddin, *Restorasi PTAIN di Era Globalisasi: Dinamika UIN Malang di Tangan Pemimpin Inovatif dan kreatif*. Editor: Ahmad Barizi dan Mujtahid, *Membangun Pendidikan dalam Bingkai Islam Lintas Batas*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bogor: Kencana, 2003.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

Qomar, Mujamil. *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Rosidin, Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Maqashid Syariah, dalam *Jurnal Ulul Albab*, Volume 17, No.1 Tahun 2016.

Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zulfa, Umi. Transformasi Internasionalisasi Perguruan Tinggi Menuju World Class University, dalam *Jurnal Literasi*, Volume. III, No. 1: Juni 2012.

4

WORLD CLASS UNIVERSITY PERGURUAN TINGGI ISLAM

Yuni Masrifatin

A. Pendahuluan

Dampak globalisasi membuat negara-negara berkembang (*new emerging and developing countries*) merasa harus menyetarakan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara maju dilihat dari Human Development Index (HDI), Program for International Student Assessment (PISA), dan lainnya. Dari sinilah nilai-nilai kompetisi ditabur dan tumbuh subur, terlebih ketika dipupuk oleh rasa inferioritas diri negara berkembang dalam bentuk pengejaran angka-angka HDI, PISA, dan sejenisnya. Dengan kondisi tersebut, dapat dipahami mengapa pihak kampus (dan juga pemerintah) tampak begitu bersemangat dengan world class university yang dianggap sebagai keniscayaan satu-satunya cara untuk dapat bertahan dan berkompetisi di tengah globalisasi.

Pemerintah tak henti-hentinya memperbaiki mutu Perguruan Tinggi. Sementara PT yang sudah tidak memenuhi syarat pendirian direkomendasikan untuk ditutup. Sebaliknya, PT yang sudah tidak baik terus dibina dan ditingkatkan lagi mutunya, bahkan sampai mampu bersaing ditingkat global.

Untuk mencapai maksud tersebut sudah banyak insentif dan hibah disediakan oleh pemerintah, termasuk pembiayaan sarana dan prasarana agar mereka dapat memenuhi standar mutu tadi.

Pada tahun 2015 lalu dibentuk gugus tugas untuk membantu lima PT unggulan nasional untuk mencapai peringkat WCU. Kelima PT unggulan itu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor, agar –paling tidak– diharapkan bisa masuk 500 top dunia. Begitu pula halnya dengan Universitas Andalas (UNAND), yang terus meningkatkan mutu agar mampu menembus WCU

Keterlibatan pemerintah di dalam mendukung pembentukan WCU diperlukan sebagai penyumbang kelancaran kegiatan agar WCU dapat terwujud. Namun, bukan berarti pemerintah bebas untuk melakukan intervensi. Pihak universitas tetap memiliki otonomi untuk mengelola organisasinya sendiri dan menetapkan serta menjalankan visi dan misinya. Pemerintah diperlukan mengingat kedudukannya sebagai pemegang dan pembuat kebijakan, termasuk diantaranya kebijakan finansial. Semakin hari, biaya untuk membentuk sebuah perguruan tinggi bertaraf internasional semakin mahal. Universitas sendiri tidak akan mampu menjalani perbaikan tanpa adanya peran yang signifikan dari pemerintah, yang karena kedudukannya menjadi faktor penentu. Maka sebelum melangkah lebih jauh masuk ke arus pusaran WCU, sungguh baik mencermati secara seksama apa yang terjadi di tengah kerasnya deru mesin pencapaian WCU di negeri ini.

B. World Class-University (WCU)

Sampai saat ini belum ada kata sepakat di kalangan civitas akademi dunia tentang pengertian, standar dan ukuran *World Class University (WCU)*. Namun *WCU* mengacu pada sejumlah konsep khususnya konsep *Knowledge Based Economy (KBE)*. KBE menjadikan ilmu sebagai salah satu faktor produksi. Artinya ilmu dan riset diposisikan sebagai jasa yang harus dikapitalisasi dan komersialisasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi.¹ Di samping itu, *WCU* juga mengukung konsep *Triple Helix A-B-G (Academic-Bussines-Government)*, yaitu peran pemerintah dalam pengurusan pendidikan tinggi dan riset cukup sebagai regulator bagi kemudahan terwujudnya kepentingan-kepentingan para korporat. Sehingga aspek yang paling menonjol dari konsep *WCU* adalah menjadikan pendidikan tinggi sebagai mesin penggerak agenda globalisasi, industrialisasi dan neokolonialisasi.² *World Class University* adalah perankingan perguruan tinggi dunia berdasarkan keunggulan internasional, seperti tingkat produktifitas karya- karya tingkat internasional.³

World Class University juga kerap didefinisikan pada penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala inter-

¹ Linda Setiawati, "Efektivitas Pengembangan Manajemen Pendidikan Tinggi (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Barat Menuju World Class University)," *Penelitian Pendidikan*, 2012, <https://doi.org/10.1245/s10434-014-4122-7>.

² Edi Subkhan, "Mempertanyakan Orientasi World Class University" (Disampaikan pada seminar nasional BEM FE Unsoed, 2010).

³ Agus Zaenul Fitri, "*Organisasi Pembelajar*" *Stratgi Memberdayakan dan Mempercepat Pencapaian visi lembaga Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 240.

nasional pada universitas atau kampus di berbagai negara.⁴ Beberapa tolok ukur skala pengakuan internasional world class university sebagai berikut.

1. Keunggulan penelitian (excellence in research), antara lain ditunjukkan dengan kualitas penelitian, produktivitas dan kreativitas penelitian, publikasi hasil penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, adanya hak paten, dan sejenisnya.⁵
2. Kebebasan akademik & atmosfer kegembiraan intelektual.
3. Pengelolaan diri yang kuat (self-management).
4. Fasilitas dan pendanaan yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional.
5. Keanekaragaman (diversity), antara lain kampus harus inklusif terhadap berbagai ranah sosial yang berbeda dari mahasiswa, termasuk keragaman ranah keilmuan.
6. Internasionalisasi, misal internasionalisasi program dengan meningkatkan pertukaran mahasiswa, masuknya mahasiswa internasional atau asing, internasionalisasi kurikulum, koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program berkelas dunia.
7. Kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar-dosen dan mahasiswa, juga kolaborasi dengan konstituen eksternal.
8. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

⁴ Agus Zaenul Fitri, "Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2, 2013, h. 235–58.

⁵ Thomas Pauliana, *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 2007, 1307–12.

9. Kualitas pembelajaran dalam perkuliahan. Koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas.
10. Kolaborasi internal kampus.

Dengan beberapa tolok ukur itu kita mulai bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kampus berkelas internasional, yakni kampus-kampus yang menempati peringkat besar dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga dengan reputasi internasional.⁶ Beberapa lembaga pemeringkatan yang dikenal perguruan tinggi di Indonesia misalnya Times Higher Education Supplement (THES), Webometrics, dan Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Untuk mencapai cita-cita menjadi universitas kelas dunia (world-class universities/WCU), sebuah perguruan tinggi memerlukan transformasi dari keadaan yang saat ini ada menuju keadaan yang sesuai dengan kriteria ideal sebuah WCU. Transformasi yang kelak dilakukan akan dipengaruhi oleh dua faktor: faktor eksternal, yakni peran pemerintah, Faktor internal, yakni kemampuan perguruan tinggi di dalam melakukan perubahan.

Sampai saat ini, tak satupun perguruan tinggi (PTN) Indonesia masuk dalam kategori World Class University (WCU), baik versi The Times Higher Education Supplement (THES), Academic Ranking of World Universities (ARWU) maupun Webometrics. Begitu bunyi data dan statistik internasional terbaru (2016).⁷ Sedangkan hal yang harus dilakukan dalam

⁶ Agus Zaenul Fitri, "Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2, 2013, h. 235.

⁷ F Rieka Hutami, "Research University Sebagai Langkah Awal Menuju World Class University," *Jurnal Manajemen Indonesia* 11, no. 3, 2011, h. 162–71.

upaya menuju perbaikan mutu dalam mengejar standar internasional diantaranya:

1. Pengembangan *Quality Assurance* (QA)

Pengembangan QA dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya mutu di perguruan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continues Quality Improvement*) dan sekaligus mendorong perguruan tinggi menuju *World Class University* (WCU). Kegiatan QA diawali dengan diterbitkannya buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003 yang kemudian dilengkapi dengan *Best Practices* berbagai elemen mutu. Sampai tahun 2005 telah diselesaikan 10 *Best Practices* yaitu Proses Pembelajaran, Kurikulum dan Program Studi, Sumber Daya Manusia, Kemahasiswaan, Prasarana dan Sarana, Suasana Akademik, Pengelolaan Keuangan, Penelitian dan Publikasi, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Tata Kelola.⁸ Tahap awal pengembangan QA (*awareness to increase quality*) ini perlu dilanjutkan dengan tahap implementasi. Tahun 2006 telah disusun Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Bidang Akademik dan Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi.

Untuk lebih mendorong implementasi QA tahun 2007 selain melatih 320 perguruan tinggi (yang belum dilatih tahun 2006) juga dilaksanakan Pelatihan AMAI (Audit Mutu Akademik Internal) untuk 480 perguruan tinggi. Pelatihan ini merupakan tingkat lanjutan dari pelatihan QA karena pesertanya

⁸ Panduan-panduan ini telah disosialisasikan kepada pimpinan PTN dan Kopertis Wilayah I–XII dalam Rapat Kerja di Yogyakarta Nopember 2005, selain dalam pelatihan-pelatihan QA yang dilaksanakan. Sampai tahun 2006 700 perguruan tinggi yang telah ikut pelatihan QA, dan juga diadakan *Lokakarya* QA bagi 82 PTN., 23.

adalah yang pernah mengikuti pelatihan QA. Dengan demikian, sampai tahun 2007 sosialisasi QA dalam bentuk pelatihan mencapai 1.020 perguruan tinggi dan 480 diantaranya sudah mengikuti Pelatihan AMAI. Tahun 2008 pelatihan AMAI dilanjutkan untuk 480 perguruan tinggi yang pernah mengikuti pelatihan QA pada tahun 2007,⁹ dan juga dilaksanakan secara selektif *Intensive Technical Assistance* kepada 120 perguruan tinggi. Selanjutnya 60 perguruan tinggi di antaranya akan dipublikasikan menjadi perguruan tinggi yang dinilai baik implementasi QA-nya sebagai pencitraan publik.

2. Pengembangan Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan diarahkan untuk memperkuat mutu layanan dengan mengadopsi perkembangan ICT yang begitu pesat, *digital library* dan dapat mendorong perguruan tingginya mencapai WCU.¹⁰ Diawali dengan penyusunan dan sosialisasi Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2005), Penyusunan SOP Perpustakaan (2006), Seminar Internasional (50 PT), *Digital Library Workshop* (100 PT). Tahun 2008 dilaksanakan *Digital Library Technical Assistance* untuk 120 PT, 60 diantaranya akan dipublikasikan sebagai perpustakaan perguruan tinggi yang potensial untuk mendorong ke tingkat global.¹¹

⁹Setiawati, "Efektivitas Pengembangan Manajemen Pendidikan Tinggi (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Barat Menuju World Class University)."

¹⁰Kalarensi Naibaho, "Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional," *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga* 2, no. 1, 2007, h. 8-17.

¹¹Naibaho, Kalarensi. "Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional." *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga* 2, no. 1, 2007, h. 2-8

3. Standar Minimal Laboratorium (SML)

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah disusun Standar Minimal Laboratorium (SML).¹² Sampai dengan akhir tahun 2007 telah disusun 15 bidang studi. Penyusunan diawali tahun 2004 dengan bidang studi Fisika, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknologi Pertanian. Tahun 2005 telah disusun SML untuk bidang studi Teknik Mesin, Teknik Industri, Arsitektur, Biologi, dan Matematika. Tahun 2006 telah disusun SML untuk bidang studi Teknik Kimia, Teknik Informatika, Akuntansi, Farmasi, Ilmu Komunikasi, dan Perikanan. Tahun 2007 telah tersusun draf SML untuk bidang studi Teknik Pertambangan, Teknik Lingkungan, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Psikologi, dan Statistika. Di samping SML juga telah disusun dan disosialisasikan secara bertahap SOP Laboratorium. Sasaran dari pembinaan laboratorium ini adalah agar laboratorium perguruan tinggi dapat menjaga dan meningkatkan: Keberlangsungan, Kualitas Kemanfaatan, Pengembangan Laboratorium (baik untuk *Teaching, Research dan Income Revenue*), Penyusunan SML lebih diprioritaskan pada bidang-bidang yang kompetensi lulusannya dinilai akan sangat bergantung pada kualitas praktikumnya.”

C. World Class-University (WCU) Di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus mendorong Perguruan Tinggi menuju world class university atau universitas kelas dunia. Saat ini ada

¹² Dadan Rosana, “Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta,” *Cakrawala Pendidikan*, no. 3, 2009, h. 65.

sebelas universitas yang didorong menjadi world class university menyusul tiga universitas tanah air yang sudah masuk ranking 500 besar dunia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan saat ini ada 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk Top 500 University versi QS rank. Ketiganya adalah Universitas Indonesia (UI) pada posisi 277, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada posisi 330, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada posisi 301. Pemerintah Targetkan 11 Perguruan Tinggi Jadi World Class University.¹³

Muhammad Nasir optimis untuk terus meningkatkan pencapaian yang telah diraih saat ini. "Target saya UI nanti mampu ke posisi 200, ITB 250, dan UGM 300, tentu mereka harus kerja keras. Kemudian menyusul Unair dan IPB karena mereka saat ini sudah di angka 700. Dan kami akan dampingi 11 PT lagi," ujarnya. Kemenristekdikti pun telah membentuk tim World Class University yang terdiri dari tokoh-tokoh senior maupun muda yang berprestasi.¹⁴ Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan juga menggelar Diskusi Nasional bertajuk World Class Research Menuju World Class University. Acara tersebut diikuti oleh perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), serta lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga. Diskusi nasional ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari perguruan tinggi, lembaga penelitian

¹³ Hutami, F Rieka. "Research University Sebagai Langkah Awal Menuju World Class University." *Jurnal Manajemen Indonesia* 11, no. 3, 2011, h. 4.

¹⁴ Suniarti Chalid, "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi," in Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen, 2007, 1307–12.

dan pengembangan kementerian, LPNK, serta beberapa stakeholders terkait lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut diharapkan dapat membuat atau mengusulkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk menunjang pencapaian perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia sebagai World Class University dan World Class Research Institute. Dalam arahnya, Nasir menyampaikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk menuju World Class University. Untuk mencapainya, Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan standar internasional, mengacu pada Quacquarelli Symonds (QS) rank yang dilakukan oleh lembaga riset QS yang bergerak pada bidang pendidikan. "Memang masalah riset menjadi penting untuk menjadi World Class University. Kualitas riset, jumlah publikasi nasional dan internasional merupakan syarat mutlak harus dicapai oleh perguruan tinggi,"¹⁵

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan riset di Indonesia menuju World Class University dan World Class Research Institute diantaranya tidak bergantung kepada anggaran pendanaan riset dari pemerintah yang hanya 0.08% dari Indonesia, namun melibatkan industri dalam pendanaan riset yang akan memberikan output bermanfaat bagi industri. Upaya lainnya yaitu berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing melalui program Staff Mobility dan Student Mobility yang outputnya publikasi internasional dan ditargetkan masuk kedalam TOP 200

¹⁵Pauliana, "Seminar Internasional , ISSN 1907-2066 Seminar Internasional , ISSN 1907-2066."124-127

Journal, demi meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia."Kalau dosen kita punya potensi harus kolaborasi dengan dosen luar, outputnya 200 publikasi internasional,"¹⁶

Adanya dosen luar negeri yang mengajar di tanah air merupakan bentuk kolaborasi agar universitas dalam negeri bisa menuju world class university. Begitu juga dengan pertukaran mahasiswa. Airlangga menjadi salah satu universitas yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) untuk menjadi universitas kelas dunia. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 5 milyar untuk UNAIR mengejar ranking 500 dunia pada 2019. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) UNAIR, Badri Munir Sukoco, S.E., MBA, Ph.D, menyatakan optimis UNAIR bisa menjadi Top 500 World Class University pada 2019. Pada 2015 ini UNAIR menduduki peringkat 701+ QS World University Rankings (QS-WUR).¹⁷ Dengan kerja bareng, kolaborasi dan penerapan *chance management*, saya optimis pada 2019 UNAIR bisa masuk ranking 500 dunia," ungkap Badri.

Chance management (manajemen peluang) diterapkan dengan memetakan SWOT dan membuat target-target tertentu yang disebarkan dengan model rencana strategis (renstra) pada masing-masing unit kerja, fakultas dan program studi

¹⁶ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Integritasi Dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama Dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam Center of Excellences," *Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2014): 158-81.

¹⁷ Rosana, Dadan. "Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta." *Cakrawala Pendidikan*, no. 3 (2009). 4-8

(prodi)¹⁸ Semua prodi di UNAIR ditargetkan mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN – PT). Sementara itu, bagi prodi yang sudah terakreditasi A harus mengajukan akreditasi internasional.¹⁹ Saat ini, dari total 39 prodi S1 di UNAIR, 24 prodi terakreditasi A, 10 prodi terakreditasi B, dan lima lainnya adalah prodi baru yang belum wajib akreditasi, yaitu 4 prodi PDD Banyuwangi (Budidaya Perairan, Kedokteran Hewan, Akuntansi dan Kesehatan Masyarakat) dan prodi Teknologi Industri Hasil Perikanan.

Sementara itu, enam prodi S1 telah mengantongi akreditasi internasional ASEAN University Network–Quality Assessment (AUN-QA). Perolehan skor untuk keenam prodi tersebut di atas standar rata-rata AUN (4), yaitu Pendidikan Dokter dengan skor 4,4, Pendidikan Apoteker 4,53, Ilmu Hukum 4,6, Pendidikan Dokter Hewan 4,1, Biologi 4,6 dan Kimia 4,5. Tantangan untuk para dekan dan ketua prodi adalah menyusun renstra berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI). Anggaran yang dibuat juga berbasis KPI. Harapannya semua unit bisa berkolaborasi dalam mengembangkan potensinya untuk mempercepat peningkatan poin penialain QS–WUR yang meliputi *academic reputation* (reputasi akademik), *employer reputation* (reputasi pimpinan), *faculty student ratio* (rasio mahasiswa fakultas), *citation per faculty* (sitasi per fakultas), *international student ratio* (rasio mahasiswa

¹⁸ Hutami, F Rieka. "Research University Sebagai Langkah Awal Menuju World Class University." *Jurnal Manajemen Indonesia* 11, no. 3 (2011), h. 4.

¹⁹ Rosana, Dadan. "Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta." *Cakrawala Pendidikan*, no. 3 (2009), h. 4-8.

internasional), dan *international staff ratio* (rasio staf internasional).²⁰

Untuk mengejar peringkat dunia, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diantaranya digunakan untuk menggerakkan penelitian, menambah jumlah dosen, serta menambah infrastruktur. Selain dukungan dana dari pemerintah sebesar Rp 5 milyar, UNAIR menargetkan tahun depan memiliki anggaran antara Rp 1,4–1,5 triliun (*head count* per mahasiswa Rp 40 juta). Besarnya anggaran per mahasiswa yang ditargetkan tersebut mengacu pada UI, ITB dan UGM yang berkisar pada Rp 50 juta, dan UB yang mencapai Rp 35 juta. “Kalau dosen sedikit, akhirnya hanya bisa ngajar. Apalagi kalau tidak ada dana penelitian dan minim fasilitas, penelitian akan sulit berkembang.”²¹ Selain menambah kuantitas dosen, kualitas dosen juga ditingkatkan dengan memberikan pelatihan melalui Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) dan workshop penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI).²²

Dana 5 milyar dari pemerintah dinilai Badri sebagai pemicu UNAIR untuk bergerak. Menurutnya, UNAIR tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan SPP

²⁰ Rosana, Dadan. “Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta.” *Cakrawala Pendidikan*, no. 3, 2009.

²¹ Lena Ellitan, “Praktik-praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2004, <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.65-76>.

²² Rosana, “Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta.” *Cakrawala Pendidikan*, no. 3, 2009.

mahasiswa. Pihaknya telah membuat simulasi, untuk memiliki dana sebesar Rp 1,5 T dengan sumbangan SPP mahasiswa maksimal 50% dan pemerintah 25 %, maka harus ada sumber pemasukan yang lain untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 300-500 miliar. Usaha-usaha yang telah dimiliki UNAIR seperti Rumah Sakit dan PT. Dharma Putra Airlangga harus ditingkatkan. Selain itu, UNAIR butuh unit usaha baru, seperti hotel, dan pusat-pusat training. "Banyak potensi yang belum digarap. UNAIR bisa membuka pusat-pusat training dengan berbagai keahlian yang ada di UNAIR. Selain itu, hasil penelitian bisa dihilirisasi dan peneliti mendapatkan royalty. Demikian contoh perguruan tinggi yang siap menuju World class University di Indonesia. Kebijakan pada sebuah negara, tempat universitas tersebut berada. Terkait dengan peran pemerintah tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang harus digunakan guna mencapai cita-cita menjadi WCU (lihat Gambar 1).



Gambar 1: Pendekatan Strategis menuju World-Class Universities

Keterangan:

1. Picking winners. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan dan perluasan (upgrading) beberapa universitas yang telah ada yang dinilai memiliki potensi untuk ikut bersaing di arena internasional.

2. Hybrid formula. Pemerintah mendorong sejumlah perguruan tinggi yang telah ada untuk melakukan merger atau transformasi sehingga terbentuk universitas baru yang sesuai dengan kriteria WCU.
3. Clean-slate approach. Pemerintah mendirikan universitas baru mulai dari awal. Tiga pendekatan tersebut di atas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan dapat dicari dari dimensi-dimensi seperti:
 - a. kemampuan untuk menarik minat bakat;
 - b. biaya;
 - c. tata kelola (governance);
 - d. budaya institusi;
 - e. manajemenperubahan.²³

Transformasi di sini mengandung maksud usaha untuk menyesuaikan keadaan di dalam universitas dengan keadaan yang menjadi tuntutan yang umum berlaku bagi WCU. Dari tabel dapat kita amati kelebihan dan kekurangan tiap pendekatan. Sebagai misal, jika pendekatan yang diambil adalah melakukan “upgrade”, maka kemungkinan untuk terjadi perubahan sangat kecil mengingat budaya organisasi atau institusi pada universitas telah lama berlangsung dan biasanya akan resisten terhadap perubahan. Sedangkan pendirian universitas baru memerlukan kerja keras untuk membuat universitas tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak, khususnya dalam skala global. Pendekatan “merger”, yang boleh kita sebut sebagai pendekatan antara kedua strategi yang lain, nampaknya dapat digunakan untuk membantu universitas di dalam menuju status WCU.

²³Naibaho, “Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional.”

Berdasarkan pengalaman pertumbuhan universitas-universitas baik di dunia, setidaknya-tidaknya, ada dua dimensi besar yang harus kita perhatikan jika kita ingin menyiapkan sebuah institusi perguruan tinggi menjadi berkelas dunia.

1. *External nature*, atau boleh dibilang sebagai faktor eksternal. Dimensi ini menyangkut peran pemerintahan (negara), baik di level nasional maupun di level provinsi.
2. Dimensi internal. Dimensi ini berhubungan dengan pertanyaan: apakah yang akan dilakukan oleh sebuah universitas agar ia berubah menjadi sebuah institusi kelas dunia? Di sini perlu diperhatikan bahwa sebuah institusi kelas dunia tak terjadi dengan begitu saja. Ia hanya bisa terjadi melalui suatu proses evolusi penting, tahap demi tahap, dan (berusaha) melakukan transformasi dirinya sendiri kedalam sebuah universitas kelas dunia. Tak ada sebuah universitas kelas dunia yang berkembang dengan begitu saja. Ia tumbuh dan berkembang dengan perencanaan yang sistematis, tekad yang kuat, perumusan kebijakan yang terfokus, disertai dengan pendayagunaan sumberdaya manusia yang bersifat meritokrasi.²⁴

Memperhatikan perkembangan diskursus universitas kelas dunia di tanah air, kita seringkali menemukan pandangan, bahwa orang seringkali berharap banyak dengan peran pemerintah untuk melakukan transformasi sebuah perguruan tinggi menjadi *world-class university*.²⁵ Tetapi pandangan ini

²⁴ Ahmad and Afan Zaini, "Urgensi Manajemen Pendidikan Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 2015, h. 1-5

²⁵ Mujianto Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi," *Jurnal Studi Islam*, 2015, <https://doi.org/1978-306X>.

sesungguhnya tak sepenuhnya valid. Peran pemerintah adalah bukan sesuatu yang bersifat kritikal. Salah satu kritikal isu yang harus diperhatikan ketika kita akan membangun sebuah universitas kelas dunia adalah apa yang sering dikenal sebagai *"a favorable policy environment and direct (public) initiative support."* Sebuah universitas kelas dunia baru akan tercipta apabila ia didukung oleh kebijakan-kebijakan yang kondusif yang fokus kepada usaha pencapaian standar-standar mutu (layanan dan produk) secara internasional (*beyond national standard*).²⁶ Dengan begitu, pembangunan institusi dilakukan bersamaan dengan peluncuran kebijakan-kebijakan yang mendukungnya, seperti peningkatan alokasi anggaran, peningkatan fasilitas pendidikan dan penelitian, serta peningkatan kapasitas (baik kapasitas institusi, maupun kapasitas sumberdaya manusia).

Jika kembali kita perhatikan pertumbuhan institusi universitas kelas dunia, maka yang juga harus diperhatikan adalah kesadaran civitas akademika untuk melakukan investasi yang terfokus untuk mencapai *"aspire to be of international standing."* Itu sebabnya, tak ada pilihan yang lebih baik, bahwa perguruan tinggi harus *"to develop an integrated system of teaching, research, and technology-oriented institutions."* Usaha ini amat penting dilakukan agar lembaga universitas didukung oleh *"a few center of excellence"* yang terus menerus fokus dan terarah kepada penciptaan *"value-added fields"*, sehingga bisa mendorong tumbuhnya *"the areas of comparative advantage"*, yang kemudian secara bertahap akan dapat membangkitkan universitas *"eventually evolve into world-class institutions."*

Banyak perguruan tinggi yang mengalami kegagalan dalam menyiapkan dirinya untuk menjadi universitas kelas dunia. Biasanya, perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti itu mengalami masalah. Diantara problematik yang dihadapi (misalnya) adalah

1. kebijakan-kebijakan yang kurang fokus terhadap arah yang hendak dituju
2. lemahnya kesadaran dalam melakukan investasi untuk mencapai sasaran dan target
3. kurangnya (kemampuan) institusi untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi, sehingga keuntungan komparatif tak sepenuhnya dapat dicapai
4. miskinnya sistem meritokrasi dalam pendayagunaan talenta, sehingga “*the center of excellence*” tak dapat berkembang dengan baik dan sehat
5. berkembangnya sikap-sikap inferior yang kurang memberi ruang terhadap perubahan dan disrupsi, sehingga civitas akademika terbelenggu dalam siklus stagnasi.²⁷

Untuk mengatasi semua kendala seperti teridentifikasi di atas, yang dibutuhkan kemudian adalah sebuah kepemimpinan universitas yang menguasai “*strategic vision*”, yang mampu menerjemahkan “*diversified system*” kedalam sebuah “*integrated and supported system*”, yang saling terkoneksi satu sama lain, baik dalam bidang (layanan) akademik maupun dalam bidang (layanan) administratif. Dengan langkah seperti

²⁶ Suniarti Chalid, “Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi.”

²⁷ M A H Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 45.

itu, tahapan menyiapkan diri perubahan institusi biasa ke dalam institusi berkelas dunia, dapat dimulai. Lalu, apa saja skema yang telah disiapkan, bahkan sebagian sedang dijalankan?

1. *Pertama*, menghadiri *workshop* dan konferensi internasional yang diadakan oleh *QS World University Ranking (QS)*, *Times Higher Education (THE)*, dan *Shanghai Jiao Tong Ranking (SJT)*.
2. *Kedua*, melakukan sosialisasi dan *workshop* tentang *world university ranking* di lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar dunia versi *QS World University Ranking (QS)*.
3. *Ketiga*, mengumpulkan, evaluasi, dan presentasi data via *website* lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar dunia versi *QS World University Ranking (QS)*.
4. *Keempat*, melakukan monitoring dan evaluasi lima perguruan tinggi Indonesia yang berpotensi masuk peringkat 500 besar dunia.

Pandangan pro dan kontra terhadap pemeringkatan dan orientasi *world class university*. Fakta bahwa perbedaan metodologi, kriteria dan indikator penilaian antar lembaga pemeringkatan, mestinya menyadarkan bahwa masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda satu sama lain. Masing-masing punya landasan filosofi dan ideologi yang berbeda dalam mendefinisikan kampus yang berkualitas. Namun demikian, pemeringkatan berskala internasional, regional, atau nasional tetap ada faedahnya sepanjang bisa mendorong kemajuan dan orientasi layanan bermutu yang

menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Apalagi usia perguruan tinggi di tanah air rata-rata baru mencapai setengah abad hingga satu abad, usia yang cukup muda dibandingkan dengan universitas Harvard, Oxford, UCLA, McGill, dan sejenisnya yang telah berusia ratusan tahun dan selalu berada di posisi teratas dalam perangkian perguruan tinggi dunia.²⁸

D. World Class-University (WCU) di lembaga Pendidikan Islam

Persoalan identitas diri *output* pendidikan tinggi Islam, sungguh memprihatinkan. Kesibukan dan kesombongan akademik buah penerapan sistem pendidikan tinggi sekuler kapitalistik telah menjauhkan para intelektual muslim dari jati dirinya yang seharusnya berkepekaan dan berkecerdasan tinggi dalam memahami persoalan Islam dan kaum muslimin.²⁹ Sementara itu kemerosotan moral yang luar biasa terlihat dari kekerasan mental hingga kekerasan fisik dan seksual yang begitu eksis dalam kehidupan pendidikan tinggi sekuler hari ini. Contoh lain, di bidang ilmu Islam, keberadaan mujtahid begitu langka meski sangat dibutuhkan. Inilah diantara buah pahit liberalisasi sistem pendidikan, yang berjalan mengikuti kepentingan korporasi dan agenda kafir penjajah.

Kondisi ini semakin diperparah oleh fenomena *braindrain*. Yakni hengkangnya tenaga ahli karena berbagai alasan seperti kesejahteraan dan kesempatan berkarya ke negara-negara industri, seperti di AS, Jepang, dan Inggris. Ada puluhan juta

²⁸ Suniarti Chalid. "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi." *In Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 1307-12, 2007

²⁹ Akmal Mundiri, "Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Membangun Branding Image," *Pedagogik*, 2016. 67-75

jiwa di negeri ini yang kesulitan mengakses hajat hidup mereka di tengah-tengah kemajuan sains dan teknologi berbagai bidang kehidupan. Mulai dari kesehatan, pangan, air bersih, energi hingga tempat tinggal. Sementara itu kerusakan lingkungan semakin parah. Misalnya penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis sawit sebagai wujud kemajuan teknologi di bidang energi justru menimbulkan petaka eksploitasi gambut yang memperparah pemanasan global dengan berbagai dampaknya.

Pemerintah diyakini sebagai pihak yang memiliki peran lebih nyata pada perkembangan pendidikan tinggi zaman sekarang. Hal ini berbeda dari situasi masa lalu, misalnya ketika beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat membentuk sebuah komunitas perguruan tinggi elite bernama Ivy League. Akhir tahun 2014 lalu BAN-PT kerjasama dengan UIN Jakarta dan UIN Malang menyelenggarakan Konferensi Internasional dengan judul “Towards World Class Islamic Higher Education Institutions”. Menuju Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Kelas Dunia”. Tema world class menjadi perbincangan yang hangat di kalangan perguruan tinggi. Beberapa tahun terakhir, kampus-kampus negeri maupun swasta telah berupaya menjadi universitas kelas dunia atau world class university (WCU).³⁰

Argumen yang mengemuka mengapa kampus-kampus berupaya menjadi berkelas dunia adalah agar dapat bersaing dengan kampus-kampus kelas dunia dan sekaligus menghasilkan lulusan yang juga dapat bersaing dengan lulusan dari

³⁰ Edi Subkhan, “Mempertanyakan Orientasi World Class University.” Disampaikan pada *seminar nasional* BEM FE Unsoed, 2010, h. 1-6.

negara-negara maju di dunia internasional. Argumen-argumen tersebut muncul pada dasarnya karena memang melihat beberapa kenyataan mutakhir akibat dari globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan manusia.³¹

Kementerian Agama akan memberi mandate kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mempersiapkan sebagai Universitas Kelas Dunia (*World Class University, WCU*). Mudjia Rahardjo, Rektor UIN Malang menyambut rencana Menteri Agama dengan semangat. “UIN Malang sudah mulai membuat program ini sejak tiga tahun yang lalu. Jadi gagasan Pak Menteri untuk mendorong *World Class University* sudah sesuai dengan roadmap yang kita buat”, tutur Mudjia dengan bangga. Perwakilan dari dua UIN tersebut mempresentasikan “impian”-nya di hadapan Menteri Agama. Hadir dalam kesempatan ini adalah Syamsudin, Kepala Biro Perencanaan dan Dede Rosyada, Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Dalam presentasinya, Jamhari yang merupakan utusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan tentang obsesinya untuk menjadi *99 Top World University Ranking*, dan menargetkannya akan tercapai pada tahun 2025. Sementara Mudjia Rahardjo mengatakan bahwa cita-cita yang sama dan ditargetkan terwujud pada tahun 2019. “Pada tahun 2019 mendatang, kita tidak saja melihat UIN Malang menjadi universitas internasional, tetapi juga masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik di dunia,” terangnya dengan optimis.

³¹ Muqoyyidin, “Integritasi Dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama Dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam Center of Excellences.”

Merujuk kepada lembaga pemeringkat *WCU, QS dan The Times Higher Education (THE)*, untuk menuju Perguruan Tinggi bereputasi International, setidaknya ada lima komponen yang perlu diperhatikan dan selama ini menjadi tolok ukur, yaitu: akademik/pendidikan, reputasi di bidang penelitian, kerjasama internasional, rasio mahasiswa dan dosen internasional, serta industry income. Di UIN Malang, program WCU ini didesain dengan konsep integral, bukan kelas khusus. “Meskipun akan ada program studi yang menjadi leading sektornya, tapi semua fakultas dan semua jurusan akan dikembangkan menjadi *world class university*,” jelas Mudjia lebih lanjut. Mudjia mencontohkan bahwa dari lima komponen yang sekarang ini paling kuat adalah *internasional output*, yaitu citra internasional. “Sekarang ini di UIN Malang sudah ada mahasiswa dari 29 negara yang kuliah di UIN Malang. Mereka menyebar di banyak jurusan,” tuturnya lebih detail. Untuk mendukung percepatan gagasan ini, kedua perwakilan UIN tersebut meminta agar Kementerian Agama membantu penyiapan anggarannya, terutama untuk pengembangan penelitian, yang disokong penetapannya melalui Keputusan Menteri Agama.

WCU memang sudah digulirkan sejak lama di lingkungan PTAIN. “World Class University telah menjadi obsesi dan cita-cita besar dari civitas akademika di PTAIN se Indonesia,” kata Dede Rosyada, Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Menurutnya, untuk menjaga keberlangsungan pemberian mandat WCU ini, Kementerian akan menindaklanjutinya melalui penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA). KMA ini yang akan memayungi program internasionalisasi PTAIN pada umumnya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus

melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kampus Islam yang berkelas dunia. Berbagai kegiatan akademik tingkat internasional sering digelar, seperti penyelenggaraan Kuliah Tamu, Seminar, Workshop, hingga studi di luar negeri. Selain itu juga meningkatnya jumlah mahasiswa asing yang studi di kampus ulul albab ini. UIN Malang melalui Unit Penerbitan (UIN-Maliki Press) kembali menerbitkan buku-buku bertema *World Class University (WCU)*. Buku tersebut di antaranya berjudul: "UIN Maliki Malang Menuju World Class University". Buku yang disusun oleh Tim Universitas ini dicetak secara eksklusif dengan tampilan *full colour* yang telah terbit pada bulan Juni 2014.

Kementerian Agama RI menyatakan bahwa sudah saatnya 8 PTAIN yang telah berstatus sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) harus ditransformasikan menjadi universitas yang berkelas dunia (*world class university*). Ada dua UIN yang diproyeksikan menjadi WCU yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau disingkat UIN Maliki Malang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Syahida Jakarta. Kedua kampus ini secara institusi telah terakreditasi A dari BAN-PT yang merupakan modal penting dalam proses transformasi kelembagaan semacam ini.

Kementerian Agama memandang bahwa alasan untuk melakukan transformasi tidak lain untuk memperbaiki kualitas pendidikan di bawah koordinasi Kemenag. Apalagi, beberapa tahun terakhir, lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenag terus menaikkan status. Dari semula berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan dari IAIN menjadi UIN. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan jika PTAIN yang sudah

berstatus UIN harus dipacu kualitasnya menjadi Universitas Islam Negeri berkelas dunia.

Menapaki perjalanan sejarah yang dilalui, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) yang dulunya berbentuk Institut (IAIN) sedikit banyak telah berkiprah nyata dalam ikut serta mencerdaskan bangsa, terutama dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu keagamaan Islam di bumi Indonesia. Berbagai situasi dan kondisi telah dialami. Beragam tantangan dalam berbagai dimensinya juga terus dilalui. Demikian pula beragam mahasiswa dari sisi etnis, latar belakang sosial, dan lainnya diantarkan untuk meraih cita-cita mereka, sebagaimana pula banyak alumni yang dilahirkan dengan aneka profesi dan jabatan.³²

Semua itu merupakan pengalaman berharga yang menjadikan salah satu perguruan tinggi Islam negeri tertua di Indonesia ini terus berupaya mengukuhkan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan dalam arti senyatanya. Untuk itu, pembenahan dalam berbagai aspeknya dilakukan secara berkelanjutan. Manajemen pengelolaan diperkuat sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sarana dan parasarana ditambah dan diupayakan disesuaikan dengan tuntutan dan keperluan pembelajaran dan pendidikan. Di atas semua itu, aspek akademik yang bertumpu pada tridharma perguruan tinggi diperkuat –baik dari sisi kualitas maupun dari sisi karakteristik –dari saat ke saat.³³

³² Muhammad Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2017, <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>.

³³ Abdul Kadir and Muzakki, Akh and Sholeh, *UINSA emas menuju world class university* (Surabaya: UINSA Press, 2016).

E. Penutup

Orientasi *world class university* yang diantaranya perbedaan metodologi, kriteria dan indikator penilaian antar lembaga pemeringkatan,. Masing-masing punya landasan filosofi dan ideologi yang berbeda dalam mendefinisikan kampus yang berkualitas. Tetapi standarisasi atas pemeringkatan berskala internasional, regional, atau nasional tetap ada. Ada lima PT unggulan nasional untuk mencapai peringkat WCU. Kelima PT unggulan itu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor, agar –paling tidak– diharapkan bisa masuk 500 top dunia. Begitu pula halnya dengan Universitas Andalas (UNAND), yang terus meningkatkan mutu agar mampu menembus WCU.

Sedangkan Perguruan Tinggi Islam yang dianggap mampu dan di tunjuk oleh Kementerian Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mempersiapkan sebagai Universitas Kelas Dunia (*World Class University, WCU*). Dan di susul oleh UIN yang lain di Indonesia. Upaya pemerintah harus terus ditingkatkan untuk mendorong hal tersebut, sehingga impian untuk meraih perguruan tinggi bertaraf internasional benar benar terwujud. Baik untuk PTUN maupun PTKIN.

Langkah nyata Kementerian Agama adalah melakukan transformasi tidak lain untuk memperbaiki kualitas pendidikan di bawah koordinasi Kemenag. Apalagi, beberapa tahun terakhir, lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenag terus menaikkan status. Dari semula berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) dan dari IAIN menjadi UIN. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan jika PTAIN yang sudah berstatus UIN harus dipacu kualitasnya menjadi Universitas Islam Negeri berkelas dunia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Amin. "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2017. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017>.
- Ahmad, H, and Afan Zaini. "Urgensi Manajemen Pendidikan Islam." *Jurnal Ummul Qura*, 2015.
- Ellitan, Lena. "Praktik-praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2004. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2>.
- Fitri, Agus Zaenul. "Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi Kelembagaan Bereputasi Internasional." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2, 2013.
- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2012.
- Hutami, F Rieka. "Research University Sebagai Langkah Awal Menuju World Class University." *Jurnal Manajemen Indonesia* 11, no. 3, 2011
- Mundiri, Akmal. "Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Membangun Branding Image." *Pedagogik*, 2016.

- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Integrasi Dan Interkoneksi Ilmu-Ilmu Agama Dan Sains Menuju Pendidikan Tinggi Islam Center of Excellences." *Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2, 2014.
- Naibaho, Kalarensi. "Perpustakaan Sebagai Salah Satu Indikator Utama Dalam Mendukung Universitas Bertaraf Internasional." *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga* 2, no. 1, 2007.
- Pauliana, Thomas. "Seminar Internasional , ISSN 1907-2066 Seminar Internasional." *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 2007.
- Rosana, Dadan. "Pengembangan Budaya Kualitas Melalui Penerapan ISO 9001: 2000 Di Universitas Negeri Yogyakarta." *Cakrawala Pendidikan*, no. 3, 2009.
- Setiawati, Linda. "Efektivitas Pengembangan Manajemen Pendidikan Tinggi (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Barat Menuju World Class University)." *Penelitian Pendidikan*, 2012. <https://doi.org/10.1245/s10434-014-4122-7>.
- Solichin, Mujiyanto. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Jurnal Studi Islam Oktober*, 2015. <https://doi.org/1978-306X>.
- Subkhan, Edi. "Mempertanyakan Orientasi World Class University." Disampaikan pada seminar nasional BEM FE Unsoed, 2010.
- Suniarti Chalid. "Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi." In *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*, 1307–12, 2007.